Gerakan "Ta'awun untuk Negeri" menyentuh sikap cinta dan bela negara. Semua komponen dan warga bangsa pada dasarnya memiliki komitmen mencintai dan membela kepentingan bangsa dan negara.
—**Haedar Nashir,** Ketua PP Muhammadiyah 2015-2020

Taawun untuk negeri adalah sebuah gerakan moral, *akhlaq al-karimah* yang maslahah. Taawun tidak terbatas pada saat terjadi musibah, tetapi amal salih yang dilaksanakan dengan istiqamah untuk menyelesaikan masalah dan menghilangkan *musykilah* (kesulitan) dan *masyaqqah* (penderitaan).
—Dr. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah 2015-2020

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak sosiokeagamaan tidak boleh alergi terhadap politik. Wawasan keagamaannya justru harus menyatu dengan wawasan kekuasaan.
—Azaki Khoirudin. Direktur Program Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta

Ta'awun adalah kegiatan saling membantu dan bersinergi yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai cara membumikan ajaran Agama dalam kehidupan keseharian.
—Arif Jamali Muis. Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah

Keberpihakan kepada kelompok miskin dan marjinal sudah menjadi nalar Otentik Muhammadiyah. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah telah memberikan contoh bagaimana organisasi ini bekerja.
—Bachtiar Dwi Kurniawan. Sekretaris Majelis Permberdayaan Masyarakat PP. Muhammadiyah

ISBN: 978-602-60970-3-3
9 786026 097033

Ta'awun untuk Negeri

Abdul Mu'ti (Penyunting)

Prolog
Haedar Nashir

TA'AWUN UNTUK NEGERI

Transformasi Al-Ma'un dalam Konteks Keindonesiaan

Penyunting
Abdul Mu'ti

"Ta'awun Untuk Negeri"

106 TAHUN

MUHAMMADIYAH

18 November 1912 - 18 November 2018

TAAWUN UNTUK NEGERI

Transformasi Al-Ma'un dalam Konteks Keindonesiaan

Prolog
Haedar Nashir

Penyunting
Abdul Mu'ti

TA'AWUN UNTUK NEGERI

Transformasi Al-Ma'un dalam Konteks Keindonesiaan

Penyunting: Abdul Mu'ti
Penghimpun Naskah: Azaki Khoirudin

Kontributor:

Abdul Mu'ti ❁ Arif Jamali Muis ❁ Azaki Khoirudin
Bachtiar Dwi Kurniawan ❁ Bayujati Prakoso ❁ Benni Setiawan
David Efendi ❁ Fitrah ❁ Hasnan Bachtiar ❁ Mohamad Ali
Muhbib Abdul Wahab ❁ Muh. Asratillah ❁ Sahrul Hidayat

Penyelaras Akhir: Dinan Hasbudin
Pendesain Sampul & Isi: desain651@gmail.com

Diterbitkan oleh:
Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah
Jl, Menteng Raya No. 62 Jakarta
Didukung oleh:
Muhammadiyah University Press
Jl. A Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura Surakarta 57102

14 x 21 cm; 209 Halaman
ISBN: 978-602-60970-3-3
Cetakan I: Februari 2019

SENARAI ISI

2
TA'AWUN KEINDONESIAAN—65

3
TA'AWUN KEBUDAYAAN—103

Prolog

TA'AWUN UNTUK NEGERI

Konteks dan Relevansi untuk Indonesia Berkemajuan

—DR. H. Haedar Nashir, M.Si.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

أَلسَّلاَمَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَا كَاتُه

اَلْحَمْدُا لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُبِهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَمُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ اِلاّ اَللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَلآنَبِيَ بَعْدَهُ

ALHAMDULILLAH Muhammadiyah menyelenggrakan resepsi Milad ke-106 tanggal 18 November 2018 ini bertempat di Puro Mangkunegaran Surakarta yang bernuansa kearifan Islam kultural. Kraton yang bersejarah ini di masa lalu menginspirasi Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan "**Padvinders**", yakni Gerakan Kepanduan "**Hizbul Wathan**" tahun 1918. Pendiri Muhammadi-

yah itu melalui Hizbul Wathan mendidik generasi muslim untuk cinta dan bela tanah air Indonesia. Dari organisasi kepanduan Islam tertua ini lahir seorang **Soedirman** muda yang menjadi pemimpin Perang Gerilya, Bapak Tentara Nasional Indonesia, dan Pahlawan Nasional.

Dalam momentum Milad tahun 2018 ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara khusus menganugerahkan **MUHAMMADIYAH AWARD** kepada **DR. (HC) Drs. H. MUHAMMAD JUSUF KALLA** sebagai wujud penghargaan tertinggi atas dedikasinya dalam bidang **Perdamaian dan Kemanusiaan**. DR. (HC) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla telah menggoreskan sejumlah kepeloporan dan kiprah nyata dalam merekat integrasi nasional untuk tegaknya perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana dilakukan di Aceh, Poso, dan Ambon yang sangat berarti bagi keutuhan dan persatuan Indonesia. Tokoh nasional yang dua periode menjadi Wakil Prsiden Republik Indonesia tersebut juga dikenal sebagai saudagar muslim yang tangguh dan banyak berjasa bagi kepentingan merekat ukhuwah dan kemajuan umat Islam.

MILAD MUHAMMADIYAH ke-106 tahun 2018 ini mengangkat tema "Ta'awun untuk Negeri". Melalui tema tersebut Muhammadiyah membawa pesan utama kepada seluruh komponen bangsa termasuk pemerintah dan kekuatan politik nasional agar secara kolektif-kolegial mengerahkan segala daya dalam menggelorakan semangat, pemikiran, dan tindakan-tindakan nyata untuk "Saling menolong dan bekerja sama" demi kebaikan, kemaslahatan, serta kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Menggelorakan "Ta'awun untuk Negeri" berarti menyuarakan pesan keruhanian Islam dalam mengembangkan sikap saling tolong-menolong atau bekerja sama untuk terwujudnya kebaikan serta kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Sebaliknya mencegah segala bentuk "kerja sama" (konspirasi) dalam hal dosa dan keburukan sebagaimana pesan Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

".... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS Al-Mâidah/5:2).

Ajaran Ta'awun

Islam menjunjung tinggi nilai "ta'awun", yakni tolong-menolong antarsesama manusia—termasuk di dalamnya kerja sama, toleransi, kebersamaan, serta segala kebajikan— yang membawa pada kemaslahatan hidup bersama. Sebaliknya Islam mengajarkan umatnya agar menjauhkan diri dari "kerja sama" (persekongkolan) yang membawa pada keburukan dan kemudharatan dalam kehidupan bersama. Ajaran "ta'awun" secara khusus termaktub dalam Surat Al-Maidah ayat ke-2 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا
ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن
رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ
أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ
وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ
ٱلۡعِقَابِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi›ar-syi›ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yu (hewan-hewan kurban) dan qalaa-id (hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya." (QS Al-Maidah: 2).

Surat Al-Maidah ayat kedua yang di dalamnya temaktub ajaran "ta'awun", dalam sejumlah tafsir turun terkait dengan situasi ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy di seki-

tar rentang waktu dan peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Menurut Ibnu Katsir, bersumber dari penuturan Said bin Aslam, bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabat berada di Hudaibiyah ketika orang-orang musyrik Makkah menghalanginya menuju Baitullah di mana hal itu dirasakan kaum muslimin berat sekali. Suatu ketika sekelompok orang musyrik dari wilayah timur hendak pergi umrah ke Baitullah sesuai kepercayaan mereka kala itu, sebagian sahabat berniat menghalangi mereka sebagai bentuk pembalasan. Dalam konteks itulah Allah menurunkan ayat ke-2 pada Surat Al-Maidah tersebut. Sebagaimana kupasan tafsir pada umumnya, terdapat versi lain seputar sabab nuzul ayat tersebut.

Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan hadis Nabi yang bunyinya "*unshur akhaka dhaliman aw madhluman*", artinya "Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya" [HR Imam Ahmad (11538) dari Anas bin Malik]. Ketika Nabi ditanya kenapa harus menolong orang yang menganiaya? Rasul menjawab, yang artinya "Engkau larang dia agar tidak berbuat aniaya, begitulah cara kamu menolongnya". Betapa tegas tapi moderat cara Rasulullah mengajarkan misi dakwah, bahwa dalam menghadapi pihak musuh sekalipun senantiasa dimiliki jiwa dan sikap dasar kebajikan. Dalam bernahi-munkar pun harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf atau baik, bahwa keburukan jangan dibalas dengan keburukan yang serupa.

Dalam kisah lain menurut Imam Ahmad dari Al-A'masyi, dari Yahya bin Watsab, dari salah seorang sahabat Nabi, dia berkata yang artinya: "Orang-orang mukmin yang berbaur dengan manusia dan bersabar terhadap cercaan mereka itu lebih besar pahala-

nya daripada orang mukmin yang tidak berbaur dan tidak sabar terhadap cercaan mereka". Senada dengan itu menurut riwayat Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar dari Abdullah, bahwa Nabi bersabda yang artinya, "Orang yang menunjukkan pada kebaikan sama seperti orang yang melakukannya". Siapa pun muslim harus menyebarluaskan kebaikan serta memperluas horizon interaksi dan kerja sama secara terbuka melintasi batas-batas primordialisme.

Betapa inklusif ajaran ta'awun dari Rasulullah bagi umat Islam. Pada frasa sebelumnya, ajaran "ta'awun" berurutan dengan kalimat "*wa laa yajrimannakum syanaanu qaumin an shadduukum 'anil masjidil haraam an ta'taduu*" (artinya: *"Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat aniaya atau melampaui batas (kepada mereka)*" (QS Al-Maidah: 2). Frasa ini mengajarkan sikap adil meskipun kepada pihak musuh atau yang memusuhi umat Islam, suatu ajaran yang sangat luhur sebagai landasan ruhani dan moral dalam berhabluminannas dengan sesama.

Spirit ta'awun dalam Islam paralel dengan ajaran ihsan, yang mengandung makna bahwa karena dekatnya seorang muslim dengan Allah Yang Maha Rahman dan Rahim maka dirinya menjadi sosok yang shaleh dan welas asih secara melintasi untuk berbuat segala kebaikan kepada Siapa pun tanpa pandang bulu. Termasuk kepada yang berbeda agama dan golongan, bahkan terhadap kaum kafir dan pihak yang memusuhi. Sebaliknya menjauhi atau tidak boleh berbuat dan bekerja sama dalam hal segala keburukan dengan dalih apa pun kepada Siapa pun. Semua di-

sertai keseimbangan atau sikap tengahan (wasathiyah), manakala dengan pihak yang berbeda agama dan golongan mampu bekerja sama secara baik, tentu dengan sesama seiman dan seagama dapat berhubungan dan bekerja sama dengan sebaik-baiknya.

Dalam Muhammadiyah ajaran ta'awun sejiwa dan seiring dengan spirit Al-Ma'un sebagaimana menjadi salah satu ciri gerakan Islam ini sejak didirikannya oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan 106 tahun yang silam. Bahwa setiap muslim yang menganut Islam dia harus mewujudkan agamanya dalam membela dan memberdayakan kaum miskin, yatim, serta dhu'afa (kaum lemah) dan mustadh'afin (kaum tertindas, teraniaya). Sebaliknya termasuk dusta dalam beragama manakala dirinya tidak mau menolong kaum yang lemah dan dilemahkan. Apalah artinya beragama manakala tidak peduli dan tidak mau berbagi untuk mereka yang bernasib malang dalam kehidupannya.

Ajaran Al-Ma'un dalam Muhammadiyah telah menjadi gerakan praksis sosial Islam yang bersifat membebaskan (emansipasi, liberasi), memberdayakan (*empowerment*), dan memajukan kehidupan umat dan bangsa. Gerakan Al-Ma'un bahkan secara kelembagaan melahirkan rumah sakit, klinik, pelayanan sosial, tanggap kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan praksis Lazismu untuk seluruh anak negeri. Praksis Al-Ma'un saat ini pun melahirkan aksi kemanusiaan (*humanitarian*) untuk semua golongan umat manusia baik di dalam maupun di luar negeri dalam gerakan "Muhammadiyah for All" atau "Muhammadiyah untuk Semua". Suatu ajaran "ta'awun" yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan.

Islam sejatinya mengandung elemen ajaran yang membebaskan dalam makna mengeluarkan umat manusia dari keadaan buruk ke keadaan yang lebih baik. Inilah praksis sosial Islam yang oleh Asghar Ali Engineer disebut sebagai teologi pembebasan dalam Islam (*The Islamic Theology of Liberation*). Menurut Asghar, ajaran Islam sejati menunjukkan komitmen tinggi pada terciptanya tatanan sosial yang adil, egaliter, dan nireksploitasi. Dinyatakan, tidak dapat disebut masyarakat muslim (*Islamic society*) manakala di dalamnya masih terdapat eksploitasi satu terhadap lainnya. Karenanya Islam hadir dengan pandangan dan praktik sosial yang membebaskan kehidupan. Bahkan kalimat "Laa Ilaaha Illa Allah" menurut pemikir Islam postmodern ini dapat menjadi kekuatan pembebas bagi kaum lemah sekaligus membongkar sistem apa pun yang otoritarian!

Konteks Kebangsaan

Pesan "Ta'awun untuk Negeri" kami gelorakan ke seluruh persada tanah air setidaknya sebagai respons dan komitmen Muhammadiyah atas dua situasi yang dihadapi bangsa saat ini. ***Pertama,*** adanya musibah gempa bumi di Lombok dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, serta di Palu-Donggala-Sigi di Sulawesi Tengah, di samping musibah lainnya di negeri ini. Pesan utamanya agar semua tergerak untuk peduli dan berbagi meringankan beban saudara sebangsa atas musibah yang terjadi, seraya bergerak bersama agar saudara-saudara kita di dua wilayah musibah itu bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan baik dan lebih maju.

Kedua, situasi nasional di tahun politik yang sedikit atau banyak menunjukkan *ananiyah-hizbiyah* (egoisme kelompok) dan gesekan sosial-politik satu sama lain. Kontestasi politik memang wajar dengan dinamika persaingan dan perebutan kepentingan. Namun manakala tidak terkelola dengan baik dan dibiarkan serbabebas maka dapat memicu konflik dan retak sosial antarsesama anak bangsa secara saling berhadapan dan bermusuhan. Karenanya penting dilandasi nilai "ta'awun" untuk "saling peduli dan berbagi" layaknya satu tubuh di keluarga bangsa. Perbedaan politik tetap diikat oleh rasa bersaudara dan tidak menyuburkan suasana permusuhan yang merugikan kehidupan berbangsa.

Gerakan "Ta'awun untuk Negeri" dapat diaktualisasikan dalam gerakan membangun kebersamaan dengan jiwa tulus semata-mata untuk memajukan kehidupan bangsa. Umat Islam menyebut semangat kebersamaan itu dengan ukhuwah, sedang dalam idiom umum dikenal gotong-royong untuk kebaikan hidup bersama. Semangat ukhuwah dan gotong-royong itu niscaya terus disebarluaskan agar menjadi praktik hidup yang nyata dan bukan retorika. Ukurannya ialah ketika terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan, satu sama lain mau saling berkorban dan berbagi, bukan saling mengutamakan kepentingan dan mau menang sendiri.

Wujudkan ta'awun sesama warga dan komponen bangsa dengan sikap, tindakan, dan usaha bekerja sama secara nyata. Semua pihak mau saling peduli dan berbagi, serta saling hidup maju dan makmur bersama-sama. Dalam kehidupan kebangsaan jangan sampai perebutan kekuasaan menyuburkan egois-

me kelompok secara eksklusif dan berlebihan, yang menggerus kebersamaan. Jangan sampai terjadi paradoks, di ruang publik menyuarakan ukhuwah dan gotong royong, tetapi dalam praktik menampilkan sikap aji mumpung, mau menang sendiri, dan kebiasaan menyisihkan pihak lain yang berbeda pandangan atau golongan demi kejayaan diri atau golongan sendiri dalam hasrat kuasa berlebih.

Gerakan "Ta'awun untuk Negeri" juga menggelorakan gerakan pemberdayaan untuk mengangkat harkat umat dan warga yang lemah menuju kehidupan "khaira ummah" yang berkecukupan. Jika satu prosen penduduk negeri ini menguasai mayoritas kekayaan Indonesia, maka inilah sumber utama kesenjangan sosial-ekonomi, yang harus dipotong mata rantainya secara sistemik. Kesenjangan sosial jangan dibiarkan seolah wajar hanya karena tidak ingin menempuh langkah drastis dalam menghadapinya, sebab rakyat dan negaralah yang dirugikan. Di negeri ini tidak boleh para mafia dan tangan-tangan perkasa dibiarkan menguasai Indonesia untuk meraih kejayaan sendiri dengan mengorbankan kepentingan kolektif bangsa dan negara.

Konstitusi pasal 33 UUD 1945 memerintahkan: "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Negara berkewajiban hadir untuk mewujudkan perintah konstitusi tersebut sebagai usaha menjalankan apa yang oleh Bung Hatta sebagai "ekonomi terpimpin".

Gerakan "Ta'awun untuk Negeri" juga dapat dijadikan wahana mengembangkan dialog kolektif antarsesama komponen bangsa atas persoalan-persoalan bangsa. Ketika masalah radikalisme, terorisme, kekerasan, intoleransi, dan masalah-masalah lainnya menjadi agenda krusial di tubuh bangsa Indonesia maka kembangkan dialog-dialog yang cerdas, bijaksana, dan menempuh jalan musyawarah untuk pemecahannya. Jangan jadikan masalah-masalah tersebut sebagai proyek dan komoditi karena akan kehilangan objektivitas dalam menyusun format pemikiran dan strategi penyelesaian masalah secara sistemik dan menyeluruh, bukan penyelesaian masalah secara instan dan parsial.

Jika masalah radikalisme, terorisme, intoleransi, dan segala bentuk ancaman terhadap keindonesiaan dipandang sebagai agenda serius, maka seyogyanya dibaca secara objektif dan komprehensif agar tidak bersifat parsial, tendensius, dan gagal paham. Perlu rekonstruksi konsep, pemikiran, dan parameter yang dapat didialogkan dan dirumuskan secara kolektif tentang masalah-masalah krusial kebangsaan tersebut supaya terhindar dari tendensi yang sepihak, hitam-putih, dan hanya ditujukan pada satu aspek dan golongan. Sikap terbuka untuk mendialogkan secara nasional masalah-masalah krusial tersebut sungguh diperlukan agar strategi dan peta-jalan dalam pemecahannya benar-benar

komprehensif demi masa depan Indonesia. Di sinilah pentingnya "ta'awun pemikiran" antara pemerintah dan seluruh komponen bangsa dalam dialog dan konsensus nasional baru. Pemerintah dan semua komponen bangsa sangat bijak manakala mau duduk bersama mendialogkan kembali secara jernih dan terbuka mengenai masalah radikalisme, terorisme, toleransi, kebinekaan, dan isu-isu strategis kebangsaan dengan mengembangkan pemikiran dan pendekatan multiperspektif agar dihasilkan strategi pemecahan yang menyeluruh demi masa depan Indonesia.

Gerakan "Ta'awun untuk Negeri" menyentuh sikap cinta dan bela negara. Semua komponen dan warga bangsa pada dasarnya memiliki komitmen mencintai dan membela kepentingan bangsa dan negara. Tetapi ekspresi dan aktualisasinya beragam sehingga tidak tetperangkap pada pikiran dan tindakan yang berlebihan. Karenanya di satu pihak tidak dibenarkan ada kecenderungan warga bangsa yang melakukan politisasi dan klaim "cinta dan bela Indonesia" secara sepihak seakan paling Indonesia. Sebaliknya tidak boleh pula ada kelompok lain yang alergi dan mati--rasa keindonesiaan sehingga kurang menunjukkan sikap *melu handarbeni*, yakni merasa ikut memiliki atau *sense of belonging* terhadap NKRI, apalagi sampai berideologi dan mencita-citakan sistem ketatanegaraan lain yang bertentangan dengan Pancssila dan UUD 1945. Bagi Muhammadiyah sangatlah tegas, bahwa Negara Pancasila adalah *Darul Ahdi Wa Sayahadah*, suatu negara hasil konsensus nasional seluruh kekuatan bangsa yang dasar dan sistemnya tidak boleh diubah, namun pada saat yang sama harus dibangun sesuai dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur yang

diletakkan oleh para pejuang dan pendiri bangsa sehingga tidak menjadi Indonesia yang salah-arah dan salah-kaprah.

Pada situasi dialektika orientasi keindonesiaan yang saling bertentangan satu sama lain itulah pentingnya "jiwa ta'awun kebangsaan" untuk menanamkan orientasi moral, spiritual, rasional, dan profesional dalam semangat kebersamaan "bekerja sama dalam kebajikan dan takwa, serta tidak akan bekerja sama dalam dosa dan pelanggaran" untuk kemaslahatan dan kemajuan Indonesia. Kita ingat perdebatan cerdas dan berwawasan kenegarawanan antara Ki Bagus Hadikusumo dan Soekarno dalam sidang "Badan untuk Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan" (BPUPK) tahun 1945. Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PP Muhammadiyah saat itu, pada tanggal 31 Mei 1945, dalam akhir pidatonya menyatakan: "...Saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya pun bangsa Indonesia juga yang asli dan murni belum ada campurannya; dan sebagai seorang Muslim, yang mempunyai cita-cita Indonesia-Raya dan Merdeka, maka supaya negara Indonesia merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya pun mengharapkan akan berdirinya negara Indonesia ini berdasarkan agama Islam".

Sementara itu Soekarno ketika pidato 1 Juni 1945 menyampaikan paham kebangsaan yang luas dan tidak sempit yang kemudian terangkum antara lain dalam gagasan Pancasila. Soekarno yang juga menjadi anggota dan pernah sebagai pengurus Majelis Pendidikan Muhammadiyah di Bengkulu tahun 1930an itu, dengan lantang menyatakan, "...Saya pun, adalah orang Islam....keislaman saya jauh belum sempurna—tetapi kalau sau-

dara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam". Dialog intelektual di BPUPK itu di kemudian hari menghasilkan "Gentlement's Agreement" pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945 untuk kemudian mencapai titik kompromi lagi dalam Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada Pancasila yang ditetapkan dalam Konstitusi Dasar UUD 1945 yang disepakati pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Itulah mozaik "Ta'awun untuk Negeri" dalam bingkai kearifan politik kenegarawanan yang cerdas dan bijak dari para pendri bangsa yang mesti diteladani oleh generasi elit dan warga bangsa Indonesia saat ini.

Spirit ta'awun dalam wujud jiwa, pikiran, sikap, dan tindakan kebersamaan yang berwawasan kenegarawanan itu mesti diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kolektif dan sistemik di Indonesia saat ini. Ta'awun atau kebersamaan yang sejati dapat menjadi faktor kekuatan bagi kesatuan, keutuhan, dan kemajuan Indonesia. Sebagaimana pesan Bung Karno ketika berpidato pada 1 Juni 1945, bahwa: "Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua". Itulah mozaik ta'awun atau spirit kebersamaan yang diletakkan dengan kokoh oleh para pejuang dan pendiri bangsa secara autentik menuju Indonesia yang dicita-citakan, yang dalam perspektif Muhammadiyah disebut Indonesia Berkemajuan. Yakni Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat yang menjelma sebagai Negara Pancasila yang modern dan berperadaban utama!

Karenanya Muhammadiyah dalam usianya yang ke-106 tahun 2018 Miladiyah atau usia ke-109 tahun 1440 Hijriyah, tetap istiqamah di atas Kepribadian dan Khittahnya untuk senantiasa bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh komponen bangsa dalam misi Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid demi terwujudnya kemajuan Indonesia. Dengan "Ta'awun untuk Negeri" dalam bingkai spirit "bekerja sama dalam kebaikan dan taqwa, serta tidak akan bekerja sama dalam dosa dan pelanggaran atau permusuhan", Muhammadiyah terus berkiprah mencerahkan bangsa ke seluruh persada negeri guna mewujudkan Indonesia Berkemajuan menjadi milik bersama.

Semoga Allah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya untuk bangsa Indonesia, sehingga negeri tercinta ini menjadi Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur. *Nashrun minallah wa fathun qarib*.[]
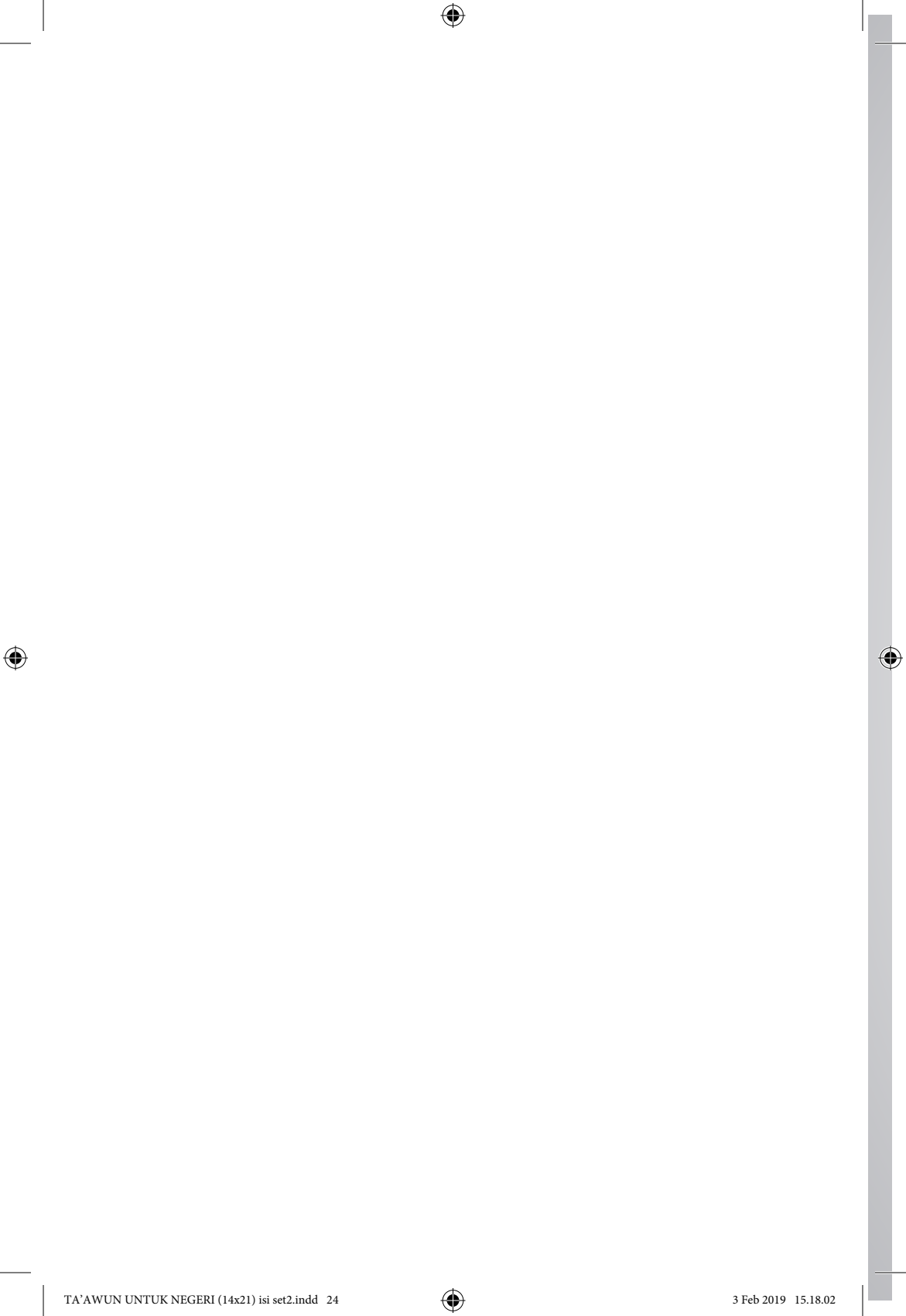
1

Teologi Ta'awun Muhammadiyah

BASIS TEOLOGIS MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN ISLAM BERKEMAJUAN

—Fauzan Anwar Sandiah

KAJIAN sosiologis dan antropologis mengenai etika Muhammadiyah belum banyak dilakukan. Beberapa karya yang termasuk ke dalam studi semacam ini antara lain: Ahmad Najib Burhani dengan dua bukunya *Muhammadiyah Berkemajuan* (2016), *Muhammadiyah Jawa* (2016), dan tentu saja karya MT. Arifin *Muhammadiyah Potret yang Berubah* (1990). Sebagian karya-karya yang lain menyinggung Muhammadiyah dalam konteks politik kebudayaan dengan mendirikan lembaga pendidikan, perpustakaan umum, dan penerbitan majalah (Ali, 2016). Sebagian lain memotret perilaku keagamaan orang-orang yang berafiliasi dengan Muhammadiyah (Kim, 1996).

Islam Berkemajuan

Satu hal yang menghubungkan berbagai karya-karya tentang Muhammadiyah tersebut adalah ketertarikannya untuk menjelaskan bagaimana gerakan ini berkembang dan memperbaharui diri. Bagian diskusi semacam ini sangat penting bagi Muhammadiyah karena merupakan usaha untuk memahami salah satu transformasi gerakan sosial-keagamaan tertua di Indonesia (berdiri tahun 1912). Diskusi seputar transformasi Muhammadiyah tidak saja berkaitan dengan perubahan-perubahan internal komunitas ini, melainkan juga informasi berharga tentang proses modernisasi Islam di Indonesia.

Buku *Etika Muhammadiyah dan Spirit Peradaban* karya Zakiyuddin Baidhawy dan Azaki Khoirudin merupakan salah satu buku yang berusaha menunjukkan betapa pentingnya peran gagasan modernisasi Islam abad ke-20 terhadap bentuk-bentuk Islam kolektif kontemporer di Indonesia. Gagasan modernisasi Islam adalah kunci penting untuk memahami transformasi pemikiran Islam di Indonesia. Gagasan modernisasi Islam tentu tidak terjadi untuk agama ini saja.

Talal Asad (1993), antropolog studi agama-agama mengemukakan bahwa agama-agama pada dasarnya adalah fenomena transhistoris dan transkultural, di mana nyaris tidak mungkin memisahkannya dari proses-proses sosial serta medan diskursif yang membentuk wacanan tentangnya kecuali melalui domain Kuasa (dalam pengertian Foucault). Etika adalah konsep penting untuk memahami jembatan antara ide dan gagasan yang dipengaruhi oleh agama dan dampaknya terhadap proses-proses sosial. Etika

pertama-tama harus dilihat sebagai simbol, terdiri atas relasi-relasi antara objek atau kejadian, serta membawa dampak intelektual, instrumental, dan emosional.

Gagasan hari ini tentang Islam modern nyaris dapat diterima oleh tipe budaya beragama mana pun. Tidak terelakkan lagi misalnya bahwa Islam berkaitan dengan proses budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Tumbuhlah berbagai eksperimen memodernkan Islam melalui institusionalisasi ajaran-ajarannya. Kajian mengenai Islam pun tampaknya sangat ganjil dan aneh jika dibagi berdasarkan cara Geertz melakukannya; abangan, santri, dan priyayi (Asad, 1993). Kendati demikian, penting untuk mengingat bahwa varian modern Islam juga sangat dipengaruhi oleh medan diskursus kajian agama pada masa-masa developmentalisme tahun 1970-an yang diawali oleh kelompok MIT di Indonesia.

Oleh karena itu menjadi demikian menarik upaya buku *Etika Muhammadiyah dan Spirit Peradaban* untuk memperlihatkan cara kerja diskursus dalam perkembangan gerakan sosial-keagamaan. Cara itu antara lain ditempuh dengan menunjukkan bagaimana gagasan Islam "kemadjoen" ala Ahmad Dahlan seolah-olah muncul kembali menemukan konteks simbolnya dalam perkembangan Muhammadiyah masa ini. Etika "Islam Berkemajuan" yang dipopulerkan beberapa tahun belakangan ini sebagai pemodelan dari "Islam Modern", "Islam Inklusif", dan "Islam Progresif" adalah tubuh dari diskursus yang lama terpelihara, dan memberi orientasi terus menerus bagi Muhammadiyah.

Etika Muhammadiyah: Dari Teologi ke Etos

Satu hal yang penting untuk dicatat dari buku *Etika Muhammadiyah dan Spirit Peradaban* terletak pada upayanya merumuskan apa sebenarnya etika Muhammadiyah itu. Tidak hanya jawaban, tapi juga pertanyaan tentang hal ini tampaknya luput begitu lama, terutama dalam konteks penyelidikan antropologis. Padahal sebagaimana terlihat dengan sangat jelas, suatu bentuk etika tengah beroperasi dalam cara Muhammadiyah berkembang.

Pertumbuhan amal usaha Muhammadiyah di berbagai tempat di Indonesia selain karena didorong oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan revolusi teknologi, juga berkaitan dengan kehadiran diskursus yang telah lama hidup dalam kesadaran beragama aktivis Muhammadiyah secara khusus dan masyarakat muslim secara umum. Bentuk-bentuk kesalehan sosial memperoleh petunjuk dari bangunan etika Muhammadiyah yang selalu mendorong pada partisipasi-partisipasi sosial. Jika dilacak secara historis maka etika "Kemadjoen" hidup dalam kesadaran beragama enterpreneur muslim, dan perlahan diterima sebagai kesadaran beragama mainstream karena perkembangan kapitalisme di Indonesia.

Basis etika "Kemadjoen" itu antara lain bersumber dari dua surat di dalam Al-Qur'an, surat al-Ma'un dan surat al-'Ashr. Surat al-Ma'un berisi perintah untuk berderma, memperluas jaminan sosial kaum miskin, dan relasi tak terhindarkan dari hubungan antara kesejahteraan dan probabilitas menjadi pribadi yang shaleh. Pesan surat al-Ma'un sangat penting bagi pedagang muslim un-

tuk membentuk solidaritasnya mengimbangi perdagangan kolonial, melalui penggunaan kapital yang terarah.

Kaum pedagang muslim awal abad ke-20 dihubungkan oleh diskursus tentang betapa pentingnya solidaritas berbasis agama untuk merespons dunia modern sebagai dampak globalisasi kolonial. Kaum pedagang muslim saat itu merupakan salah satu kelompok yang sadar bahwa modernisasi tak terhindarkan karena melihat sendiri sirkulasi perdagangan tanpa henti telah mengubah struktur sosial dan politik. Kaum pedagang muslim telah memungkinkan ilmu pengetahuan memperoleh perantaraan.

Kaum pedagang atau kelas menengah awal muslim di Indonesia ini adalah kelompok yang paling mungkin memperoleh pembaruan-pembaruan informasi tentang perkembangan Islam di berbagai tempat di Asia, Afrika, dan sebagian tempat di Eropa. Mereka mulai melakukan kerja-kerja literasi dengan menerbitkan buku dan mengadakan diskusi-diskusi, mendorong terciptanya jenis publik Islam modern (Casanova, 1994). Surat al-Ma'un hidup di dalam publik Islam modern yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dan beberapa muridnya. Melalui publik Islam modern (penerbitan majalah, konferensi nasional, korespondensi, dan khutbah-khutbah), gagasan-gagasan Islam dan perubahan sosial menjadi sangat mungkin berperan hingga saat ini.

Surat al-Ashr berbeda dengan Surat al-Ma'un yang menunjukkan konsekuensi kesejahteraan individu terhadap kesejahteraan sosial. Surat al-Ashr menunjukkan pentingnya kesadaran terhadap perkembangan zaman, dan respons atas perkembangan zaman sangat berhubungan dengan kualitas kesalehan. Surat

al-Ashr sebagai basis teologis dari etika Muhammadiyah tampil untuk memberi penekanan mengenai kesadaran zaman, di mana diskursus keagamaan tak terelakkan lagi harus menjadi bagian dari diskursus sosial baru yang terbentuk begitu cepat oleh intensi perdagangan, rezim Hindia-Belanda, dan bersatunya kaum pedagang-ulama-intelektual.

Artinya, surat al-Ashr menjadi penting bagi kelompok muslim yang berupaya untuk merespons perkembangan sosio-ekonomi abad ke-20. Ahmad Dahlan saat itu berhasil menjadikannya perbincangan publik melalui komunitas pengajiannya. Etika beragama dan kualitas kesalehan memperoleh makna baru melalui ruang publik Islam.

Konsep kunci ketika membicarakan soal ruang publik Islam modern adalah berubahnya Islam sebagai wacana keagamaan yang diatur oleh otoritas keagamaan, menjadi Islam sebagai wacana keseharian di mana setiap penganutnya diberi kesempatan untuk memperluas maknanya. Peran penting Ahmad Dahlan untuk perkembangan wacana Islam modern sebenarnya terletak pada kemampuannya menciptakan ruang publik Islam modern.

Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah menyelenggarakan penerbitan majalah yang hingga kini terus terbit, kemudian pertemuan rutin antar anggota Muhammadiyah, serta praktik kesalehan yang melembaga seperti mendirikan sekolah dan rumah sakit. Etika Muhammadiyah secara tidak langsung lahir dari kesempatan memperluas makna Islam di dunia yang terus berkembang.

Institusionalisasi Kesalehan dan Peradaban

Apa yang menghubungkan antara etika sebagai prinsip kesalehan sosial dan spirit peradaban sebagai doktrin sosial Muhammadiyah? Pertanyaan tersebut selama ini dijawab melalui keberhasilan agenda tajdid Muhammadiyah, suatu kondisi struktural dan sistemik yang memberi ilham bagi perkembangan gerakan (Darban & Pasha, 2000; Nashir, 2010; Mulkhan, 2010).

Jawaban atas pertanyaan penting ini jarang dieksplorasi sebagai kesadaran keberagamaan Islam modern yang telah menjadi bagian penting bagi infrastruktur pembangunan ekonomi Negara-negara berpenduduk muslim. Kuntowijoyo (1985) misalnya mengajukan jawaban bahwa integrasi antara iman sebagai kesalehan individual dan dorongan modernisasi (spirit peradaban) menjadi diskursus struktural Muhammadiyah.

Penekanan yang sangat tinggi terhadap peran struktural ini berusaha dijembatani oleh buku *Etika Muhammadiyah dan Spirit Berkemajuan* dengan memperlihatkan peranan diskursus dan peran keagenan dalam Muhammadiyah. Sehingga spirit peradaban dapat berperan sebagai doktrin sosial Muhammadiyah dan berhubungan langsung dengan perkembangan sosial di mana ide-ide tentang kedermawanan sosial modern sudah diterima sebagai manifestasi keagamaan. Selain itu, dengan meminjam Max Weber, praktik-praktik kesalehan tertentu telah mendukung berkembangnya infrastruktur ekonomi, menciptakan relasi tak terhindarkan antara keduanya.

Melalui buku ini kedua penulis berargumen bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan modern dapat bertahan sejak masa Kolonial melalui relasi timbal balik antara "Etika Muhammadiyah" (pelestarian diskursus; "Kemadjoen", Islam berkemajuan) dan "spirit peradaban" (arah perkembangan global, situasi ekonomi-politik, kemajuan ekonomi, perkembangan sains). Intinya, mengapa orang-orang Muhammadiyah berhasil melanjutkan tongkat estafet keorganisasian yang berusia seabad lebih ini, karena orang-orang Muhammadiyah menganggap bekerja adalah implementasi paling tepat untuk menghayati apa itu Islam. Perilaku fisik adalah kunci dari praktik keagamaan, tidak sekadar perilaku ritual (terdiri dari kewajiban agama individual; sholat, atau puasa).

Pemahaman ini ikut membantah dasar asumsi teorikus sosial tentang agama sebagai sekadar keyakinan yang dibuat-buat untuk merasionalisasikan praktik hidup yang ditentukan (misalnya Frazer dan Geertz). Agama juga tidak semata-mata membantu langgengnya kekuasaan dan industri sebagaimana dijelasan oleh Weber. Ada yang kurang dari penjelasan tentang agama dari Geertz dan Weber. Kenyataannya, agama yang dihayati sebagai bagian dari proses pelatihan diri atau yang diistilahkan dalam buku ini, sebagai pembentukan "etika Muhammadiyah" itu terjadi secara pedagogis.

Sebelum lebih jauh, ada baiknya juga dua istilah dalam buku ini saya jelaskan. *Pertama,* istilah etika itu mengacu pada nilai-nilai yang membentuk perilaku seseorang atau kelompok. Etika memberikan bahan acuan apakah suatu pilihan itu "baik" atau

"buruk". Dalam buku ini, istilah etika Muhammadiyah berarti nilai-nilai yang membentuk cara pandang, perilaku, dan imajinasi orang Muhammadiyah tentang bagaimana seharusnya Muhammadiyah merespons perkembangan zaman. *Kedua,* pengertian spirit peradaban berarti serangkaian nilai dan semangat bekerja orang Muhammadiyah membentuk peradaban.

Etika Muhammadiyah menurut buku ini dibentuk melalui dua basis teologis, yakni etos al-Ma'un dan etos al-Ashr. Kedua etos ini memberikan inspirasi bagaimana etika Muhammadiyah mengimplementasikan konsep-konsep "menjadi kelompok yang menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran" (al-Ma'un) dan "demi waktu" (al-Ashr). Etos al-Ma'un sebagaimana dijelaskan dalam buku ini, mengacu pada praktik "welas asih" (kasih sayang) atau filantropi. Sedangkan etos al-Ashr mendorong terbentuknya kesadaran waktu atau kesadaran untuk melibatkan diri dengan perkembangan zaman.

Etos al-Ma'un memberi fondasi bagi model asketisme atau kesalehan intelektual, sedangkan etos al-Ashr memberi fondasi bagi institusionalisasi kesalehan. Dalam praktiknya, etos al-Ma'un memberi inspirasi dalam cara berpikir orang Muhammadiyah mengenai praktik beragama yang menghubungkan antara praktik spiritual dan praktik sosial. Sedangkan al-Ashr memberi inspirasi orang Muhammadiyah dalam memberi wujud setiap praktik sosial itu ke dalam konteks zamannya masing-masing.

Spirit peradaban dalam buku ini dijelaskan melalui suatu konsep yang sudah dikenal lazim dalam menganalisis gerakan

sosial, yakni institusionalisasi (pelembagaan). Spirit peradaban berarti semacam *hidden transcript* dari mengapa orang Muhammadiyah mendirikan sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, dan meluaskan gerakannya ke berbagai bentuk. Melalui buku ini, kedua penulis hendak menyatakan bahwa gagasan Islam berkemajuan dalam konteks tertentu selalu berhasil menemukan bentuknya karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat muslim Indonesia.

Makna modern sebagai sifat gerakan Muhammadiyah tidak terletak pada cara organisasi ini mentransformasi institusi sosial tradisional menjadi modern, tetapi pada caranya hidup dari kelompok-kelompok muslim yang punya kemampuan mentransformasi kondisi sosial. Buku ini pada satu sisi turut berhasil memperlihatkan bagaimana potret kerja Muhammadiyah melalui aspek struktural dan agensi (keagenan).

Keberhasilan Muhammadiyah membangun kesalehan kolektifnya terletak pada kemampuannya memfasilitasi dan turut menjembatani berbagai perkembangan sosial dengan diskursus prinsip dan doktrin Islam. Ahmad Dahlan misalnya berhasil menghubungkan antara tauhid (ajaran Keesaan Tuhan) dan cara memanifestasikannya di dalam struktur sosial yang senantiasa berubah-ubah.

Buku *Etika Muhammadiyah dan Spirit Peradaban* secara sepintas tampaknya sangat dipengaruhi oleh pemodelan strukturasi ala Giddens (1984) di mana etika dan spirit peradaban adalah konsekuensi dari terbentuknya sarana-sarana pengungkapan diri anggota Muhammadiyah. Sarana-sarana pengungkapan Islam

"kemadjoen" sebagai tindakan sosial anggota Muhammadiyah terartikulasi melalui kedermawanan sosial dan tindakan sosial itu sendiri dalam konteks rekonstruksi wacana Islam.[]

DUA TEOLOGI MUHAMMADIYAH AL-MA'UN DAN AL-'ASHR

—Azaki Khoirudin

KYAI Dahlan adalah sosok ulama berkemajuan yang bervisi jauh ke depan melampaui zamannya. Ia mendobrak tradisi beragama dan kejumudan berpikir masyarakat. Ia ingin Islam yang murni, tetapi juga Islam yang modern *('ashr*). Islam yang membuka mata umatnya kepada jalan hidup untuk kemajuan. Bukan sekadar agama ritual yang tak memiliki makna keberpihakan kaum lemah dan visi pembangunan peradaban. Islam adalah agama kemajuan.

Di antara dua teologi yang sangat melegenda dan membekas di benak anggota Muhammadiyah teologi al-Ma'un dan teologi al-'Ashr. Dua gagasan besar yang meresap kuat dalam alam bawah sadar Muhammadiyah. Dua gagasan itulah yang melandasi visi dan misi gerakan Muhammadiyah hingga kini, yang sudah melewati usia dua abad. Dua surat pendek ini banyak mewarnai kisah sejarah proses Kyai Dahlan dalam mengajar al-Quran.

Buku *Teologi Al-Ashr: Etos dan ajaran KHA. Dahlan yang Terlupakan* yang saya tulis, betapa sejarah tidak pernah sekadar narasi, melainkan selalu melibatkan rekonstruksi, terhadap masa lalu dengan perspektif dan keterlibatan masa kini. Buku ini pada dasarnya ingin menghadirkan informasi tentang ajaran surat al-'Ashr Kyai Dahlan yang sepertinya belum banyak terungkap atau sudah banyak terlupakan, karena selama ini Kyai Dahlan lebih banyak dikenal dengan ajarannya terkait surat al-Ma'un.

Sayangnya, catatan ajaran tentang yang dilakukan Kyai Dahlan kurang seimbang. Teologi al-Ma'un lebih dikenal, bahkan oleh warga Muhammadiyah sendiri, tinimbang teologi al-'Ashr. Penggalian terhadap konsepsi Kyai Dahlan tentang al-Ma'un lebih banyak memperoleh perhatian daripada ajaran al-'Ashr. Padahal,

banyak kisah dan nilai-nilai penting yang dapat diperoleh dalam proses diseminasi nilai al-'Ashr yang dilakukan Kyai Dahlan. Sebut saja misalnya dengan mapannya Pengajian Wal-'Ashri, yang dalam catatan buku ini, dari sinilah kemudian lahir 'Aisyiyah. Tidak kalah menariknya, gerakan Wal-'Ashri mampu memberi semangat beramal shaleh secara finansial di anak muda saat itu, sehingga mampu membeli sebuah lapangan. Lalu lapangan tersebut kemudian diberi nama Lapangan Asri.

Gambaran kecil di atas hanyalah sedikit dari sekian banyak nilai yang diperoleh dari pengkajian terhadap gerakan Wal-'Ashri yang dilakukan Kyai Dahlan. Dan buku ini Azaki Khoirudin berhasil membingkai kembali catatan sejarah yang hampir belum banyak diketahui masyarakat. Sejatinya etos gerakan Muhammadiyah adalah dilandasi dengan teologi amal Saleh. Dalam prolog

buku ini Sukriyanto AR menegaskan sejatinya, al-Maun adalah kelanjutan dari ajaran al-'Ashr.

Bahkan teologi al-'Ashr, menurut buku ini, diajarkan lebih lama ketimbang teologi al-Ma'un. Jika Surat al-Ma'un diajarkan Kyai Dahlan selama tiga bulan, Surat al-'Ashr diajarkan tujuh hingga delapan bulan. Ini menandakan betapa teologi al-'Ashr memiliki nilai vital dalam beragama dan hidup sosial. Kehadiran buku ini dalam rangka meneguhkan ajaran Wal-'Ashri sebagai pilar besar rancang bangun peradaban Muhammadiyah. Buku ini sedikit memberikan *asupan gizi* bagi masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, tentang nilai-nilai dasar yang telah ditanam Kyai Dahlan dalam membangun peradaban.

Ahmad Norma-Permata memberikan ulasan menarik, bahwa teologi al-'Ashr memiliki logika terbalik dengan teologi al-Maun dalam membangun peradaban. Ajaran al-Ma'un yang mengidentikkan dimensi religius dan dimensi sosial—yaitu, kesalihan agama tidak substansial jika tidak dibarengi dengan kepedulian sosial. Sementara ajaran al-'Ashr terlihat menarik batas antara dimensi rohani (iman) dan dimensi sosial (amal salih). Bagi al-Ma'un kepedulian sosial merupakan kriteria bagi kesalihan agama, sedangkan bagi al-'Ashr dimensi agama dan dimensi sosial merupakan dua hal yang berbeda—meskipun tidak terpisah—yang masing-masing memiliki kriteria dan ukuran.

Dengan buku ini sedikit menjawab dari relatif minimnya buku dan hasil-hasil riset yang menggali tentang Muhammadiyah (dan Kyai Dahlan khususnya). Selain itu, posisi buku ini tidak melulu menceritakan sangat detail tentang teologi al-'Ashr, me-

lainkan lebih dari itu. Melalui buku ini, Azaki Khoirudin berhasil mengaitkan teologi al-'Ashr dengan konstruksi peradaban Islam berkemajuan ala Muhammadiyah.

Pada titik inilah buku ini menjadi bacaan menarik, yaitu untuk mendiskusikan konteks dan konsekuensi institusional dari dinamika pemikiran yang ada di Muhammadiyah, terutama perbandingan antara al-'Ashr dan al-Ma'un dalam memandang peradaban. Karena keduanya mewakili bukan hanya pandangan dunia yang berbeda melainkan memiliki konsekuensi institusional yang tidak sama. Akan terlihat bahwa al-Ma'un dan al-'Ashr bukanlah pilihan melainkan keniscayaan dalam perjalanan hidup warga Muhammadiyah.

Politik Ta'awun

Dalam buku Haedar Nashir yang berjudul, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, Haedar mengungkapkan betapa Muhammadiyah sungguh "kenyang" dengan hiruk pikuk dunia politik. Muhammadiyah merasakan betul betapa rumitnya bersentuhan dengan dunia politik.

Sekali melibatkan diri dalam pergumulan politik kekuasaan, ketika itu pula guncangan konflik di dalam maupun keluar akan terjadi, yang pada akhirnya membuat Muhammadiyah kehilangan kepribadian dan peran utamanya sebagai gerakan Islam yang menjalankan fungsi *dakwah* dan *tajdid* untuk menyebarkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamien* di muka bumi ini. Penjelasan Haedar menunjukkan pengalaman panjang Muhammadiyah bersentuh-

an dengan politik. Muhammadiyah semacam ada ketakutan terhadap bahaya politik kekuasaan.

Meskipun demikian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak sosiokeagamaan tidak boleh alergi terhadap politik. Wawasan keagamaannya justru harus menyatu dengan wawasan kekuasaan. Akan tetapi, yang perlu dijaga adalah dan bagaimana agar Muhammadiyah tidak terjebak oleh isu-isu politik praktis yang tidak menguntungkan. Berfikir strategis dalam rangka menatap masa depan yang agak jauh dari diri kita sekarang. (PP Muhammadiyah, *Islam dan Dakwah).*

Muhammadiyah adalah gerakan Islam Non-politik. Pelibatan politik di Muhammadiyah sangat dikhawatirkan, untuk tidak mengatakan ditakuti. Hal ini menjadikan Haedar sangat memegang teguh kepada khittah organisasi, sehingga ia menyatakan: "Khittah Muhammadiyah juga dapat dijadikan sebagai pagar pembatas agar naluri "primitif" (syahwat politik) perseorangan untuk berkiprah dalam perjuangan politik kekuasaan *(power struggle)* atau disebut "politik praktis" tidak menyeret-nyeret Muhammadiyah secara kelembagaan. Partai politik itu sebagaimana juga kekuasaan negara sangatlah penting dan strategis, termasuk untuk menegakkan dakwah Islam melalui tangan negara. Tetapi wilayah yang penting itu sengaja tidak dipilih oleh Muhammadiyah yang sejak kelahirannya telah memosisikan diri sebagai gerakan Islam nonpolitik dengan keyakinan bahwa dakwah di bidang pembangunan masyarakat pun tidak kalah penting dan strategisnya dengan perjuangan politik di jalur kekuasaan negara" (Haedar Nashir *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*).

Karena itu, membawa Muhammadiyah kepada satu pilihan politik, dalam hal ini memilih calon Presiden hanya akan membawa kepada *political game*. Dampaknya dapat menjatuhkan Muhammadiyah kepada *low politic* (politik rendah), dan bertentangan dengan konsep *high politic* (politik *adiluhung*) yang digagas oleh M. Amien Rais saat menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah. Sikap memperjelas pilihan politik warga Muhammadiyah kepada salah satu calon Presiden ini justru berlawanan dengan prinsip *high politic*.

High politic adalah politik *adiluhung,* politik luhur, politik nilai yang berdimensi moral etis, sedangkan *low politic* adalah segala cara meraih atau melanggengkan kekuasaan. Asumsi ini berdasar pada seringnya politik diasosisikan pada cara-cara meraih kekuasaan "menggunting dalam lipatan", sehingga politik menjadi rendah kehilangan nilai-nilai luhur. Padahal politik adalah seni berkompromi (*the art of compromises*), yang dalam bahasa Arab disebut *al-siyasah* yang bermakna positif.

Keberpihakan Haedar kepada khittah Muhammadiyah merupakan kebanggan tersendiri segenap warga Muhammadiyah. Gaya politik ini dapat disebut sebagai politik kebangsaan, *high politics* atau politik nilai.[]

KYAI MOECHTAR BOECHARI MENULIS TAFSIR SURAT AL-MA'UN

—Mohamad Ali

KETERTARIKAN Kyai Moechtar Boechari (1899-1926) pada Kyai Haji Ahmad Dahlan (1868-1923) bermula ketika mendengarkan tabligh pendiri Muhammadiyah yang berlangsung di Surakarta pada tahun 1917. Ketua panitia tabligh yang mendatangkan K.H Ahmad Dahlan itu adalah Mohammad Misbach (1876-1924), terkenal dengan sebutan Haji Merah. Setahun berikutnya, kepanitiaan ini dengan sedikit modifikasi dikukuhkan menjadi perkumpulan SATV (Sidik Amanah Tabligh V(F)athanah), suatu perkumpulan pra-Muhammadiyah.

Ketika mendatangi tabligh tersebut, Moechtar Boechari masih berstatus santri di pesantren Termas, Pacetan. Kebetulan sedang libur dan pulang kampung ke tanah kelahiran. Setelah mendengarkan tabligh, dia berubah haluan. Tidak berminat kembali ke pesantren Termas, tetapi memilih menjadi penggerak dan mubaligh SATV sambil memperdalam kemampuan bahasa Arab di Madrasah Arabiyah Islamiyah di Pasar Kliwon.

Sebagai seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan religius yang pekat, kampung Kauman, ditambah mengenyam Sekolah Ongko Loro di pagi hari dan belajar agama di madrasah Mambaul Ulum pada sore harinya. Setelah itu memasuki pesantren Termas dan Madrasah Arabiyah Islamiyah. Bekal ini telah cukup menjadikannya sebagai seorang mujtahid (pembaharu) yang mampu merumuskan pemahaman keislaman berdasarkan sumber pokok ajaran Islam, al-Quran dan as-Sunnah.

Persentuhan dengan gagasan-gagasan Islam berkemajuan K.H Ahmad Dahlan semakin memantangkan ide-idenya. Semenjak SATV berdiri tahun 1918, hampir setiap pekan pendiri Muhammadiyah itu mengisi kursus Islam di Solo, bertempat di rumah Sontohartono di Keprabon atau pun rumah Kyai Moechtar Boechari sendiri di Kauman. Ini artinya terjadi proses interaksi dan komunikasi yang intens antara poros Jojga dengan Solo.

Benih-benih reformasi Islam di Solo yang ditanam dan disirami langsung oleh pendiri Muhammadiyah ini menghadapi tantangan serius ketika ketua SATV, Haji Misbach pada tahun 1919 lengser dari kursi ketua dan memilih haluan politik dalam melawan penjajah Belanda. Mundurnya Misbach sedikit mengguncang perkumpulan SATV, terlebih dia sering menyerang dan mengkritik lantang SATV, karena tidak sudi terjun dan memasuki gelanggang politik.

Di tengah badai politik yang mengguncang, munculah figur Kyai Moechtar Boechari sebagai ketua SATV. Dia menjadi ketua SATV saat usia masing sangat belia, 20 tahun. Meski masih belia, tetapi dia sudah matang, sehingga mampu menahkodai perahu

SATV, dan pada tahun 1922 bertransformasi menjadi persyarikatan Muhammadiyah.

Kyai Moechtar Boechari bukan hanya seorang *leader* yang berhasil menahkodai SATV dan Muhammadiyah Solo awal, tetapi juga seorang guru tabligh yang sangat popular dan disegani. Dan lebih dari itu, dia seorang pemikir otentik plus penulis produktif. Ide-ideanya bukan hanya ditablighkan dan dipraktikan secara langsung melalui aksi sosial, tetapi juga dirumuskan secara sistematis melalui tulisan.

Nampaknya, keahlian terakhir inilah yang tidak banyak dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah. Lebih dari itu, yang justru menarik adalah tulisan-tulisannya mencerminkan gagasan--gagasan besar Islam berkemajuan yang sering disuarakan K.H. Ahmad Dahlan. Misalnya, secara historis dikenal "geger al-Maun", ternyata Kyai Moechtar Boechari menulis *Tafsir Surat al-Maun* yang di muat pada majalah *Sinar Islam* terbitan Muhammadiyah Solo, tahun 1934.

Selain itu, Kyai Moechtar Boechari juga menulis buku *Tasawuf Tjekaan* yang mencerminkan pandangan Muhammadiyah atas tasawuf yang menekankan pada pembentukan kepribadian/ahklak. Karya-karya yang lain adalah *Piwoelang Islam, Pitoetoer Islam, Perbandingan Agama,* dan sebuah novel berjudul *Moeslimah* yang berisi pandangan seorang modernis terhadap persoalan etia menuntut ilmu, ilmu pengetahuan, peradaban, sejarah Islam, kesetaraan gender, gerakan pembaharuan Muhammadiyah.

Tulisan-tulisan yang telah berumur seabad itu merupakan warisan intelektual yang sangat berharga. Sejak satu dekade lalu

telah muncul kesadaran di kalangan generasi muda Muhammadiyah Solo untuk mengumpulkan kembali dokumen-dokuman yang berserakan, dan alhamdulilah beberapa bisa dilacak, salah satunya adalah karya-karya Kyai Mochtar Boechari.

Menyimak rekam jejak sejarah dan membaca karya-karyanya,tidak berlebih bila dikatakan bahwa sosok Kyai Moechtar Boechari merupakan bayangan dari K.H Ahmad Dahlan yang memantul di tepi sungai bengawan Solo. Tulisan-tulisan sangat brilian dengan ilustrasi yang canggih. Ketika dikritik bahwa berdirinya Muhammadiyah menyebabkan pertikatian di kalangan umat. Dengan dingin ia mengilustrasikannya sebagaimana pertemanan gigi dan lidah yang harus terus bergerak bergerak mengunyah. Hanya saja, sesekali lidah kegigit, tapi itu tidak mengurangi kebersamaan. (Sumber: islamberkemajuan.id).[]

KH. ENOH SUHERMAN

Pejuang Teologi Al-Ma'un di Kabupaten Cianjur

—Sahrul Hidayat

KECAMATAN sukaluyu, adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur, dengan jarak hanya 9 kilometer dari pusat Kabupaten Cianjur. Kecamatan Sukaluyu terasa begitu terpencil, perjalanan yang sesungguhnya bisa ditempuh dalam waktu 40 menit dari pusat kabupaten menggunakan roda empat, menjadi hampir dua jam karena akses jalan yang sangat buruk. Tapi siapa sangka, di lokasi ini ada seorang tokoh yang sangat berjasa dalam bidang pendidikan.

Di usia yang telah senja, KH. Enoh Suherman, BA, tampak sedang terduduk di masjid kompleks pendidikan sekolah Muhammadiyah sambil menunggu kumandang adzan dzuhur. Siapa sangka, sosok tua inilah yang berperan besar dalam memajukan pendidikan di kampung yang ia rintis bersama keluarganya.

Sambil merangkai kembali ingatannya, dengan fasih ia menceritakan bagaimana semuanya dulu dimulai. Pria kelahiran Garut 75 Tahun silam yang juga mantan ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Cianjur ini, adalah saksi hidup perjuangan di era Orde Baru dan Orde Lama di bidang pendidikan. Pahit-getirnya telah ia rasakan, terlihat dari garis wajahnya yang menua seolah menceritakan apa yang telah ia lalui.

Semua berawal ketika tahun 1967, ketia ia diajak kakaknya yang berada di Bandung untuk ikut mengisi pengajian di salah satu desa di Cianjur. Selesai acara, ia dan kakaknya datang mengunjungi pamannya yang tinggal di Cianjur yang berada di kampung Bojongsari Kecamatan Sukaluyu. Sampai di lokasi tempat tinggal pamannya, di sana ia terkejut melihat angka anak muda yang buta huruf masih sangat tinggi, mayoritas anak berusia 14-16 tahun termasuk anak-anak pamannya.

Melihat itu, ada dorongan dari rasa kemanusiaan, sosial serta jiwanya sebagai seorang aktivis yang telah ditempa di Bandung. Selain itu, banyak permintaan warga untuk membukakan sekolah. Dorongan itu juga muncul dari spirit teologi *surah Al-Maun*. Ia pun mulai mengumpulkan warga dan mencari jalan keluar untuk menghadapi permintaan itu.

Sebagai salah saorang pemuda yang lahir dari rahim Muhammadiyah serta sebagai aktivis pemuda Muhammadiyah periode 65, tentu Enoh sangat memahami teologi *Al-Maun* sebagai teologi utama yang menumbuh-kembangkan Muhammadiyah. Teologi yang di dasarkan pada Al-Qur'an ini sering di terjemah-

kan kedalam tiga pilar kerja, yaitu *healing, schooling and feeding* (Tuhuleley, 2003).

Bentuk refleksi enoh dalam memahami teologi *Al-Maun* ini adalah dengan keputusannya untuk hijrah dan menetap di Desa Bojongsari untuk berjihad di bidang pendidikan, sesuai dengan disiplin ilmunya. Meskipun ia sudah menyandang status PNS Departemen Agama, tapi ia rela berhijrah ke tempat baru untuk berdakwah di bidang pendidikan.

Strategi Enoh sangat sesuai dengan apa yang ditulis Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Najib Hamidi, dalam bukunya yang berjudul Muhammadiyah Era Milenial. Najib menjelaskan tentang hijrah dan dakwah kultular. Menurut Najib, bahwa spirit gerakan Muhammadiyah adalah perubahan, yang sejalan dengan watak *muhajirin* atau perantau, yang dituntut untuk kerja keras dan serius demi perubahan. Tidak diragukan lagi, strategi hijrah terbukti manjur untuk pembangunan dakwah dan membangun bangsa. Strategi ini pula yang Enoh pakai sehingga dapat membangun desa ini.

Enoh adalah lulusan pendidikan tinggi Islam Bandung, atau yang sekarang lebih di kenal dengan Universitas Islam Bandung (Unisba). Setelah memutuskan berhijrah dan mempersunting perempuan asli Bojongsari, Enoh pun mulai fokus dengan apa yang warga cita-citakan. Berbekal relasinya yang seorang PNS Depag (Departemen Agama), dan dengan kemauan yang kuat serta semangat teologi *Al-Ma'un*, Enoh pun mendatangi Depag Kab. Cianjur. Di sana ia membicarakan ihwal keinginan warga Bojongsari agar memiliki akses pendidikan di sekitaran lingkungannya. Atas

seizin Allah, akhirnya di tahun 1969 berdirilah MI Darul Arqam Sukaluyu di bawah bimbingan Depag Kab. Cianjur.

Perjalanannya belum selesai sampai di sini. Muncul permasalahan baru setelah sekolah ini berdiri; yaitu tanah yang dipakai dalam mendirikan bangunan sekolah digugat oleh ahli waris yang memiliki tanah itu. Dengan sabar dan kepala dingin akhirnya pertolongan Allah pun datang kembali. Mertuanya yang memiliki beberapa petak sawah mewakafkan sawahnya itu untuk dibangun menjadi lokasi baru gedung sekolah. Lokasi inilah yang sampai sekarang berdiri kokoh. Di sana berdiri bangunan sekolah MI Darul Arqam, SMP Muhammadiyah Sukaluyu serta sebuah Masjid yang menjadi pusat peribadatan.

Hari ini, 49 tahun telah berlalu, Enoh bisa tersenyum melihat pohon yang ia tanam telah berbuah dan bisa dinikmati warga Bojongsari Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, Jawa Barat. Ia bisa bahagia melihat anak-anak yang setiap pagi tidak perlu jauh untuk berangkat sekolah dan melihat masjid yang selalu penuh oleh anak-anak dan warga sekitar ketika waktu adzan berkumandang. Semangat KH. Enoh Suhermah, BA, bisa kita teladani dalam ber-*taawun* untuk negeri yang sudah ia praktikkan saat masih muda, juga dalam berhijrah, berdakwah serta berjihad dalam bidang pendidikan. Ia tidak ragu meninggalkan kampung halamannya di Garut, serta meninggalkan kesempatan untuk berkarir di Bandung, di mana ia berproses. Karena, ia meyakini bahwa ia lebih dibutuhkan dan lebih bermanfaat di tempatnya berhijrah saat ini. (Sumber: islamberkemajuan.id).[]

MUHAMMADIYAH DAN TAJDID PERADABAN

—Muhbib Abdul Wahab

PADA 18 November 2018 ini Muhammadiyah genap berusia 106 tahun. Secara psikologis, usia tersebut tergolong sangat matang dan dewasa karena telah melampaui satu abad lebih dalam berdedikasi untuk negeri sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar yang bervisi tajdid (pembaruan, reformasi) menuju Islam berkemajuan di Indonesia tercinta.

Memasuki 100 tahun kedua, Muhammadiyah dinilai sebagai organisasi sosial keagamaan paling konsisten dengan khitahnya, paling tertib administrasinya dan paling akuntabel manajemennya.

Dengan mengusung tema milad "Ta'awun untuk Negeri", Muhammadiyah terus menyinari dan mencerahkan negeri.Tema "Taíawun " (saling menolong, berkolaborasi, berbagi, dan bergotong-royong) mengisyaratkan bahwa Muhammadiyah senantiasa istikamah mengepakkan "sayap dakwah pencerahan dan jihad

keumatannya" secara lebih luas dan lebih strategis dengan lima keunggulan amal usahanya: pendidikan, kesehatan, pelayanan dan kesejahteraan sosial, pemikiran keagamaan yang moderat, dan jihad konstitusinya yang sangat prorakyat.

Ikhlas Berkhidmat

Kemandirian merupakan salah satu kunci soliditas pimpinan, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah sehingga memiliki mental baja dalam mengembangkan amal usaha, tanpa harus bergantung kepada pihak lain, dan tidak juga menjadikan jabatan pada birokrasi pemerintah sebagai "ATM" persyarikatan. Ketekunan pimpinan dalam mengurus amal usaha menjadikan terus berkembang dan berkemajuan. Sekadar contoh dari buah ketekunan, sejak 1915, Muhammadiyah telah merintis penerbitan majalah Suara Muhammadiyah, dan hingga sekarang tetap terbit bahkan semakin maju, sehingga majalah ini meraih rekor Muri sebagai majalah Islam yang terbit berkesinambungan terlama (103 tahun).

Di era milenial ini kita dihadapkan pada tantangan globalisasi, teknologi informasi, dan komunikasi yang semakin kompleks dan menuntut reaktualisasi tajdid (pembaruan) peradaban. Dalam forum Muktamar ke 47 di Makassar, Agustus 2015 lalu, Muhammadiyah telah menghasilkan 13 butir rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh PP Muhammadiyah periode 2015-2020.

Salah satu dari 13 rekomendasi itu adalah membangun masyarakat dengan ilmu. Muhammadiyah menilai budaya ilmu di Indonesia masih rendah dan menjadi masalah serius

bagi bangsa. Kelemahan dari budaya keilmuan juga menyebabkan sebagian warga bangsa sering bertindak tidak rasional, bahkan terkadang berperilaku tidak sesuai dengan akal sehat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu membangun keunggulan dengan mengembangkan masyarakat ilmu melalui pengembangan budaya literasi, gerakan membaca, meneliti, menulis, berpikir rasional, bertindak strategis, bekerja efisien, dan menggunakan teknologi untuk tujuan kemaslahatan, keadaban perilaku, dan aneka kinerja produktif dan konstruktif.

Selain itu, Muktamar Muhammadiyah juga merekomendasikan pentingnya peningkatan daya saing umat Islam. Indonesia selama ini dianggap sebagai negara Islam terbesar di dunia. Namun, eksistensinya belum mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara di dunia internasional. Bahkan, sikap minder dengan negara lain pun kerap muncul. Muslim di Indonesia itu seolah majority *with minority mentality* atau *inferiority complex*. Akibatnya, umat ini gampang terpengaruh oleh aneka budaya negatif dan destruktif dari luar. Dua kata kunci rekomendasi tersebut, yaitu masyarakat ilmu dan peningkatan daya saing umat Islam Indonesia mengharuskan reaktualisasi tajdid peradaban era milenial ini.

Aktualisasi Tajdid Peradaban

Islam berkemajuan yang dicita-citakan oleh pendiri Muhammadiyah perlu diperkokoh setidaknya dengan tiga landasan dalam rangka aktualisasi tajdid peradaban ke depan. Pertama, peneguhan "teologi al-Ma'un". Teologi al-Ma'un merupakan lan-

dasan berpikir, bergerak, dan bertindak yang diajarkan KH Ahmad Dahlan dalam memahami dan aktualisasi Islam sebagai agama dan peradaban. Praksis dari teologi al-Ma'un yang diteladankan Ahmad Dahlan ini tidak saja menginspirasi dan memotivasi warga persyarikatan, karena Islam yang diperkenalkan bukan sekadar Islam wacana, melainkan Islam rahmatan lil 'alamin yang membumi secara nyata dan berdaya guna.

Kedua, revitalisasi teologi wal 'ashri–karena Ahmad Dahlan sering juga mengajarkan substansi surat al-'Ashr–menghendaki Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid mampu memadukan gerakan pemikiran sekaligus gerakan peradaban yang bervisi *rahmatan li al-'alamin* dalam konteks zamannya. Tajdid peradaban yang harus dikembangkan Muhammadiyah bukan hanya untuk melayani dan memajukan umat Islam, tetapi juga memajukan bangsa, membela NKRI, dan membumikan konsep *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negeri yang *gemah ripah loh jinawi, toto tenterem*, adil makmur, dan mendapat lindungan ampunan Tuhan) dalam rumah besar NKRI.

Ketiga, tajdid peradaban Muhammadiyah harus dimulai dengan paradigma berpikir holistik integratif dalam memahami, memaknai dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan kebangsaan dan keumatan. Karena itu, ayat-ayat Qur'aniyyah harus dipadukan dan diimplementasikan secara proporsional dengan ayat-ayat kawniyyah dan ijtima'iyyah (alam dan sosial) dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi, visi peradaban Islam yang dikembangkan Muhammadiyah harus dapat ditransformasikan menuju Indonesia berkemajuan. Oleh karena

itu, gerakan pemikiran dan peradaban (membangun budaya literasi, gerakan ide, pengembangan ilmu, riset, dan pendidikan) harus dibarengi dan dipadukan dengan gerakan amal sosial melalui pemberdayaan institusi (pendidikan, sosial, budaya, politik) yang efektif dan dinamis.

Aktualisasi tajdid peradaban Muhammadiyah juga meniscayakan pentingnya reformasi sistem pendidikan dari yang bersifat dikotomik-parsial menuju sistem pendidikan holistik intergatif dengan visi profetik. Oleh sebab itu, kualitas sistem pendidikan Muhammadiyah dari TK hingga Perguruan Tinggi harus dikembangkan dan ditingkatkan agar mampu berkontribusi lebih progresif bagi pengembangan wawasan kebangsaan, kedaulatan, dan keadilan sosial.

Islam dan Indonesia berkemajuan sejatinya merupakan sebuah keniscayaan, apabila Muhammadiyah mampu mengisi ruang kebinekaan gagasan, pemikiran, dan aksi-aksi peradaban Indonesiawi yang Islami. Pemaknaan NKRI sebagai dar al-ahdi wa as-syahadah (negeri perjanjian dan pembuktian) mengharuskan Muhammadiyah secara proaktif dan progresif menjadikan dirinya sebagai kekuatan peradaban bangsa dalam membangun kedaulatan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Dengan visi tajdid peradaban Indonesiawi yang Islami, Muhammadiyah ke depan diharapkan mampu berkontribusi positif melalui aneka gerakan tajdid-nya dalam mengawal tegaknya kedaulatan hukum, politik, ekonomi, energi, pangan, budaya, dan kelautan. Dengan jihad konstitusinya yang berulang kali terbukti mampu mengkritisi dan memenangi judicial review di Mahka-

mah Konstitusi, Muhammadiyah tentu sangat diandalkan untuk mengakselerasi penegakan hukum yang berkeadilan, mengkritisi, dan menasihati aparat penegak hukum agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, tidak membela yang bayar tapi mengabaikan yang benar.

Dalam *al-Akhlaq wa al-Qiyam fi al-Hadharah al-Islamiyyah* (Moral dan Nilai-nilai dalam Peradaban Islam), Raghib as-Sirjani (2016) menegaskan bahwa pilar kemajuan peradaban adalah tegaknya keadilan multidimensi (hukum, ekonomi, sosial politik, pendidikan, budaya), silaturahmi (kekeluargaan, kebangsaan, dan kemanusiaan), kasih sayang, solidaritas dan soliditas sosial, keharmonisan kehidupan keluarga bangsa, dan kepemimpinan (keluarga, sosial, politik, dan pemerintahan) yang kuat, berintegritas, berbudaya positif, dan melayani rakyatnya sepenuh jiwa dan raganya.

Dalam konteks ini, Muhammadiyah perlu hadir dengan menyiapkan madrasah kepemimpinan bangsa, sebagaimana madrasah antikorupsi, sehingga ke depan mampu menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bervisi membangun peradaban Indonesia berkemajuan dan berkeadilan sosial (Sumber: *Seputar Indonesia*, 17/11/2018).[]

ETOS SOSIAL LANDASAN MUHAMMADIYAH

Refleksi Milad ke-106

—Fitrah

ETOS, menurut pengertian sosiologis tertentu, adalah "sekumpulan ciri-ciri budaya, yang dengannya suatu kelompok membedakan dirinya dan menunjukkan jati dirinya yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain". Definisi lain menyebutkannya sebagai "sikap dasar seseorang atau kelompok orang dalam melakukan kegiatan tertentu". Etos dapat dimiliki oleh seseorang, tetapi bisa pula merupakan ciri suatu kelompok masyarakat tertentu.

Etos sosial dapat bersumber dari nilai-nilai agama yang diyakini, dihayati, dan di amalkan. Tapi etos sosial dapat pula berkembang dari hasil pemikiran dan perbincangan publik dan lambat laun, melalui proses yang mungkin cukup panjang. Akhirnya diterima oleh suatu kelompok masyarakat luas. Etos sosial tidak sekadar pengakuan akan nilai-nilai, melainkan benar-benar diyakini dan diamalkan secara konsekuen sehingga menimbulkan

dampak sosial tertentu yang di asosisiakan dengan seseorang dan kelompok masyarakat.

Etos sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat atau seseorang, bisa pula terjadi melalui suatu proses panjang yang dipengaruhi oleh kondisi alam tertentu. Etos kerja bisa berbeda-beda antara orang-orang di masyarakat pantai dengan di pedalaman atau di pegunungan antara di daerah kering dan kurang subur dengan di daerah subur, antara masyarakat tropis yang memiliki dua musim dan empat musim (Dawam Raharjo *Intelektual, Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa*, Hal. 390-391).

Max Scheler memahami ethos sebagai kesatuan nilai-nilai yang paling menonjol yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok tertentu, terutama dalam hal bertindak dan berperilaku. Ethos bangsa-bangsa di dunia menunjukkan perbedaan-perbedaan pewujudan dan penghargaan nilai-nilai yang jelas, yang dipengaruhi oleh sejarah, wilayah dan lingkungan hidup manusia masing-masing bangsa itu (Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000, Penyunting EM.K.Kaswardi, 1993).

Etos memiliki kesamaan dengan sikap moral, walaupun tidak seluruhnya identik. Kesamaan terletak dalam sikap yang keduanya didasari sifat mutlak. Perbedaannya terletak pada tekanan, sikap moral menegaskan orientasi pada norma-norma sebagai standar yang harus di ikuti. Sedangkan etos menegaskan bahwa sikap itu sesuatu yang nyata-nyata memengaruhi, menentukan individu atau kelompok orang yang mendekati atau melakukan sesuatu. Etos mengungkapkan semangat dan sikap batin pada seseorang atau sekelompok orang yang di dalamnya termuat

tekanan dan nilai moral tertentu. Etos merupakan sesuatu yang dimiliki atau tidak dimiliki dan yang tidak dapat dipaksa. Etos merupakan deskriptif tentang sikap mental yang ada (Franz Magnis Suseno, Berfilsafat dari Konteks).

Dapat disimpulkan bahwa, ttos adalah suatu sikap, pandangan khas, semangat yang mencirikan identitas atau eksistensi suatu kelompok dan negara yang membedakan kelompok dan negara lainnya. Etos adalah suatu norma atau ukurannya kelompok masyarakat yang sudah menjadi norma hidup dalam berperilaku, berintersksi, dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari di masyarakat. Tentunya, keberadaan suatu Etos di masyarakat diibaratkan dua sisi mata uang.

Etos dapat memberikan nilai positif seperti kerja keras, bersemangat, musyawarah, toleransi, gotong-royong, dan persaudaraan,dan lain-lain. Yang bisa memberikan semangat perjuangan untuk mencapai kebaikan, keharmonisan, dan kesuksesan hidup di masa depan. Akan tetapi, di sisi yang lain.

Etos dapat berdampak negatif seperti, korupsi, narkoba, pergaulan bebas, pornografi/pornoaksi, premanis, konflik kepentingan (kekuasaan),dan lain-lain yang dapat merusak atau meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di masa kini maupun di masa depan.

Muhammadiyah sebagai gerakan sosial *(social movement)* maksudnya adalah segala upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang (islam) dalam rangka menegakkan ajaran-ajaran Islam.

Dalam konteks sosial, Muhammadiyah telah dan akan terus memberikan kontribusi dalam segala bidang politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan agama kepada bangsa dan hal ini telah dilakukan oleh Muhammadiyah sejak Muhammadiyah didirikan hingga saat ini. Misi Muhammadiyah dalam bidang sosial diarahkan kepada terwujudnya manusia indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia global. Dalam mewujudkan gerakan sosial tersebut, Muhammadiyah mendorong etos kerja dan amanah bagi semua pengemban amal usaha Muhammadiyah.

Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan, selama ini Muhammadiyah telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat untuk pembinaan individu maupun sosial masyarakat islam di indonesia, dan juga Muhammadiyah tidak hanya melaksanakan dakwah kultural dan sosial di masyarakat tetapi juga melakukan perkaderan yang berjenjang di setiap ortom-ortomnya seperti IMM, HW, KOKAM, Pemuda Muhammadiyah, dan lain-lain. untuk menguatkan struktur organisasi dan menyiapkan kader-kader yang dapat melanjutkan ideologi dan tujuan Muhammadiyah itu di masa depan.

Muhammadiyah terus berupaya membangun dan membentuk karakter-karakter individu, kelompok masyarakat yang berkualitas sesuai dengan karakter, etika, dan akhlak islam. Gerakan Muhammadiyah telah melahirkan kebudayaan yang berbeda, memengaruhi kultur, paradigma dan etos kebudayaan.

Sebagaimana dalam kerangka etos merupakan pandangan dasar yang berbeda dari suatu komunitas atau masyarakat yang mencerminkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut, Haedar

Nashir bahwa Muhammadiyah dengan gerakannya memiliki dua etos yaitu; Pertama, etos keilmuan (kemajuan), Merupakan gerakan Muhammadiyah dalam mengatasi kemunduran dan kelesuan umat dalam bidang ilmu dan teknologi yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Semangat keilmuan ini dilihat dari penerapan dan penggabungan dua lembaga pendidikan yang aling bertentangan, antara pendidikan yang tradisionalis dan pendidikan modern yang bersifat sekuler (Abdul Munir Mulkhan, *Kesalehan Multikultural*).

Kedua, etos pembaharu (tajdid), Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu merupakan sikap setelah mengetahui dan bagaimana cara merespons realitas. Tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah merupakan hasil dialektika antara teks, konteks, dan kontektualisasi dari pemahaman keagamaan (Bahrus Suhur Iyunk, *Teologis Amal saleh*, dalam Abdul Halim Sani, Hal.137-138).

Kedua etos yang telah dimiliki oleh muhammadiyah tidak dapat dipisahkan karena sebagai gerakan yang berkemajuan dan pembaharu, muhammadiyah bersikap terbuka dan melakukan emansipatoris terhadap masyarakat melalui amal. Etos dalam muhammadiyah telah menjadi kebudayaan yang menciptakan tetanan masyarakat yang berilmu terbuka, toleran dan inklusif dalam menerima setiap perbedaan dan kemajuan zaman.

Dengan demikian, Ethos adalah sekumpulan ciri-ciri budaya, yang dengannya suatu kelompok membedakan dirinya dan menunjukan jati dirinya yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain, atau sikap dasar seseorang/individu atau kelompok orang dalam melakukan kegiatan tertentu. Etos suatu nilai, pandangan

khas, dan semangat yang dimiliki oleh setiap individu dan kelompok organisasi dalam berinteraksi untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Sumber: *Geotimes,* 19/11/2018).[]

2

TA'AWUN KEINDONESIAAN

TA'AWUN UNTUK NEGERI

Konteks Keindonesiaan

—Abdul Mu'ti

AHAD, 18 November 2018, Muhammadiyah merayakan Milad ke 106 di Pura Mangkunegaran, Surakarta dengan tema Taawun untuk Negeri. Tema ini menegaskan komitmen, tanggung jawab, dan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, kemanusiaan, dan keindonesiaan.

Al-Ma'un Abad Kedua

Taawun adalah satu ajaran dasar dan akhlak Islam. *"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...* (Qs. 5, al-Maidah: 2). Ibnu Huwaiz, sebagaimana dikutip al-Qurthubi di dalam tafsirnya, menjelaskan *taawun ala al-bir wa al-taqwa* adalah akhlak Islam di mana seorang Muslim saling memberi dan memperkuat sesuai kemampuannya. Orang berilmu menolong dengan ilmu serta mengamalkannya. Mereka yang berhar-

ta membantu dengan kekayaannya. Orang yang kuat *(syajaah)* melindungi dan memperkuat (perjuangan) di jalan Allah. *Taawun ala al-itsmi wa al-udwan* berarti saling membantu dalam berbuat maksiat *(al-itsm)* serta melanggar perintah agama dan perintah Allah untuk berbuat baik kepada manusia *(al-udwan). Taawun* mengandung pengertian luas, tidak terbatas ketika terjadi musibah.

Sejak kelahirannya, selain reformasi pendidikan, Muhammadiyah menunjukkan jati dirinya sebagai gerakan sosial-kemanusiaan. Berdasar Surat al-Maun (Qs. 104), Kyai Dahlan menanamkan jiwa kedermawanan. Sebagaimana disebutkan Syuja (2009), salah seorang muridnya, Kyai Dahlan berulangkali mengajarkan Surat al-Maun tidak sebatas pemahaman kognitif dan verbal-ritual tetapi gerakan amal. Muhammadiyah adalah perintis filantropi Islam yang tidak sekadar menghimpun sedekah dan membagikannya sebagai *charity* yang karikatif. Melalui bidang Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), Muhammadiyah merintis pembangunan panti asuhan, rumah singgah, dan gagasan mendirikan rumah sakit melalui dana yang dihimpun dari anggota dan para dermawan. Kedermawanan telah menjadi "DNA" Muhammadiyah.

Pada abad kedua, Muhammadiyah berkembang menjadi gerakan filantropi Islam yang terkemuka. Melalui LazisMu dan *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC), Muhammadiyah hadir di tengah-tengah masyarakat yang tertimpa musibah. Para relawan Muhammadiyah dari semua unsur melayani dengan sepenuh hati para korban, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara. Bendera Muhammadiyah berkibar

di Palestina, Filipina, dan Bangladesh, mendampingi pengungsi Rohingnya.

Salah satu keberhasilan Muhammadiyah adalah kemampuannya memelihara nilai-nilai filantropi. Muhammadiyah terus mengembangkan filantropi dengan tiga prinsip: *meaning, doing,* dan *sustaining*. Filantropi dibangun di atas fondasi dan spirit Alquran. Praksis filantropi dilaksanakan dengan dengan pelayanan yang tulus dan manajemen yang profesional. Selain itu, sumbangan yang diberikan bersifat pemberdayaan: *fresh mind* (menyegarkan pola pikir), *fresh money* (bantuan yang dirasakan langsung manfaatnya), dan *access for change* (advokasi, pendampingan, dan membuka kesempatan). Sedekah tidak semata proses *giving change* (donasi recehan), tetapi *giving chance* (membuka peluang). Paradigma bantuan bukan karena belas kasihan, tetapi cinta kasih kepada sesama. Itulah hakikat filantropi sebagai transformasi nilai-nilai *qurani.*

Di antara karakter Muhammadiyah adalah suka bekerja sama. Amien Rais, dalam buku *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan Sosial* (1998), menyebutkan lima doktrin yang merupakan nilai ajaran dan kepribadian Muhammadiyah. Salah satu di antara doktrin tersebut adalah "suka bekerja sama". Menurut Amien Rais, Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan Siapa pun, kecuali dengan iblis dan setan. Demikianlah, Muhammadiyah tetap tegak berdiri karena kemampuan, keluasan, dan keluwesan gerakannya. Dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan, Muhammadiyah bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan Islam seperti *Asian Muslim Charity Foundation* (AMCF) dan *Muslim*

Aid. Dengan lembaga Kristen dan Katolik, Muhammadiyah bermitra dengan Katolik seperti *Catholic Relief, Saint Egidio, Save the Children*, dan sebagainya. Dengan Agama Budha Muhammadiyah bekerja sama dengan International *Network of Engaged Budhism* (INEB).

Ta'awun Keindonesiaan

Dalam konteks Indonesia, *taawun* berarti gotong royong, sebuah tradisi kebersamaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Masyarakat Jawa, mengenal istilah *"sambatan"*. Secara bahasa, *sambat* berarti mengeluh atau mengaduh karena beratnya beban jiwa. Dalam kebudayaan Jawa, *sambatan* adalah kegiatan sosial di mana semua warga bahu membahu membantu sanak sauda-

ra yang sedang dalam kesulitan atau hajat besar. Sesama warga saling membantu, tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan materi. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin individualistis, egois, pragmatis, dan materialistis, semangat dan jiwa gotong royong semakin rapuh dan luruh. Di beberapa tempat bahkan sudah punah.

Gotong royong mengandung nilai-nilai saling menghormati, berbagi, dan toleransi. Yang seringkali terjadi justru sebaliknya. Masyarakat semakin mudah tersinggung. Alih-alih membantu, masyarakat justru semakin banyak menuntut hak, privasi, dan *privilege* di ranah pribadi, bahkan di ruang publik. Ironisnya, badai demoralisasi itu kadang terjadi di tengah bencana badai yang meluluhlantakkan bangunan-bangunan perkasa. Susah menjelaskan dengan logika, bagaimana ada pihak-pihak yang tega

mengorupsi bantuan bencana atau mengeruk keuntungan di tengah penderitaan. Hati nurani mereka sungguh telah mati.

Banyak sekali *local wisdom* yang perlu dihidupkan kembali. "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing", "duduk sama rendah, berdiri sama tinggi", "cepat kaki, ringan tangan" dan peri bahasa lain yang menggambarkan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat nusantara sudah hilang dalam memori generasi (muda) bangsa. Banyaknya kekerasan, konflik, dan berbagai masalah sosial terjadi karena lemahnya semangat *taawun*. *Dzikir* spiritual dalam laku ibadah semakin mewah dan bergairah. Sebaliknya, *dzikir* sosial dalam wujud kebersamaan, kesederhanaan, tenggang rasa, tepa selira dan perilaku utama lainnya semakin langka.

Taawun untuk negeri adalah sebuah gerakan moral, *akhlaq al-karimah* yang *maslahah*. *Taawun* tidak terbatas pada saat terjadi musibah, tetapi amal salih yang dilaksanakan dengan *istiqamah* untuk menyelesaikan masalah dan menghilangkan *musykilah* (kesulitan) dan *masyaqqah* (penderitaan). Selamat Milad Muhammadiyah, teruslah ber-taawun untuk negeri agar mendapat ridha Ilahi. (Sumber: *Republika,* 19/11/2018).[]

TA'AWUN *DARUL AHDI WASY-SYAHADAH*

—Azaki Khoirudin

MILAD Muhammadiyah ke-106 memilih tema "Ta'awun untuk Negeri". Tema ini mengandung komitmen nasionalisme Muhammadiyah. Kata ta'awun secara substansi terkandung makna gotong-royong, solidaritas, kebersamaan, dan kerukunan yang menjadi nilai-nilai utama dalam merajut keindonesiaan. Haedar Nashir menyatakan: "Muhammadiyah ingin menggelorakan semangat tolong menolong, kerja sama, dan membangun kebersamaan di tubuh umat dan bangsa agar Indonesia negeri tercinta ini menjadi negeri yang *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*" (18/11/2018).

Adalah fakta sejarah, Muhammadiyah tidak hanya ikut merajut dan melahirkan bangsa Indonesia, melainkan melahirkan dan membangun Indonesia. Muhammadiyah terbukti memelopori nasionalisme Indonesia dengan melahirkan kaum terdidik melalui pendidikan sebagai proses pencerdasan menuju kemerdekaan.

Para pendiri bangsa dan pahlawan nasional adalah tokoh-tokoh yang terlahir dari Rahim Muhammadiyah seperti KH Ahmad Dahlan, Nyai Walidah, Kiai Fachruddin, KH Mas Mansur, Buya Hamka, Ir Juanda, Ki Bagus Hadikusumo, Ir. Soekarno, Fatmawati dan Mr. Kasman Singodimedjo.

Dalam perumusan dasar Negara peran Ki Bagus Hadikusumo sangat sentral dalam membedah kebuntuan perdebatan tetang dasar Negara yang serba dilematis. Ki Bagus menjadi tokoh kunci dalam perumusan dasar Negara Pancasila dengan menghapus tujuh kata "Ketuhanan, *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,…*". Beberapa kali Ki Bagus menolak anak kalimat tujuh kata itu. Dengan alasan yang sangat "nasionalistik". Ki Bagus khawatir "kurang enak" dengan umat yang bukan Islam.

Meskipun Ki Bagus seorang tokoh yang dikenal puritan, sangat kuat memegang kemurnian akidah, tetapi untuk kepentingan bangsa Ki Bagus tidak egois dan berpikiran sempit untuk golongan umat Islam apalagi hanya untuk Muhammadiyah. Di sini Ki Bagus telah memberikan keteladanan toleransi otentik dan nasionalisme sejati.

Darul Ahdi wasy-Syahadah

Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wasy-Syahadah* pada Muktamar ke-47 di Makassar 2015 merupakan puncak penegasan nasionalisme Muhammadiyah. *Pertama, Darul Ahdi* (Negara Kesepakatan) merupakan penegasan posisi Pancasila sebagai konsensus nasional sebagaimana Ki Bagus Hadikusumo yang waktu

itu sebagai Ketua Umum Muhammadiyah turut merumuskan dan bersepakat atas dasar Negara-Bangsa Indonesia.

Kedua, *Darusy-Syahadah* (Negara Persaksian) merupakan bentuk komitmen, pembuktian Muhammadiyah untuk mengisi bangsa ini dengan prestasi. Dengan kerja-kerja peradaban manifestasi syahadat kebudayaan di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kebencanaan dan seterusnya untuk mewujudkan "Indonesia Berkemajuan".

Sila pertama merupakan pantulan dari kecerdasan spiritual bangsa, yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara religious. Lebih dari itu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pernyataan yang berdimensi praksis. Karena itu Soekarno menyebutnya sebagai "tauhid fungsional". Maknanya bahwa empat sila berikutnya merupakan perwujudan dari sila pertama pada empat ranah kehidupan.

Sila pertama merupakan sebuah *Darul Ahdi* menjadi titik temu dari agama-agama yang ada di Indonesia. *Darusy-Syahadah* menuntut pembuktian dari Sila pertama dalam kerja-kerja nyata.

Pancasila hakikatnya adalah wujud dari Tauhid Sosial dalam istilah M. Amien Rais yang termanifestasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara teologis filosofis menunjukkan hubungan konsekuensial antara *hablun min Allah* dengan *hablun min al-nas.* Ketaatan beriman sebagai hamba terhadap Allah (`*abdullah*) berdampak pada kesalehan produktif membangun peradaban di muka bumi sebagai *khalifah*.

Umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini tidak perlu ragu bahwa Pancasila merupakan bagian dari sistem ideologi yang memiliki dasar-dasar teologis dan filosofis Islam. Meskipun Indonesia bukan "Negara Islam", tetapi Indonesia merupakan "Negara Islami". Karena telah mengalami proses "Islamikasi" (bukan Islamisasi) yang cukup panjang dalam sejarah nusantara.

Dalam lima sila tidak ada yang bertentangan dengan maqoshid syariah (tujuan syariah). Melainkan sesuai, senada dan sebagun dengan tujuan syariat Islam yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-`aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

Nasionalisme Moderat

Beragam slogan-slogan verbal dan heroik tentang Nasionalisme, mulai dari "NKRI Bersyariah", "Bela Negara", "Bela Pancasila", "Saya Indonesia", "Saya Pancasila", hingga "NKRI Harga Mati". Muhammadiyah memilih diksi yang tidak popular di kalangan masyarakat yaitu Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wasy-Syahadah* (DAS).

Darul Ahdi merupakan pernyataan atau syi'ar, sedangkan *Darusy-Syahadah* menuntut pembuktian dengan kerja. Muhammadiyah terbiasa dengan tradisi berpikir (intelektual), sekaligus budaya kerja.

Kyai Dahlan pendiri Muhammadiyah telah meletakkan otoritas keulamaannya dengan amaliyah nyata, bukan karena tulisan maupun retorikanya. Kyai Dahlan memahami ajaran Agama se-

cara rasional, sehingga berfungsi sebagai pemecah problem masyarakat. Semua itu dilandasi etika welas asih tanpa memandang golongan, agama, suku dan ras.

Teologi amal shaleh atau teologi kerja karakter unik dari nasionalisme Muhammadiyah. Maka wajar jika Muhammadiyah tidak teriak-teriak lantang paling Nasionalisme. Tetapi menunjukkan dengan kerja-kerja kongkret memajukan dan mencerdaskan bangsa ini.

Termasuk di saat Negeri ini sedang dilanda musibah, Muhammadiyah dengan slogan "sedikit bicara banyak bekerja" tanpa diminta secara otomatis bergerak ke penjuru negeri. Di saat negeri ini dilanda banyak bencana alam, seperti akhir-akhir ini dari Gempa Lombok, Tsunami Palu, Muhammadiyah tidak sibuk melakukan tafsir kebencanaan. Biasanya musibah selalu dikaitkan dengan kemaksiatan. Muhammadiyah tidak melakukan politisasi bencana dengan menyalahkan pemerintah.

Sebaliknya, Muhammadiyah melakukan kerja-kerja nyata, kerja cepat, dan kerja tanggap melalui LPB (Lembaga Penanggulangan Bencana). Muhammadiyah lebih melakukan kerja-kerja kongkret daripada beretorika dan berwacana.

Nasionalisme Muhammadiyah adalah "Nasionalisme Moderat". Konsisten antara "kata dan perbuatan", tidak retoris, apalagi komunal. Sebaliknya nasionalisme Muhammadiyah adalah nasionalisme berkemajuan yang menembus primordialisme. Muhammadiyah bekerja murni untuk bangsa dan kemanusiaan, bukan untuk Muhammadiyah sendiri, melainkan untuk semua golongan (*rahmatan lil alamin*).

Nasionalisme Muhammadiyah menolak segala bentuk ekstremitas. Nasionalisme radikal disebut oleh Haedar Nashir sebagai ideologi ultra-nasionalisme. Nasionalisme yang ultra atau ekstrem, menganggap kelompoknya sendiri yang paling nasionalis, sedangkan kelompok lain tidak, merasa paling memiliki Indonesia, sehingga sangat ingin serba berkuasa.

Berbeda dengan "Nasionalisme Muhammadiyah", mencintai Indonesia sewajarnya, tidak merasa paling nasionalis, juga tidak retoris dengan teriak-teriak paling Nasionalis. Sebaliknya Muhammadiyah konsisten melakukan kerja-kerja untuk membangun negeri.

Sebagaimana terekspresi dalam tema Milad ke-106 Muhammadiyah kali ini: "Ta'awun untuk Negeri". Semangat *ta'awun* untuk kebersamaan negeri, harus diperkuat dengan sikap saling mengenal (*al-ta'aruf*), saling memahami (*al-tafahum*), saling menghormati dan mengasihi (*al-tarahum*), membangun kerja sama dan solidaritas kemanusiaan (*al-tadhamun*) dan hidup berdampingan secara damai dan harmoni (*al-ta'ayus al-silmi). (Sumber: islamberkemajuan.id, 18/112018).[]*

JIHAD MUHAMMADIYAH

Dari *Jihad Lil Muaradhah* ke *Jihad Lil Muwajahah*

—Azaki Khoirudin

PUSAT Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (PSKP-UGM) berhasil melakukan riset yang kemudian dipublikasikan menjadi buku yang berjudul *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi*. Dari sini kemudian PSKP-UGM mengadakan Seminar Internasional bertema 'Islam Indonesia di Pentas Global: Inspirasi Damai Nusantara Berkemajuan untuk Dunia' di Balai Senat UGM, 25 Januari 2019.

Berdasarkan riset ini PSKP-UGM berencana untuk menominasikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama supaya meraih penghargaan Nobel Perdamaian. Karena kedua organisasi keagamaan ini dinilai berhasil menawarkan narasi dan aksi Islam damai di tengah wajah Islam yang selama ini diidentikkan dengan terorisme dan ekstremisme di mata dunia. Akibat pemaknaan *Jihad*

fi Sabilillah sebagai legitimasi melakukan peperangan melawan orang kafir, tanpa konteks dan kontekstualisasi.

Jika kita mengulik *Keputusan Muktamar Seabad Muhammadiyah* (2010), Muhammadiyah telah menegaskan pandangannya, bahwa "jihad" bukanlah perjuangan dengan kekerasan.

> "Dalam gerakan pencerahan, Muhammadiyah memaknai dan mengaktualisasikan jihad sebagai ikhtiar mengerahkan segala kemampuan (*badlul-juhdi*) untuk mewujudkan kehidupan seluruh umat manusia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Jihad dalam pandangan Muhammadiyah bukanlah perjuangan dengan kekerasan, konflik, dan permusuhan. Umat Islam dalam berhadapan dengan berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan yang kompleks dituntut untuk melakukan perubahan strategi dari perjuangan melawan sesuatu (*al-jihad li-al-muaradhah*) kepada perjuangan menghadapi sesuatu (*al-jihad li-al-Muwajahah*) dalam wujud memberikan jawaban-jawaban alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama." (Tanfidz Muktamar Seabad, 2010: 20).

Muhammadiyah telah menjadikan sekolah menjadi benteng moderasi dan rasionalisasi ajaran agama Islam. Jihad Muhammadiyah dilaksanakan melalui kerja-kerja produktif membangun peradaban dalam bidang pendidikan, ekonomi, filantropi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini senada dengan tesis Alwi Shihab (1995) bahwa factor-faktor utama pendorong lahirnya Muhammadiyah, bukan semata karena ide-ide reformis Islam dari Timur Tengah awal abad

ke-20 atau respons pada tradisi masyarakat Jawa. Tetapi ada faktor lain yang sangat penting yaitu penetrasi terhadap misi agama Kristen di Indonesia. Muhammadiyah tidak melawan Kristenisasi, malainkan menghadapi Kristenisasi dengan peradaban tandingan. Jika Kristen memiliki sekolah dan rumah sakit serta pelayanan sosial yang berkualitas, Muhammadiyah menghadapinya dengan melakukan kerja-kerja serupa untuk berlomba-lomba dalam menebar manfaat untuk kemanusiaan.

Lebih-lebih kalau menyimak "Pernyataan Pikiran Seabad Muhammadiyah", di situ Muhammadiyah menegaskan pandangannya tentang Islam Berkemajuan sebagai Islam yang membawa perdamaian dan kebaikan.

> "Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diksriminasi. Islam yang menggelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi." (Tanfidz Muktamar Seabad, 2010: 15).

Moderatisme Muhammadiyah: Komitmen dan Pengalaman

Salah satu aspek penting pengalaman Muhammadiyah sebagai gerakan Islam moderat adalah sikapnya dalam ranah politik. Meski kelahirannya sudah mendahului proklamasi kebangsaan, Muhammadiyah secara konsisten tidak pernah memiliki tujuan perjuangan politik yang arahnya adalah pembentukan negara Islam (*khilafah Islamiyah*). Muhammadiyah lebih memilih berjuang di ranah sosial dengan jalan kooperatif dengan pemerintahan Hindia-Belanda dan jalan moderat (*wasatiyyah*).

Pasca-kemerdekaan, Muhammadiyah juga tetap bergerak dalam arena sosial-keagamaan dengan menjaga pola hubungannya dengan negara dalam kerangka kemitraan kritis, yang dulu dinterpretasikan sebagai "menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik". Kini di bawah kepemimpinan Haedar Nashir di saat masyarakat seolah terbelah menjadi dua kutub ekstrem antara "cebong" vs "kampret" atau "Islamis" vs "Ultranasionalis" Muhammadiyah konsisten menjadi "jembatan berbagai kelompok", menjaga netralitas politik dan sikap moderat, bahkan tetap menjaga "hubungan yang baik dengan pemerintah".

Dalam Muktamar ke-47 di Makassar 2015, Muhammadiyah memperjelas pandangan fikih politiknya dengan konsep "Negara Pencasila sebagai Darul Ahdi wasy-Syahadah". Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional (*dar al-'ahdi*) yang mengikat seluruh komponen bangsa sekaligus bukti sebagai kekuatan perekat, pemersatu, dan pembangun bangsa (*dar al-syahadah*).

Secara kultural, Muhammadiyah secara institutional menawarkan pembaruan dalam menjawab dan menghadapi tantangan pluralisme. Pada tahun 2000, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI) menerbitkan buku *Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama.*Tafsir ini penting untuk membuka cakrawala dan pemikiran warga Muhammadiyah dan umat Islam umumnya mengenai pluralisme, dialog antariman, koeksistensi damai, perkawinan antaragama, mengucapkan salam, dan murtad.

Untuk mendukung dan terus men-diseminasi-kan gagasan pluralisme di atas, Muhammadiyah pada 2002 di Bali, mulai memperkenalkan konsep "Dakwah Kultural". Setelah melalui berbagai diskusi, akhirnya Muktamar 2005 di Malang menerima secara bulat "Dakwah Kultural" sebagai keputusan resmi organisasi. Dakwah Kultural pada hakikatnya adalah seruan universalitas Islam untuk kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, ras, suku, etnik, warna kulit, bahasa, dan gender. Melalui cara ini, lokalitas menjadi modal untuk membumikan Islam di bumi Nusantara dan bumi mana pun di dunia ini (*Islam rahmatan li al-'alamin)*.

Pada kepemimpinan Din Syamsuddin, selain dikenal nyaring menyuarakan "Jihad Konstitusi", Muhammadiyah menunjukkan geliat keterlibatan dalam upaya-upaya *peacebuilding,* baik pada skala nasional maupun internasional. Melalui *Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations* (CDCC), Muhammadiyah mengambil inisiatif dan peranan dalam proses perdamaian regional dan global. Din Syamsuddin aktif dan terpilih sebagai ketua

umum Committee on Religion and Peace (IComRP), dan terlibat dalam Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) dan World Conference on Religion and Peace (WCRP).

Pada pemerintahan Presiden Jokowi, Din Syamsuddin ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) yang kini digantikan oleh Syafiq A Mughni (Ketua PP Muhammadiyah). Lembaga ini menyelenggarakan Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasathiyyah Islam (HLS-WMS) selama tiga hari, yaitu 1-3 Mei 2018 di Bogor.

Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Islam Wasathiyah melahirkan Bogor Message. Ada tujuh poin dari Pesan Bogor tuntuk menegaskan kembali tentang makna Islam wasathiyah: 1) *tawassuth*, jalan tengah yang lurus, tidak ekstrem kanan dan kiri; 2) *i'tidal,* berlaku proporsional, adil, dan tanggung jawab; 3) *tasamuh,* toleran, mengakui dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan; 4) *syuro,* bersandar pada musyawarah untuk mencapai konsensus; 5) *islah,* terlibat dalam tindakan yang reformatif untuk kebaikan bersama; 6) *qudwah,* melahirkan inisiatif yang mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia; dan terahir 7) *muwathonah,* mengakui Negara-bangsa dan menghormati kewarganegaraan.

Inilah watak Islam Indonesia yang sejati, yaitu Islam yang moderat, ramah, toleran, dan damai, bukan Islam radikal, konservatif dan ekstrem. Indonesia adalah Negara mayoritas muslim yang hidup di alam kelautan. Kebudayaan bahari melahirkan corak keislaman yang unik, yang tidak cocok dengan karakter Islam kon-

servatif dan radikal. Gerakan radikal dan terorisme bukan dikembangkan oleh *indigenous* Muslim (muslim lokal).

Di sini Saya sependapat dengan artikel Ahmad Rizky M. Umar yang berjudul “Menggagas Fikih Perdamaian Muhammadiyah”. Tetapi saya lebih cenderung perlunya Muhammadiyah supaya merumuskan “Tafsir Tematik” tentang “Jihad”, bukan tentang “Terorisme”, sebagai wawasan keislaman yang menyatu dengan keindonesiaan dan kemanusiaan. Bila ulama klasik memaknai *jihad* sebagai memerangi non-Muslim, maka *jihad* dalam konteks keindonesiaan adalah hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan persahabatan.

Selain itu juga jihad-jihad produktif seperti Jihad Kedaulatan Pangan, Jihad Konstitusi, Jihad Literasi, Jihad Anti-Korupsi dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan Jihad Muhammadiyah: Dari *Jihad Lil Muaradhah* ke *Jihad Lil Muwajahah.[]*

TELADAN POLITIK MUHAMMADIYAH

—Benni Setiawan

KEPRIBADIAN Muhammadiyah dengan jelas menyebutkan bahwa Persyarikatan bukan organisasi politik. Namun, Muhammadiyah tidak buta politik dan tidak takut berbicara masalah politik. Muhammadiyah tidak berurusan dengan politik praktis. Muhammadiyah menegakkan politik beretika dan politik keteladanan. Muhammadiyah menjadi suluh masyarakat. Suluh itu tidak boleh bercampur dengan politik praktis (perebutan kursi kekuasaan). Karena suluh harus netral, sehingga ia bisa diterima di mana saja.

Pilihan itu pun membuncahkan harapan bahwa organisasi massa seperti Muhammadiyah perlu memberi pencerahan kepada umat. Namun, ia tidak antipolitik. Ia mewartakan politik keumatan, kebangsaan, dan keadaban, tanpa harus terikat oleh kepentingan politik praktis.

Kerja Keadaban

Politik praktis hanya akan menjadi pemantik permusuhan saat semua terjun dan bertarung demi kemenangan. Kemenangan pada hakikatnya bukanlah tujuan utama politik. Kemenangan pada dasarnya hanya sebuah langkah mewujudkan cita politik yang adi luhur.

Mengutip pernyataan Hajriyanto Y Thohari, "politik jangan dimaknai semata-mata untuk berburu kekuasaan. Meskipun "*Hubbu riasah daun la dawaa lahu*", dan politik itu "*Who get what, when, how, dan why*", politik itu juga metode menyelesaikan konflik (tanpa kekerasan). Politik itu, seperti kata Maurice Duverger, laksana dewa Janus dalam mitologi Yunani, memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus".

Oleh karena politik perlu berwajah sebagai solusi mengurai konflik, bukan sebaliknya menjadi biang dari permusuhan. Namun, sampai saat ini kita masih disuguhi narasi kemenengan yang seringkali bergesekan dengan nurani bangsa. Ironisnya, para pemimpin bangsa itu mempertontonkan tujuan kemenangan dan mengabaikan bahwa politik itu muaranya adalah mewujudkan keadaban.

Dengan demikian kemenangan perlu diraih dengan kerja keadaban. Kemenangan yang diperoleh dengan menghalalkan segala cara dan atau membajak nilai-nilai luhur bangsa hanya akan semakin memperkeruh keadaaan. Dan pada gilirannya kita akan saling membenci. Kebencian yang tak terbendung dan terkontrol hanya akan melahirkan fanatisme sempit. Fanatisme sempit itu akhirnya berbuah pada tindak kekerasan.

Jalan Kebajikan

Dalam perspektif Muhammadiyah, jabatan bukanlah hal utama dalam mewujudkan masyarakat beradab, adil, makmur, dan Islam yang sebenar-benarnya. Jabatan hanya "wasilah" untuk itu. Jabatan (kekuasaan) merupakan sarana pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Oleh karena itu, Muhammadiyah menyeru s*emua pihak agar mendukung proses demokrasi substantif. Yaitu pilihan demokrasi yang bebas dari politik yang koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia.*

Seruan itu menjadi penting di tengah semakin riuhnya konstelasi politik jelang pemilu 2019. Keriuhan itu ditandai dengan ketidakdewasaan calon pemimpin bangsa. Calon pemimpin bangsa sepertinya belum sampai pada taraf negarawan.

Negarawan adalah mereka yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Negarawan adalah mereka yang tak haus dengan kuasa kekuasaan. Negarawan adalah mereka yang siap menjadi terdepan memimpin umat, di tengah memberikan kekuatan dan penguatan, dan di belakang sebagai penyokong dan pengayom. Itulah trilogi kebangsaan yang telah diwariskan oleh Ki Hadjar Dewantara. Model kepemimpinan itulah yang terus didorong dan dipraktikan dalam keseharian Muhammadiyah.

Muhammadiyah mengambil sikap ini bukan berarti dia galau dalam menentukan pilihan. Sikap Muhammadiyah itu adalah jalan kebajikan. Jalan kebajikan itu perlu terus dirawat untuk

menjaga akal waras dan ingatan sehat berbangsa dan bernegara. Inilah yang dalam rumusan Kepribadian Muhammadiyah disebutkan bahwa Persyarikatan akan bertindak menurut kemampuan, cara dan irama organisasi yang berdiri pada 18 November 1912 itu sendiri.

Pada akhirnya, inilah teladan politik Muhammadiyah. Sebuah potret keteladanan sebagai modal sosial bangsa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat milad ke-106 Muhammadiyah. Teruslah menginspirasi bangsa (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 18/11/2018).[]

MUHAMMADIYAH DAN DEMOKRASI VIRTUAL

—Benni Setiawan

SUDAH lebih dari seabad Muhammadiyah berkiprah. Hingga saat ini Muhammadiyah pun tetap berada di rahim Nusantara menjaga kebangsaan dan kenegaraan. Muhammadiyah menjaga Republik Indonesia dengan cara ta'awun untuk negeri. Ta'awun untuk negeri yang menjadi tema perayaan milad tahun ini seakan mengukuhkan peran dan kontribusi Muhammadiyah membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran dan kontribusi Muhammadiyah sejak tidak hanya sebatas pada pelayanan sosial berupa pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penyantunan terhadap kaum miskin, namun berkontribusi dalam bidang politik. Kontribusi itu dapat kita lihat dari peran Ki Bagus Hadikusumo dalam perumusan pandangan kebangsaan Pancasila.

Tidak hanya Ki Bagus, ada nama Jenderal Soedirman, Kasman Singodimejo, dan sederet tokoh lain yang tercacat dalam lembara

sejarah menyumbangkan ide dan aksi untuk kegiatan politik kebangsaan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana Muhammadiyah kini berkontribusi dalam bidang politik.

Tentu politik di sini harus sesuai dengan fatsun Muhammadiyah. Yaitu menjalankan politik tinggi (*high politics*), sebagaimana khittah perjuangan Muhammadiyah. Memasuki era demokrasi virtual pertarungan politik sudah mulai berubah. Demokrasi virtual melahirkan partisipasi aktif, interaktif, berjejaring, dan dapat bersifat personal (Kaczmarczyk, 2010).

Diskursus politik tidak hanya diperbincangkan di parlemen dan gedung-gedung pemerintah, namun juga menjalar ke media sosial. Media sosial menjadi sarana perbincangan yang dapat memunculkan sentimen dalam menentukan sikap politik. Oleh karena itu umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah perlu menguatkan langkah untuk mewarnai era baru ini. Muhammadiyah dapat berperan dalam membangun keadaban di era demokrasi virtual. Demokrasi virtual bukan sarana mengumpat atau mencurahkan emosi jiwa.

Demokrasi virtual merupakan wadah untuk berbagi, bersinergi, dan berkreasi. Era demorasi virtual menjadi persemaian yang baik bagi penguatan nilai sosial kemanusiaan. Internet menjadi tempat persinggahan siapa saja yang tergerak hatinya untuk mewujudkan keadaban.

Seseorang yang menginisiasi kebaikan di sini akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama. Oleh karena itu, jika warga Muhammadiyah bertemu dalam sebuah groups WA misalnya, perlu menjadikan wadah bertukar

informasi dan kegiatan yang baik. Namun, sependek pengetahuan saya groups WA yang mendasarkan diri pada Persyarikatan lebih banyak diisi dengan hal-hal yang mengandung provokasi dan hoaks. Benarlah apa yang sering di sampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, groups WA Muhammadiyah sering kali kurang mencerminkan jati diri Persyarikatan.

Jati Diri Muhammadiyah

Salah satu jati diri Persyarikatan Muhammadiyah adalah terumus dalam Kepribadian Muhammadiyah. Ada sepuluh Kepribadian Muhammadiyah yang selayaknya menjadi panduan dalam bersosial, baik di dunia maya dan dunia nyata.

Kepribadian Muhammadiyah (3) Lapang dada, luas pemandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. (7) Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud Ishlah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kepribadian Muhammadiyah ketiga di atas mengajarkan kepada warga Muhammadiyah untuk berlapang dada.

Berlapang dada berarti mempunyai kesabaran tingkat Nabi dan Rasul ulul azmi. Sebagaimana firman Allah Surat al-Ahqaf (46: 35) Saat warga Muhammadiyah kurang bersabar dan cenderung reaktif, maka ia akan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Dunia digital bisa "memangsa" siapa saja.

Siapa yang tidak siap, dan cenderung tergopoh dalam kehidupan sosial politik akan menjadi "jalan" memuluskan kepentingan orang lain. Artinya, saat warga Muhammadiyah tidak mampu

menjadi warga bangsa yang terdidik dan mempunyai kekuatan kolektif yang kuat, maka ia akan mudah dicerai-berai—untuk tidak disebut dimangsa kekuatan *invisible hand*.

Oleh karena itu, bina keumatan di tengah demokrasi virtual saat ini sangat penting. Kekuatan kolektif Muhammadiyah perlu kembali menjadi senjata di tengah semakin mudahnya masyarakat marah. Kemarahan masyarakat karena terpancing berita bohong akan merusak tatanan sosial.

Kemarahan di media sosial akan merembet pada alam bawah sadar orang lain. Saat kemarahan bertemu dengan sikap reaktif, maka yang terjadi adalah sikap destruktif (merusak). Sikap reaktif perlu diobati dengan membangun suasana nyaman di berbagai media sosial.

Groups WA Persyarikatan Muhammadiyah selayaknya menjadi tempat *tabayun* dan menguatkan gerakan jamaah dakwah jamaah (GJDJ). Saat GJDJ menjadi aktivitas keseharian, maka warga Muhammadiyah akan menjadi bagian masyarakat beradab. Inilah kekuatan sinergi.

Sinergi akan menguatkan sikap proaktif warga Persyarikatan dalam sistem demokrasi virtual. Demokrasi virtual tidak akan banyak mengubah kebiasaan warga Muhammadiyah saat mereka mampu saling menguatkan satu sama lain. Dalam hal pilihan politik misalnya, saat semua sudah saling bersinergi, maka pilihan partai politik (parpol) bukanlah halangan untuk tetap membangun Muhammadiyah.

Pilihan parpol merupakan ijtihad, sedangkan menguatkan Muhammadiyah merupakan tugas mulia. Saat semua bermuara

pada sendi pemahaman yang sama—yaitu proses memakmurkan bangsa dan negara dengan niatan baik—maka sikap saling menyalahkan akan hilang.

Muhammadiyah tidak buta politik, tidak takut politik, tetapi Muhammadiyah bukan organisasi politik. Muhammadiyah tidak mencampuri soal-soal politik, tetapi apabila soal-soal politik itu masuk dalam Muhammadiyah, atau pun soal-soal politik mendesak-desak urusan Agama Islam, maka Muhammadiyah akan bertindak menurut kemampuan, cara, dan irama Muhammadiyah sendiri (Haedar Nashir, 2017). Pada akhirnya, Muhammadiyah perlu menjadi pioneer dalam menyikapi demokrasi virtual.

Sebagai kaum terpelajar warga Muhammadiyah perlu bijak dan menjadi pelopor dalam membincang demokrasi yang sehat dan mencerahkan. Selamat Milad ke-106 Muhammadiyah pada 18 November 2018. Semoga tetap kukuh menjadi organisasi pelopor gerakan pembaruan (Sumber: *Sindo,* 16/11/2018).[]

ETIKA POLITIK MUHAMMADIYAH

—Muh. Asratillah Senge

DARI rilis hasil survei LSI-Denny JA pada oktober 2018 yang lalu, memperlihatkan hasil yang cukup menarik. Apa itu? Da'i yang memiliki tingkat popularitas serta kesukaan yang tinggi di mata publik, adalah da'i yang tidak berafiliasi dengan dua ormas Islam tertua dan terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah.

Saya juga belum bisa menebak dengan pasti, apa gerangan yang menyebabkan demikian. Apakah karena publik menganggap keberagamaan murni sebagai urusan spiritualitas pribadi belaka? sehingga menganggap keberagamaan tak ada sangkut pautnya dengan infrastruktur organisasi apalagi semasif NU dan Muhammadiyah. Ataukah publik memang tak berselera terhadap cara beragama yang relatif rasional atau menuntut kapasitas intelektual tertentu? seperti yang dipupuk dalam tubuh Muhammadiyah dan NU? Ataukah publik mengalami pergeseran retorika dan media keberagamaan, dari media konvensional ke media baru yakni media internet.

Yang juga menarik dari survei tersebut adalah mencoba membandingkan di antara figur Da'i yang ada, tingkat sejauh mana responden mau "mengikuti himbauan" mereka, atau sederhananya barangkali bisa dikatakan bahwa survei tersebut ingin mengukur kekuatan Da'i sebagai "*opinion leader*", dan semakin kuat seorang *opinion leader* maka semakin kuat pula daya tawar politiknya. Jika kita mengatakan bahwa studi politik sekadar berbicara hal yang deskriptif, dalam hal ini menggambarkan situasi atau perilaku dari pemilih yang diwakili oleh 1200 responden, maka hasil survei di atas tidak menjadi soal. Tapi jika kita juga menganggap bahwa politik sebagai hal yang preskriptif, maka soalnya menjadi lain, kita sedang berbicara mengenai segala hal yang berkaitan dengan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan ke-publik-an.

Logika ekspresi keberagamaan kita saat ini seakan-akan mengalami irisan dengan logika berpolitik kita, apa itu? yaitu logika popularitas. Ada kecenderungan, menilai "yang baik" dan "yang benar" berdasarkan "tingkat keterkenalan", menilai "yang bijak" berdasar seberapa sering "ditonton", "dilike" dan berapa banyak yang menjadi "*subscriber*" dari *channel* kita di Youtube. Logika tersebut, menggeser standar etika politik kita, mentransformasi etika publik kita dengan kata lain mengubah cara kita memandang dan berinterkasi dengan "yang lain" di ruang publik. Karena logika keber-agama-an dan berpolitik kita itulah, sehingga kita menilai kesalehan seseorang dari seberapa banyak yang menjadi fansnya, dan kita menilai kualitas seorang politisi berdasarkan kuantitas suara yang dia peroleh saat pemilihan umum. Lalu bagaimana sebaiknya Muhammadiyah merespons hal ini?

Prinsip-prinsip Dasar Etika Politik Muhammadiyah

Salah satu bentuk respons yang bisa dilakukan Muhammadiyah adalah menegaskan tawaran etika politiknya. Mengapa etika politik dan bukan teologi politik?, karena etika politik adalah sesuatu yang memiliki daya jangkau, daya jelajah relevansi yang jauh lebih luas. Lalu apa titik tolak yang bisa digunakan Muhammadiyah dalam menyusun etika politiknya? agar jalan berpikir yang digunakan tidak terlalu panjang, maka kita bisa menjadikan Ideologi Islam Berkemajuan sebagai titik tolak, lalu dilanjutkan dengan beberapa pengayaan-pengayaan. Dalam naskah Pernyataan Pemikiran Muhammadiyah abad Kedua di sebutkan bahwa Islam Berkemajuan adalah "*Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi*". Saya rasa frasa "*menjunjung tinggi kemuliaan manusia*" bisa menjadi titik tolak yang baik dan kokoh, karena pada dasarnya politik ada dalam rangka membuat relasi antar manusia, menjadi tetap manusiawi.

Tapi yang perlu diingat Muhammadiyah, yang etis itu bukanlah entitas otonom yang seakan-akan merupakan substansi sendiri dan tak ada sangkut pautnya dengan kemanusiaan. Levinas mengatakan bahwa hanya dengan pertemuan dengan manusia lainlah "Yang Etis" itu bisa lahir. Maksudnya apa?, bahwa "yang etis" atau "yang baik" nanti menjadi konkret saat kita aktif dan peduli dengan manusia lain. Sebenarnya tema ini tak asing bagi Muhammadiyah, karena dari sejarah awal pembentukannya, Muhammadiyah telah melakukan upaya untuk menerjemahkan teo-

loginya menjadi etika, bahwa "kebaikan" atau akhlak terpuji (*akhlakul mahmudah*) jika hanya tertulis di kitab kuning dan sekadar diucapkan di mimbar-mimbar maka pada dasarnya "kebaikan" itu tidak eksis. Bagi Muhammadiyah "yang baik" akan menjadi eksis jika anda memberi makan dan memandikan anak-anak yatim, "yang baik" akan menjadi eksis jika anda mengenyangkan perut para peminta-peminta, "yang baik" akan eksis jika anda membantu kesembuhan orang-orang miskin yang lagi sakit, "yang baik" akan eksis jika anda mengajarkan cara membaca dan berhitung ke anak-anak miskin.

Dalam pandangan filosofis Levinas, simbol dari "kemuliaan manusia" adalah wajahnya. Saat kita bertemu dengan sesama, maka kita tak sekadar bertemu dengan objek, kita sedang bertemu dengan yang tak bisa ditundukkan, yang tidak bisa disimplifikasikan atau diabstrakasikan, karena kita bertemu dengan "*le-visage*" alias wajah. Saat kita bertatap muka dengan sebuah "wajah", maka satu-satunya yang dituntut olehnya adalah "kepedulian etis". Begitu pula dengan politik, Muhammadiyah semestinya memaknai politik sebagai perjumpaan antara "wajah", perjumpaan antara subjek-subjek yang tidak dapat ditundukkan atau pun diabstrakkan, apakah melalui kata "penduduk", "suara", "massa" atau pun "konstituen". Muhammadiyah memang bukanlah partai politik, tetapi dia memiliki peran politik penting di negeri ini, Muhammadiyah harus bisa mewartakan dan memberikan teladan bahwa sebelum melihat "wajah" sebagai "kader", "anggota" dan "simpatisan", lihatlah "wajah" tersebut terlebih dahulu sebagai "manusia". Tapi rumusan etika politik dari Muhammadiyah,

tak hanya sampai pada memandang "wajah" sebagai perwakilan "kemuliaan manusia", tetapi melangkah jauh lebih dari itu, yaitu mewujudkan "yang baik" melalui tindakan kebaikan konkret sang pemilik wajah.

Pemuliaan manusia akan menjadi dasar bagi prinsip berikutnya yaitu prinsip "tanpa diskriminasi", prinsip ini adalah petunjuk yang jelas, bahwa Muhammadiyah memandang manusia dalam posisi yang setara tanpa memandang status atau identitas manusia tersebut. Mengapa prinsip egaliter menjadi hal yang penting? salah satu sebabnya adalah untuk mencegah politik hanya dilihat sebagai soal perebutan kekuasaan belaka. Politik yang hanya dilihat sebagai perebutan kekuasaan, akan menciptakan ruang yang memberikan peluang besar bagi penundukan dan dominasi oleh negara atau dominasi oleh oligarki terhadap warga negara. Prinsip kesetaraan juga berimplikasi bahwa politik adalah perihal partisipasi aktif selaku subjek politik. Menurut Jacques Ranciere segala hal yang berkaitan dengan politik terkandung dalam hubungan khusus antara orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu "ikut-mengambil-peranan" (*part-taking/avoir part*).

Setelah itu, kesetaraan yang berimplikasi pada ke"ikut-ambil-peranan", diasumsikan dari kemampuan semua warga negara untuk menggunakan akal sehatnya atau berpikir. Maka hal ini akan berimplikasi pada prinsip-prinsip lainnya yaitu negativitas dusta dan kewajiban edukasi politik. Etika politik Muhammadiyah mesti menegasi dusta, karena dusta pada dasarnya adalah penafian terhadap ketidakmampuan warga negara untuk berpikir atau menggunakan akal budi nya. Menghormati harkat dan manusia

sama artinya dengan penghormatan terhadap kebebasan akan aktualisasi akal budi. Mengingkari kebebasan aktualisasi akal budi, berarti mengafirmasi dusta. Mengafirmasi dusta itu berarti mengafirmasi aristokrasi-plutokrasi-feodalisme dan ini juga berarti pengingkaraan terhadap kesetaraan. Pengingkaran terhadap kekerasan berarti mengobjekkan manusia dan itu juga berarti tidak mengakui bahwa semua manusia memiliki "kemuliaan" di dalam dirinya.[]

3

Ta'awun Kebudayaan

WATAK MUHAMMADIYAH

Memberi untuk Negeri

—M. Husnaini

BERTAMBAH lagi pahlawan dari Muhammadiyah. Pada 8 November 2018, Mr Kasman Singodimedjo dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keppres Nomor 123/TK/Tahun 2018. Kasman Singodimedjo adalah tokoh Muhammadiyah yang berjasa besar untuk Tanah Air. Dia turut hadir dalam Kongres Pemuda II pada Juni 1928. Saat itu, Kasman Singodimedjo menjadi anggota Jong Islamieten Bond (JIB) atau dikenal sebagai "Pemimpin Pemuda Islam". Selanjutnya, pada 1930-1935, Kasman Singodimedjo menjadi ketuanya. Kemudian, pada Kongres Pemuda II, Kasman Singodimedjo turut berperan mencetuskan Sumpah Pemuda.

Dengan demikian, total tokoh Muhammadiyah yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional genap 12 orang. Selain Kasman Singodimedjo, mereka antara lain Ahmad Dahlan (ditetapkan 1961), Juanda (ditetapkan 1963), Fakhruddin (ditetapkan

1964), Jenderal Sudirman (ditetapkan 1964), Mas Mansur (ditetapkan 1964), Siti Walidah (ditetapkan 1971), Fatmawati Soekarno (ditetapkan 2000), Gatot Mangkupraja (ditetapkan 2004), Hamka (ditetapkan 2011), Soekarno (ditetapkan 2012), dan Ki Bagus Hadikusumo (ditetapkan 2015).

Apabila dibandingkan dengan tokoh-tokoh NU yang bergelar Pahlawan Nasional, Muhammadiyah lebih banyak. Selain itu, Muhammadiyah juga sudah memiliki Pahlawan Wanita. Adapun Pahlawan Nasional dari kalangan NU ada 8 orang, yaitu Hasyim Asy'ari, Abdul Wahid Hasyim, Zainul Arifin, As'ad Syamsul Arifin, Zainul Mustofa, Idham Chalid, Abdul Wahab Hasbullah, dan Syam'un.

Sejak negara ini di rahim sejarah, para pemimpin Muhammadiyah memang sudah aktif berbuat untuk negeri. Dalam alam Indonesia merdeka, Muhammadiyah juga turut membangun bangsa melalui ribuan amal usaha yang tersebar dari Mianggas hingga Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. Dalam buku "Aliran Pembaruan Islam", Djarnawi Hadikusuma menuturkan bahwa KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, memandang Islam bukan semata agama pribadi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah.

Lebih dari itu, Islam adalah *way of human life in all aspects*. Benar bahwa segala praktik ibadah formal yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan Rasulullah harus digilas habis lewat lembaga pendidikan, pengajian, dan ceramah umum. Tetapi, Kyai Dahlan juga aktif dalam berbagai aksi pemberdayaan sosial. Itulah kenapa Muhammadiyah mendirikan ribuan lembaga pendidikan, balai

pengobatan, panti asuhan, rumah jompo, rumah miskin, dan lainnya.

Misi tajdid dalam Persyarikatan ini tidak hanya berdimensi purifikasi, namun juga dinamisasi. Dengan makna lain, Kyai Dahlan mengajak umat untuk memurnikan ajaran Islam dengan kembali ke Al-Qur'an dan hadis sahih sekaligus juga melakukan pencerahan kehidupan lewat berbagai pemikiran dan gerakan pemberdayaan. Bahkan, jika kita amati perjuangan Muhammadiyah di masa-masa awal, pembaruan Kyai Dahlan bukan semata soal pelurusan arah kiblat Masjid Besar Kauman berdasarkan ilmu falak. Etos gagasan dan gerakan Kyai Dahlan yang jauh lebih monumental sebenarnya ialah keterbukaan sikap dalam mencerap puncak-puncak peradaban dan melintasi sekat bangsa dan agama.

Tiga tokoh pembaru Islam yang saat itu sangat menginspirasi Kyai Dahlan adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Kyai Dahlan sepakat dengan ide Jamaluddin Al-Afghani bahwa Islam ialah agama yang selaras dengan akal, kemajuan, dan peradaban. Sementara itu, gairah Kyai Dahlan dan Muhammadiyah dalam berbagai aksi sosial mirip jalan yang ditempuh oleh Muhammad Abduh. Selain sebagai tokoh pembaru dalam bidang pemahaman Islam, Abduh merupakan pembaru dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di lingkungan Al-Azhar. Juga tidak boleh dilupakan letupan api Kyai Dahlan yang berasal dari Rasyid Ridha. Lewat perantaraan KH Baqir, Kyai Dahlan bertemu dan berkenalan dengan Rasyid Ridha

yang kebetulan berada di Mekah, dan ide pembaruan Kyai Dahlan semakin menghunjam ke dada sejak itu.

Kendati demikian, penting dicamkan, pembaruan Kyai Dahlan tidak serta-merta bisa dirujukkan secara autentik kepada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, apalagi Muhammad Abdul Wahhab. Menurut Abdul Munir Mulkhan, gagasan genial Kyai Dahlan mencairkan hegemoni tafsir Salafi. Berbagai aksi sosial Kyai Dahlan mencerminkan kesesuaian antara natural tafsir Al-Quran, pengalaman kemanusiaan universal, dan temuan iptek. Rasionalisasi pemahaman dan praktik ritual mungkin diambil dari tokoh pembaru, tetapi inovasi kreatif pragmatis-humanis tersebut diambil dari pengalaman kaum Kristiani di Tanah Air, dipadu dengan pengalaman induktif kemanusiaan universal Kyai Dahlan sendiri.

Kyai Dahlan benar-benar sosok pencerah. Sulit ditemukan tafsir klasik yang menjelaskan makna Al-Quran sebagaimana pemahaman Kyai Dahlan. Pemaknaan Kyai Dahlan atas surah Alu Imran ayat 104, misalnya, menjadi basis teologi organisasi modern sebagai instrumen ritual dan pemecahan problem kehidupan. Pembacaan beliau atas surah Al-Ma'un juga melahirkan aksi-aksi pemberdayaan. Tidak heran, pembaruan di tubuh Muhammadiyah berbeda dari gerakan Islam mana pun di dunia. Muhammadiyah tidak hanya berbicara soal pemurnian akidah, tetapi juga memajukan kehidupan. Muhammadiyah *welcome* terhadap sumber ilmu dari mana pun, sepanjang untuk kemajuan Islam.

Jati diri demikian sudah diamini oleh banyak pemikir dan peneliti dalam dan luar negeri. Alfian (1989) menyebut Muhamma-

diyah sebagai gerakan reformis. Deliar Noer (1996) menyebutnya gerakan Islam modern. Azyumardi Azra (2005) menyebutnya gerakan salafiah wasathiah. Soekarno menyebutnya gerakan Islam progresif. William Shepard (2004) menyebutnya gerakan *Islamic modernism*. Nakamura (1983) menyebutnya gerakan yang patuh dan disiplin, tetapi toleran. Charles Kurzman (2003) menyebut Kyai Dahlan dan Muhammadiyah sebagai Islam liberal.

Islam berkemajuan

Kini, setelah melewati usia satu abad, Muhammadiyah sudah dan terus berjuang mewujudkan Islam berkemajuan, identitas Muhammadiyah yang berasal dari harapan Sang Pencerah. Sebagaimana pernah dinyatakan M Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Muhammadiyah itu *ahsanu amala*, bukan *katsura amala*. Maksudnya, karya yang banyak di Muhammadiyah itu dilakukan secara ihsan, profesional. "Dalam Muhammadiyah, bukan angka yang bicara, namun kualitas yang bicara," tulisnya dalam buku "Muhammadiyah untuk Semua".

Muhammadiyah tidak berhenti bergerak, karena hidup adalah gerak. Melalui lembaga pendidikan, Muhammadiyah turut mencerdaskan kehidupan berbangsa. Lewat lembaga pelayanan kesehatan, Muhammadiyah hendak membangun bangsa sehat dan kuat. Dengan lembaga pelayanan sosial, Muhammadiyah bermaksud meringankan beban kaum miskin dan melarat. Kemudian, para mubalig Muhammadiyah juga terus bergerilya menemui umat dan mengajak mereka menuju keberagamaan rasional dan berkemajuan.

Rahasia sukses Muhammadiyah, menurut M Din Syamsuddin dalam buku tersebut, tidak lain karena Muhammadiyah selalu mengembangkan prinsip jalan tengah (*median position*) dan menjadi tenda besar yang menaungi kemajemukan masyarakat. Muhammadiyah menjadi kekuatan penengah dan perantara (*mediating and moderating force*) dalam konfigurasi keragaman bangsa. Muhammadiyah menyuntikkan energi kemajuan dan kejayaan di tengah kemajemukan dan keragaman.

Islam, sebagaimana dipahami Muhammadiyah, ialah agama kemajuan dan peradaban. Keberislaman sejati haruslah keberagamaan yang mendorong kemajuan kebudayaan dan peradaban. Kemunduran, apalagi keterpurukan, itu bertentangan dengan watak Islam. Karena itu, Muhammadiyah merasa terpanggil untuk mencerahkan kehidupan bangsa dan umat dari dulu hingga sekarang. Muhammadiyah berikan bukti, bukan janji.

Terakhir, jalan ke surga tidak harus lewat Muhammadiyah. Namun, salah satu ciri Muhammadiyah adalah tegas dalam urusan ibadah dan akhlak. Dalam wilayah akidah dan ibadah, Muhammadiyah bersifat tajrid bin statis alias hanya mencukupkan diri dari perintah Al-Quran dan contoh dari Kanjeng Nabi. Tidak ada kreativitas dalam wilayah ini. Al-Quran bicara apa, hadisnya bagaimana, itulah yang Muhammadiyah lakukan. Adapun watak tajdid bin dinamis alias terus berkemajuan sesuai irama zaman adalah dalam wilayah muamalah duniawi.

Ringkas kata, Muhammadiyah dapat dikatakan fundamental dalam urusan akidah, namun liberal dalam urusan muamalah. Yang terjadi sekarang, sering kita terbalik-balik. Dalam urusan du-

nia, kita mandek. Kreatifnya justru sering dalam urusan ibadah. Ada pula kekeliruan fatal umat Islam. Agama dipahami secara sempit, dan seolah tidak ada kaitannya dengan urusan hidup dan kehidupan ini. Padahal, Islam adalah panduan hidup yang lengkap. Kebahagiaan manusia yang sesungguhnya, sejak di dunia hingga akhirat, sangat ditentukan seberapa kukuh dia berpedoman rambu dan petunjuk Allah melalui ajaran Islam. Masih adakah yang mempersoalkan peran dan kontribusi nyata Muhammadiyah?[]

GERAKAN TAMAN PUSTAKA DAN TA'AWUN UNTUK BANGSA

—David Efendi

PERGERAKAN pengetahuan dan sirkulasi informasi di Muhammadiyah sebagai kepentingan yang luar biasa utama di dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah. Bukti yang tak terbantahkan adalah dibentuknya Bahagian Poestaka di awal-awal pendirian Muhammadiyah tahun 1915. Jadi, urusan pengetahuan, informasi, dan literasi ini menjadi as-saabiqunal awwalun dalam denyut nadi dan rumah besar Islam yang maju bernama Muhammadiyah. Membaca Muhammadiyah di awal ini adalah menegaskan kebenaran tesis-tesis dan temuan fakta sejarah tentang 'fajar intelektualisme Islam' di tubuh bangsa ini sebagaimana yang didaras oleh J. Pedersen dalam bukunya. Biblioteka atau perpustakaan Muhammadiyah tahun 1923 di Kampung kauman adalah taman pustaka atau taman bacaan masyarakat, atau rumah Baca di akhir abad kolonialisme.

Dari habitus pengetahuan inilah terpapar kesadaran identitas yang produktif dan maju mengenai bagaimana tata kehidup-

an, bina-kebebasan, dan kesadaran anti-kolonialisme yang secara pelan-pelan menyelinap dalam hati sanubari kaum terpelajar di lingkaran Muhammadiyah. Majalah Suara Muhammadiyah adalah maha karya bagian pustaka di Muhammadiyah yang berumur satu abad lebih. Penggunaan Bahasa melayu dalam majalah Soeara Moehammadiyah adalah bukti faktual bagaimana Muhammadiyah berada dalam semangat zaman bergerak untuk pembebasan. Teologi Pendidikan dana amal sosial Muhammadiyah adalah teologi pembebasan (*liberation teology*). Suara Muhammadiyah telah memberikan peran yang luar biasa bagi perkembangan nalar islam reformasi, maju, islam anti keterbelakangan pada zaman awalnya, dan pascareformasi Islam damai, yang dialogis, dan islam jalan tengah atau moderat (washatiyah).

Dari Taman Pustaka ke Serikat Taman Pustaka

Terhitung Serikat Taman Pustaka (STP) satu tahun usianya, yaitu sejak tanggal 8 Desember 2017 perkumpulan pegiat literasi di kalangan Muhammadiyah ini berdiri di Solo, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam rangkaian Kopi Darat Nasional Penggiat Literasi yang berlangsung selama tiga hari. STP merupakan jaringan organik yang berisi penggiat komunitas literasi, pustakawan di lingkungan Lembaga Muhammadiyah baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, majelis pustaka, dan individu yang merupakan pembaharu sosial di bidang literasi/pengetahuan/Pendidikan. Platform gerakan serikat Taman Pustaka ini juga diberdayakan oleh website pustakamu.id dan sosial media lainnya.

Bagi saya, eksistensi Serikat Taman Pustaka selain napak tilas sejarah gemilang gerakan pencerahan di tubuh, juga sebagai wadah bersama beragam jenis/bentuk/kelompok /komunitas yang menyelenggarakan urusan literasi dan berfungsi untuk mendayagunakan energi yang tersedia serta melipatgandakan kekuatan untuk mewujudkan masyarakat utama yang memiliki komitmen kuat terhadap makna hidup, kemerdekaan, dan kebudayaan. Keberadaan Taman Pustaka adalah manifesto dari spirit pembaharuan Muhammadiyah. Berdiri tahun 1923 di Kauman Yogyakarta sebagai upaya memajukan bangsa dan Islam untuk menjadi rahmat. Taman pustaka dengan logo matahari, kapal, dan daun yang tumbuh ini menjadi kesadaran baru penggiat literasi di kalangan Muhammadiyah dan serta berbagai individu yang memiliki komitmen kebudayaan unggul, terbuka dan maju.

HM Mokhtar sebelum dilantik sebagai pengurus bagian pustaka, beliau menyampaikan pernyataan yang monumental:

> "Hoofd Bestuur Muhammadiyah Bahagian Taman Pustaka akan bersungguh-sungguh berusaha menyiarkan agama Islam yang secara Muhammadiyah kepada umum, yaitu dengan selebaran cuma-cuma, atau dengan Majalah bulanan berkala, atau tengah bulanan baik yang dengan cuma cuma maupun dengan berlangganan; dan dengan buku agama Islam baik yang prodeo tanpa beli, maupun dijual yang sedapat mungkin dengan harga murah. Dan majalah-majalah dan buku-buku selebaran yang diterbitkan oleh Taman Pustaka, harus yang mengandung pelajaran dan pendidikan Islam, ditulis dengan tulisan dan bahasa yang dimengerti oleh yang dimaksud. Bahagian Taman

Pustaka hendak membangun dan membina gedung TAMAN PUSTAKA untuk umum, di mana-mana tempat dipandang perlu. Taman Pembacaan itu tidak hanya menyediakan buku-buku yang mengandung pelajaran Islam saja, tetapi juga disediakan buku-buku yang berfaedah dengan membawa ilmu pengetahuan yang berguna bagi kemajuan masyarakat bangsa dan negara yang tidak bertentangan kepada agama terutama agama Islam."(*Ensiklopedia Muhammadiyah*, 2005:308-309)

Dhuafa bukan hanya urusan ekonomi tetapi juga asupan gizi otak. Keberadaan mustadh'afin intelektual dan anti pengetahuan menyebabkan kerusakan yang tak terperikan. KH Ahmad Dahlan pernah mengingatkan, dalam urusan agama juga perlu akal sehat dan suci di dalam berinteraksi dengan kehidupan dan keragaman yang merupakan fitrah manusia: "Kita itu boleh punya prinsip, asal jangan fanatik karena fanatik itu ciri orang bodoh. Sebagai orang Islam kita harus tunjukkan kalau kita bisa bekerja sama pada Siapa pun, asal "lakum dinukum waliyadin", agamamu agamamu, agamaku agamaku."

Pasca reformasi, nalar damai Muhammadiyah begitu banyak diapresiasi bahkan oleh buku terbaru karya tim peneliti UGM yang diberikan judul, Dua Menyemai Damai: Peran dan Konstribusi Muhammadiyah dan NU dalam perdamaian dan Demokrasi yang baru dirilis tahun 2019. Bahkan, Prof Robert W Hefner dari Amerika menceritakan wacana nobel perdamaian untuk Muhammadiyah. Bagaimana intoleransi dan pendewaan terhadap prasangka dan anti dialog kompatibel dengan ini semua? Seorang teman mengirimkan pesan kepada saya, "Perlu banyak kegiatan

literasi untuk barisan pengamanan (baca: Kokam) dan saya pun merasa itu sebuah urgensi agar nalar nalar 'premanisme' anti dialog dapat diredam dan lebih jernih lagi interaksi sosialnya. Kualitas Iman, kualitas ibadah, dan kualitas akhak sosial (kesalehan sosial) juga dapat dipupuk dengan pembangunan habitus literasi yang tangguh." Saya kira, gerakan literasi di Muhammadiyah semakin tumbuh segar, ruang-ruang aktualisais di sekolah, masjid, penerbitan (SM), PTM harus bergerak bersama untuk melipatgandakan daya literasi ini untuk perbaikan struktur kehidupan yang lebih berkeadilan. Termasuk juga, daya literasi kader ini yang akan menjaga keutuhan Muhammadiyah dan juga meluruskan kiblat bangsa.

Dalam pernyataan yang reflektif, sangat apik narasi Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang mengatakan bahwa empat pilar gerakan Muhammadiyah itu adalah Pendidikan, PKO (Rumah sakit), literasi, pemberdayaan masyarakat. Saya kira, pilar ini jangan sampai runtuh salah satunya dan literasi, gerakan serikat taman pustaka dan ribuan simpulnya bersama Suara Muhammadiyah harus semakin sinergis untuk merayakan zaman pengetahuan bergerak ini agar kapal besar bangsa ini tidak dilibas zaman yang semakin *nir*-keadaban.

Menggembirakan dakwah literasi itu nalar tercerahkan. Kita gembira, kini ada ratusan simpul pegiat literasi di Muhammadiyah yang aktif menggerakkan buku di jalanan, masjid, halaman sekolah, alun-alun, dengan kendaraan bermotor dan sepeda, dengan rangsel, dan juga bergerak dari lapak pengajian ke pengajian. Di Sorong Papua Barat, Rumah Baca Mahardhika sebagai maha

karya aktifis Muhammadiyah dan UMY telah disemai menjadi wahana pendidikan yang luar biasa dampaknya bagi kesadaran pengetahuan. Perpustakaan umum di lingkungan Persyarikatan (Muhammadiyah Kudus pernah punya "Perpustakaan Rakyat") mempunyai karakter (1) inklusif artinya tidak punya tendensi ruang baca-belajar ini hanyalah untuk anggota Muhammadiyah semata; (2) aksesibel yang artinya bacaan dapat diperoleh secara murah/gratis bahkan cuma-cuma. Dalam zaman sekarang ini sudah banyak tumbuh perpustakaan komunitas yang suka berbagi bahan bacaan secara gratis bahkan tanpa syarat.

Kerja-kerja sunyi, terkadang ramai ini, adalah kerja kebudayaan yang teramat berat membutuhkan energi berlimpa yang harus dapat diperbaharui—jika tidak akan layu dan mati di makan sejarah yang semakin purbawi. Pengetahuan adalah kunci, buku buku adalah pengubah takdir orang orang dan juga sebuah bangsa. Begitu kira-kira pesan untuk kita semua.. Jika Muhammadiyah mau hidup pada zaman-zaman di masa depan maka pergerakan pengetahuan dan kapasitas intelektual untuk menanggulangi problem aktual adalah sebuah keniscayaan.

Gerakan taman pustaka pun diharapkan disemai di abad kedua ini dan mengupayakan gerakan transformasi dengan radikalisasi gerakan literasi untuk membangun ekosistem masyarakat yang berilmu, diterangi pengetahuan, dan diberdayakan oleh akal jernih yang dapat membangun kehidupan berbangsa yang lebih adil, beradab, dan sejahtera batin dan lahirnya.[]

TA'AWUN UNTUK NEGERI
Perspektif Bahasa dan Peradaban

—Hasnan Bachtiar

SELAMAT Milad yang ke-106 untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Tema yang diangkat pada agenda penting kali ini adalah, "Ta'awun untuk Negeri". Tema ini cocok sekali, terutama karena negeri tercinta ini sedang berhadapan dengan isu-isu besar. Seperti misalnya, pertarungan politik global, perkembangan sains dan teknologi yang pesat sekali, Pemilihan Umum 2019 dan munculnya generasi milenial 4.0.

Isu-isu tersebut adalah isu-isu yang khas, bersifat serba baru, futuristik dan mencerminkan kemutakhiran. Isu-isu yang demikian, biasanya harus dihadapi oleh lawan yang setimbang. Yakni peradaban besar, kebudayaan yang utama, organisasi yang kuat (seperti Muhammadiyah ini) dan orang-orang yang memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi.

Ada pertanyaan penting yang berkaitan dengan kompleksitas historis, sosial, politik dan kebudayaan. Mengapa Muham-

madiyah memakai istilah *ta'awun* dan bukan gotong-royong, atau koperasi (kooperasi), atau kolaborasi, atau kerja sama?

Jawabannya barangkali bisa ditebak. Muhammadiyah memakai istilah *ta'awun* yang berbahasa Arab, mungkin karena sebagai organisasi Islam, ingin memantapkan keyakinan dan suasana psikologis kaum Muslim. Sehingga, mereka memahami bahwa hal ini bermuatan nilai-nilai agama. Di samping itu, di dalam Al-Qur'an sendiri, *ta'awun* disinggung dalam Surah al-Ma'idah ayat 2, "…dan tolong-menolonglah (*ta'awun*) dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan."

Kalau kita berusaha merenungkan hal ini, terutama secara historis dan lebih reflektif, sebenarnya konsep *ta'awun* ini konsep "kuno". Jangan keliru membedakan antara yang kuno dan usang. Keduanya adalah hal yang sama sekali berbeda. Justru mengenai hal tertentu, "yang kuno" adalah hal yang terus-menerus bersifat mutakhir, memperbaiki dirinya secara dinamis dan mengandung muatan nilai yang abadi.

Banyak orang percaya bahwa, salah satu konsep kebajikan terbaik ini sudah berlaku berabad-abad lamanya. Bahkan, berusia sama dengan proses pewahyuan itu sendiri (sekitar paruh pertama abad ke 7). Barangkali juga, lebih tua dari prakiraan ini. Artinya, *ta'awun* itu adalah bagian dari konsep yang hidup beriringan dengan tumbuh dan berkembangnya peradaban besar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, *taa'wun* adalah konsep kunci yang diperlukan komunitas Muslim awal, untuk menghadapi pelbagai tantangan yang besar. Terutama tatkala harus menyele-

saikan masalah konflik atas dasar perbedaan identitas kesukuan (*ashabiyyah*). Piagam Madinah yang dideklarasikan oleh Nabi Muhammad Saw., adalah salah satu representasi dari konsep ta'awun ini dalam praksis kehidupan politik masa lalu.

Di samping itu, di dalam tradisi adab yang mewarnai tiga imperium besar: Turki Utsmani, Safawi (Iran) dan Mughal (India), konsep ini juga tergambar jelas di dalam kitab-kitab utama kerajaan (*Nasehatname*). Fungsi konsep ini di dalam kitab-kitab utama juga sama, yakni menekankan pentingnya persaudaraan dan mengatasi masalah-masalah yang besar yang bisa timbul karena adanya fragmentasi sosial di dalam masyarakat.

Sementara itu, dalam istilah yang lebih modern (lebih tepatnya kebarat-baratan), *ta'awun* bermakna dua hal: kooperasi dan kolaborasi. Keduanya sebenarnya berasal dari bahasa Inggris *cooperation* dan *collaboration*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kerja sama. Kata yang pertama, kooperasi (Latin. *cooperari*), memiliki akar historis yang lebih tua, sekitar akhir abad pertengahan Eropa dan istilah ini berkembang pesat di Prancis pada abad ke-20. Sedangkan kolaborasi (Latin. *collaborare*), muncul pada pertengahan abad ke-19 dan jamak digunakan di seluruh benua Eropa pada abad ke-21.

Kalau melihat rentang waktu prakiraan kemunculan dan penggunaan kedua kata kooperasi dan kolaborasi ini, maka sebenarnya usianya tergolong cukup muda. Yakni, setua usia peradaban Barat (Eropa dan Amerika) itu sendiri yang tidak lebih dari tiga abad saja. Dengan demikian, kendati secara relatif memiliki substansi nilai yang selaras dengan konsep *ta'awun*, namun tidak

sekuno, selama, dan sebegitu-kuatnya bertahan menghadapi gelombang zaman berabad-abad lamanya. Terlebih bahwa, penekanan di dalam konsep *ta'awun*, adalah bekerja-bersama atas dasar takwa. Tentu saja bukan bermaksud untuk mengklaim bahwa kooperasi dan kolaborasi tidak mengandung muatan nilai teologis tertentu, namun sebenarnya, warna teologis *ta'awun* lebih kuat ketimbang konsep lainnya.

Sementara itu, untuk menyebut istilah kerja sama, kita mengenal konsep "gotong-royong" yang berasal dari Jawa. Akan tetapi, tatkala Koentjoroningrat berdisuksi dengan Zoetmulder, disimpulkan bahwa, istilah ini belum pernah ditemukan di seluruh naskah kesusasteraan Jawa Kuno, naskah Jawa Madya dan naskah Jawa Baru (*Kakawin*, *Kidung*, *Babad*, *Serat,* dan seterusnya) (Koentjoroningrat, 2004). Sebaliknya, Notoatmojo menyatakan bahwa, istilah itu sudah dipakai sejak sebelum 2000 SM, dengan pelbagai ragam istilah Nusantara yang kaya (Sitio dan Tamba, 2001). Apa yang disinggung Notoatmojo adalah praktik kelisanan dan konsep kultural yang dipakai oleh pelbagai suku di seantero Nusantara.

Sebenarnya, "gotong-royong" dan pelbagai istilah lain di Nusantara yang memiliki makna yang serupa dengannya, secara historis lebih tua dari istilah *ta'awun*. Tidak dapat disangkal pula bahwa, kebudayaan dan peradaban Jawa kuno-terutama sebelum terpengaruh oleh Hindu dan Buddha—telah mengenal konsep teologis Kapitayan yang menegaskan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja kita kesulitan melacak warisan tertulis mengenai agama Jawa kuno ini. Atau barangkali, mereka belum

mengenal kebudayaan tulisan? Di sinilah letak perbedaannya dengan konsep *ta'awun*. Secara jelas, kitab suci Al-Qur'an telah mengakomodirnya sebagai salah satu konsep dalam episode kehidupan manusia. Konsep ini tercatat, terbukukan dan yang memudahkan bagi kita semua, kita meyakininya sebagai bagian dari wahyu agama Islam.

Sebagai *ikhtitam* dari tulisan ini, di antara pelbagai konsep yang ada, *ta'awun* dianggap lebih utama. Meskipun setiap istilah atau konsep tertentu merupakan cerminan dari nilai kebudayaan dan peradaban, tidak dapat dibenarkan fanatisme terhadap istilah tertentu. Yang terpenting dari ini semua adalah substansi di balik konsep yang ditawarkan. Terlebih penting lagi adalah bagaimana mengejawantahkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menerangi akal budi dan perilaku kita sendiri.

Lantas, siapkah kita umat Islam, terutama warga Muhammadiyah untuk bekerja sama, bergotong-royong, berkooperasi, berkolaborasi dan akhirnya, berta'awun secara gembira, terutama dalam rangka membangun peradaban Indonesia yang berkemajuan? Itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, sejak hari ini, dan dengan akal dan hati yang suci. Bismillah![]

TA'AWUN DAN PENDIDIKAN BERKEMAJUAN

—Benni Setiawan

TA'AWUN untuk negeri menjadi tema milad ke-106 Muhammadiyah tahun ini. Organisasi massa terbesar di RI ini kembali meneguhkan fungsi dan perannya dalam membangun keindonesiaan. Muhammadiyah tetap berkomitmen membantu (tolong-menolong, *ta'awun*) negeri Indonesia menuju keadilan dan kesejahteraan.

Komitmen kuat itu tergambar sejak Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi ini di Yogyakarta pada 18 November 1912. Kyai Dahlan menawarkan formula teologi amal saleh berdasar surat *al-Maun* dan *al-Ashr* dalam mengurai problem zaman saat itu.

Teologi amal saleh—kepekaan terhadap realitas sosial—menjadi mantra Kyai Dahlan membangun Muhammadiyah. Berbekal spirit itulah, kemudian Kyai Dahlan membangun basis pelayanan sosial dengan Roemah Miskin, pelayanan kesehatan dengan Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), dan basis pen-

cerdasan kehidupan bangsa dengan membangun pendidikan (sekolah). Pendidikan menjadi kekuatan Muhammadiyah hingga saat ini.

Pendidikan Berkemajuan

Pendidikan Muhammadiyah telah berjejaring mulai tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Tercatat pada 2015, Muhammadiyah telah memiliki 4.623 taman kanak-kanak/bustanul athfal, 2.604 SD/MI, 1.772 SMP/MTS, 1.143 SMA/MA/SMK, 67 pondok pesantren (Ponpes), dan 177 Perguruan Tinggi (PT). Lembaga pendidikan itu tersebar dari Sabang hingga Merauke. Lembaga itu dikelola mulai Pimpinan Ranting Muhammadiyah hingga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Pendidikan Muhammadiyah terus berkembang. Muhammadiyah telah merintis Pusat Pendidikan Muhammadiyah di Melbourne Australia dan PT Muhammadiyah di Malaysia. Dua hal itu, bukti Muhammadiyah terus bergerak menyapa umat dan berkemajuan. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana sekolah Muhammadiyah bisa berjejaring dan kuat hingga saat ini? Tentu semua itu butuh kerja keras dan spirit pendidikan Muhammadiyah yang telah dirintis Kyai Dahlan.

Dalam proses kreatif itu, Kyai Dahlan menegaskan, setidaknya ada tiga pilar pendidikan berkemajuan. Menurut Mohamad Ali (2017), ketiga pilar itu tergambar dalam pernyataan Kyai Dahlan yang terangkum dalam kecerdasan akal, pengalaman, dan berkemajuan.

Kecerdasan akal merupakan hal yang utama dalam pendidikan berkemajuan. Pendidikan dengan bekal ilmu pengetahuan berfungsi membesarkan dan menyehatkan akal. Kyai Dahlan sangat menghargai kecerdasan karena ia merupakan alat manusia untuk memajukan kehidupan.

Pengalaman dalam pendidikan menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu dikarenakan praktik pendidikan harus berangkat dari pengalaman anak (peserta didik). Peserta didik, mengalami langsung prosesnya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas amal/tindakan ketika menapaki pengaman baru.

Pendidikan minus pengalaman, tidak bisa lagi disebut sebagai pendidikan. Kyai Dahlan selalu menekankan tidak berpindah ke teori baru sebelum teori sebelumnya diamalkan oleh murid-muridnya. Melalui hal itu terjadi hubungan organis antara pendidikan dan pengamalan. Sebuah sinergi yang semakin menguatkan bangunan pendidikan.

Pilar kemajuan menjadi penyokong berikutnya. Pendidikan harus berorientasi pada kemajuan, pada pertumbuhan ke arah yang lebih baik dan manusiawi. Kecerdasan akal dan pola-pola pengalaman yang diperoleh dari proses pendidikan itu terus ditumbuhkembangkan melalui interaksi dalam kehidupan masyarakat (Mohamad Ali, 2017).

Makna kemajuan sendiri pada dasarnya sudah lama ada dalam perbincangan Muhammadiyah. Statuten 1912 menyebutkan, tujuan Muhammadiyah yang menjadi dasar tujuan pendidikan Muhammadiyah ialah '...memajoekan hal agama kepada anggauta-anggautanja'.

Kemajuan dan berkemajuan seakan lekat dengan Muhammadiyah. Berkemajuan berarti membawa ke arah keadaban. Persyarikatan Muhammadiyah ingin memajukan kehidupan bangsa, salah satunya dengan pendidikan.

Melalui proses pendidikan yang tangguh itulah Muhammadiyah telah melahirkan generasi hebat. Tidak mengherankan jika Kuntowijoyo (1985) menyatakan, tanpa Muhammadiyah, tidak dapat dibayangkan adanya kelompok terpelajar yang sanggup hidup di tengah-tengah peradaban modern tanpa terpecah kepribadian dan imannya.

Ta'awun, Al-Ashr dan Al-Maun

Pendidikan Muhammadiyah mendorong seseorang memiliki kecerdasan akal. Kecerdasan akal membimbing manusia memiliki pribadi utuh. Kecerdasan akal membebaskan manusia dari kungkungan primordialisme. Kecerdasan akal mengarahkan kehidupan manusia menuju homo homini socius.

Praktik kehidupan homo homini socius semakin bermakna saat teori tidak sekadar dihafal peserta didik. Teori perlu dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kyai Dahlan mengajarkan bahwa pengajaran surat Al-Ashr (hanya tiga ayat) diulang hingga delapan bulan dan Al-Maun (tujuh ayat) diajarkan berulang sampai tiga bulan.

Tentu Kyai Dahlan punya maksud agar murid-muridnya tidak sekadar hafal dan paham dua surat itu. Namun, Kyai Dahlan mendorong murid-muridnya untuk mempraktikkan apa yang ada di surat Al-Ashr dan Al-Maun.

Dalam konteks surat Al-Maun, misalnya, lahirnya kegiatan aksi sosial seperti Roemah Miskin. Sebuah kelompok umat yang mengorganisasi kaum miskin kota kala itu. Roemah Miskin menjadi tonggak bagi pengalaman penyantunan terhadap fakir miskin. Demikian pula dengan spirit Al-Ashr, lahirlah gerakan amal saleh berupa sekolah dan rumah sakit.

Pendidikan hari ini selayaknya berorientasi pada proses pemahaman yang holistis. Artinya, peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga perlu mempraktikkan teori yang ada. Jika pendidikan di RI mampu seperti itu, akan lahir semakin banyak teori dari model pengembangan dan praktik yang dilakukan peserta didik.

Peserta didik pun akan semakin tertantang terus belajar. Pasalnya, mereka mempunyai keluasan mengembangkan apa yang mereka pahami dalam teks. Mereka pun menjadi pribadi mandiri. Pasalnya, mereka belajar dari praktik nyata yang dipahami dari berbagai teori yang muncul.

Saat kecerdasan akal dan pembiasan pengalaman dalam pendidikan berjalan, pendidikan RI akan menemukan spirit berkemajuan. Pendidikan Indonesia akan mampu melampaui tradisi pendidikan Barat. Kiblat pendidikan pun tidak akan menjadi dominasi Barat, tetapi lahir dari pemikiran dan kerja nyata ilmuwan Tanah Air.

Pada akhirnya, spirit pendidikan berkemajuan telah lama ada dalam rahim Muhammadiyah. Muhammadiyah telah dan terus berkhidmat untuk kemajuan bangsa dan negara. Saatnya kembali menoleh dan menengok khazanah pemikiran Nusantara untuk

memajukan kebangsaan dan kenegaraan RI. Selamat milad ke-106 Muhammadiyah. Semoga terus menyinari negeri (Sumber: *Media Indonesia,* 19/11/2018).[]

PENDIDIKAN YANG BERKEMAJUAN

—Arif Jamali Muis

JIKA siswa dan orang tua siswa ditanya tentang harapan pada pendidikan (sekolah) jawabannya hampir sama masa depan yang lebih baik. Cita-cita masa depan yang cerah ditumpahkan ke lembaga pendidikan, artinya lembaga pendidikan harus menyiapkan segala perangkat agar peserta didik siap menghadapi masa depan. Pertanyaannya kemudian muncul apakah sekolah-sekolah kita sudah menerawang ke depan sehingga dapat menyiapkan perangkat apa yang dibutuhkan peserta didik untuk dapat hidup di masa yang akan datang, jangan-jangan apa yang diajarkan oleh para guru bukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan peserta didik di masa yang akan datang.

Pendidikan harus dirancang untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat hidup dengan baik di masa yang akan datang, di sinilah kita membutuhkan konsep pendidikan yang berkemajuan, yang mampu menganalisis dengan tepat kondisi masyarakat

di masa depan, dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapinya.

Pendidikan Abad 21

Assosiasi Administrator Sekolah Amerika mencoba menjawab tantang pendidikan masa depan, studi ini memusatkan pada pengetahuan, keterampilan, dan perilaku siswa yang harus dikuasai siswa untuk dapat hidup di masyarakat abad 21. Studi yang dilakukan selama 2 tahun telah menghasilkan laporan setebal 74 halaman yang diberi judul *Preparing Students for the 21 Century,* senada dengan laporan tersebut dalam dokumen Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerjemahkan nawacita Presiden Jokowi, menjelaskan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh anak Indonesia dengan konten utamanya Pancasila. Dalam dua dokumen tersebut ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian lembaga pendidik dalam menyiapkan peserta didik.

Pertama pendidikan (sekolah) harus mengajarkan kepada peserta didik cara berfikir kritis dan analitis (*Critical thingking).* Sekolah harus memastikan proses pembelajaran di sekolah menanamkan siswa untuk dapat mengaitkan berbagai variabel, menganalisanya dan mempunyai keberanian untuk mengambil kesimpulan. Model pembelajaran yang hanya mengandalkan hafalan dan indoktrinasi harus mulai ditinggalkan diganti dengan cara berfikir kritis dan analisis. Model soal yang menerapkan *higher order thingking skill* (HOTS) mulai diperkenalkan kepada peserta didik. Model pembelajaran yang menerapkan cara ber-

fikir kritis dan analitis mengembangkan potensi untuk menerapkan pengetahuan untuk bernalar dan melakukan refleksi dalam penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, serta pengembangan inovasi.

Kedua Kreatif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengajarkan peserta didik untuk berfikir kreatif, tidak linier. Peserta didik diajarkan untuk menjawab pertanyaan dengan berbagai cara dan alternatif, guru berposisi sebagai fasilitator bukan pemegang tunggal kebenaran di dalam kelas. Di sisi lain peserta didik juga harus diajarkan menciptakan sesuatu (inovasi), tidak hanya mencatat dan menerima apa saja dari guru, apa pun hasil karya siswa dihargai sebagai sebuah inovasi.

Ketiga Kolaborasi. Pendidikan harus mulai berorientasi pada kolaborasi, membangun kerja sama antar siswa. Kompitisi yang selama ini menjadi paradigma berfikir guru dan masyarakat dengan bentuk perangkingan di sekolah harus mulai dikurangi dan digantikan dengan kolaborasi (kerja sama), pembelajaran di kelas harus mulai menerapkan *collaborative and cooperative teaching and learning*. Kerja dalam kelompok, membagi tugas, melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien saling menghargai adalah sikap-sikap yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam menghadapi abad 21.

Keempat komunikasi. Kemampuan berkomunikasi merupakan kemampuan penting dalam mempersiapkan peserta didik memasuki abad 21 ini. Model pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas, menceritakan kembali apa yang dibaca adalah salah satu cara

untuk mengasah kemampuan berkomunikasi peserta didik. Kemampuan berkomunikasi jika kita perluas—mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila—tidak hanya mencakup kemampuan menulis, membaca dan kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan untuk bernegosiasi dan memecahkan konflik, serta kemampuan mengembangkan hubungan antar manusia dan kelompok.

Empat kemampuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup di abad 21 ini, sudah termaktub dalam dokumen Pendidikan Karakter Kemendikbud, hanya persoalan terbesar bagaimana mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran di sekolah, Di sinilah sesungguhnya letak peran guru menjadi penting.

Peran Penting Guru

Guru adalah kunci kesuksesan pendidikan, sarana boleh terbatas, fasilitas pendidikan mungkin pas-pasan, tapi itu semua tidak menjadi penghambat jika berada di tangan guru yang professional. Gurulah kunci untuk menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Guru harus dapat dengan tepat memprediksi kemampuan yang dibutuhkan peserta didik di masa yang akan datang, untuk itu sekolah-sekolah dalam lingkup kecil dan kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam lingkup yang lebih besar harus dapat menyiapkan guru-guru yang cerdas, profesional, punya kemampuan mengajar dan mendidik yang dibutuhkan oleh peserta didik. Para guru harus punya kesadaran tinggi untuk meningkatkan kemampuannya, salah satu nya dengan memba-

ca berbagai literatur, agak sulit dibayangkan guru dapat menerawang masa depan, menemukan metode baru, memotivasi peserta didik jika tidak membaca buku. Gerakan literasi di sekolah saya kira tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi juga untuk para guru, walau tidak mempunyai data yang valid tapi saya menduga tingkat membaca di kalangan para guru masih rendah, dibutuhkan kemauan yang tinggi dari dalam diri guru, disisi lain kebijakan kementerian pendidikan terhadap guru juga perlu dievaluasi, banyaknya syarat administrasi yang harus dibuat guru menyebabkan sebagian guru terkonsentrasi pada penyiapan administrasi tinimbang meningkatkan kemampuan mengajar di dalam kelas. Keinginan menteri pendidikan dan kebudayaan Prof Muhajir Effendi untuk memberdayakan guru dan memangkas pekerjaan administrasi guru termasuk beban mengajar guru perlu diapresiasi tinggi, tidak gampang memang tetapi bukan berarti tidak mungkin. Memperbaiki kualitas guru-guru tidak hanya pada tataran administrasi saja tetapi lebih pada substansi sehingga keinginan untuk mewujudkan pendidikan yang berkemajuan untuk menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman akan terwujud. *Walau'alam Bishowab* (Sumber: *Republika,* 29/11/2017).[]

IHWAL GERAKAN ISLAM PROGRESIF DI SURAKARTA

—Mohamad Ali

SURAT Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 218/ Kep./1.0/B/2017 menetapkan Jawa Tengah tuan rumah dan kota Surakarta sebagai tempat penyelenggaraan muktamar ke-48 tahun 2020. Sebagai pemanasan menuju muktamar, puncak resepsi milad Muhammadiyah nasional ke-106 pada 18 November 2018 dilangsungkan di Surakarta, bertempat di Pura Mangkunegaran. Pemilihan Mangkunegaran sangat tepat, karena memiliki jejak sejarah sekaligus kontribusi besar dalam proses awal pertumbuhan Muhammadiyah di kota ini.

Sedikit menengok ke belakang, kota Surakarta telah dua kali menjadi tuan rumah perhelatan muktamar Muhammadiyah, yaitu Kongres ke-18 pada tahun 1929 dan muktamar ke-41 di tahun 1985. Dengan demikian, penyelenggaraan muktamar ke-48 mendatang adalah kali ketiga. Seperti diketahui, muktamar ke-41 diprediksi akan berlangsung alot. Sebab, membicarakan isu politik panas, yaitu asas tunggal. Ternyata prediksi itu meleset, suasa-

na muktamar berjalan sejuk dan muktamirin memutuskan menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

Diteropong dari sudut paralelisme sejarah, situasi menjelang muktamar ke-41 dan ke-48 ada kemiripan, yaitu suhu politik bangsa tengah memanas. Saat ini dan puncaknya tahun 2019 adalah tahun-tahun politik yang rumit dan kompleks. Muhammadiyah sebagai tenda bangsa harus memainkan politik kebangsaan, bukan politik partisan. Peran demikian tidak mudah. Para kritikus akan buru-buru menilai bahwa, sikap politik Muhammadiyah ambivalen.

Untuk memahami proses pergumulan Islam dengan aktualitas kehidupan sosial-politik, suatu tinjauan selintas tentang ihwal kelahiran Muhammadiyah Surakarta beserta lika-liku yang menyertainya, dapat menjadi cermin dan pelajaran berharga untuk generasi saat ini. Berikut ini direkonstruksi sejarah gerakan sosial Islam progresif di Surakarta di perguliran abad ke-20.

Sejarah pergerakan Islam di Surakarta pada perguliran abad ke-20 merupakan laboratorim sosial yang amat kaya. Meskipun telah diteliti oleh analis sosial maupun sejarawan, tetap saja ada sisi-sisi yang belum terungkap secara jelas. Untuk menyebut beberapa karya terpenting antara lain, George D. Larson (1990), Hermanu Joebagio (2010), dan Darsiti Soeratman (1989) yang mengangkat pergolakan sosial dan kehidupan kraton. Adapun tema gerakan sosial Islam dikaji oleh Takashi Shiraisi (2005) dan A.P.E. Korver (1985).

Ketika gerakan reformasi Islam meluas ke kota Surakarta ternyata menampilkan gejala unik dan berbeda dengan daerah

lain. Secara umum, ketika gerakan reformasi Islam hadir di suatu daerah, segera muncul gerakan perlawanan dari kaum Islam tradisional. Aksi melahirkan reaksi, sehingga di mana-mana terjadi pertentangan antara kaum reformis (kaum muda) berhadapan dengan kaum tradisionalis (kaum tua). Pola umum itu tidak berlaku di Surakarta. Perluasan gerakan reformasi Islam justru bertatapan dengan golongan kiri dan kaum mistik Islam kejawen.

Tiga poros gerakan

Seperti diketahui, persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923) di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912, dengan tujuan: (1) memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam, dan (2) memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam. Dari awal kelahiran hingga tahun 1917 ruang gerak Muhammadiyah masih terbatas di residensi Yogyakarta.

Setelah tahun 1917 gerak dakwah Muhammadiyah mulai meluas dan menyebar ke luar Yogyakarta, salah satunya wilayah yang sejak awal bersentuhan dengan reformisme Islam Kyai Ahmad Dahlan adalah kota Surakarta. Orang yang pertama kali memperkenalkan Kyai Ahmad Dahlan ke depan publik Surakarta adalah Mohammad Misbach (1876-1924), dikenal dengan sebutan "haji merah", melalui tabligh akbar yang berlangsung tahun 1917. Paparan dan argumantasi Islam berkemajuan (baca: progresif) Kyai Ahmad Dahlan semakin memantapkan para inisiator pengajian, dan akhirnya sepakat membentuk perkumpulan SATV (Sidiq Amanah Tabligh V(F)athanah).

Para inisiator pengajian inilah yang menjadi motor penggerak perkumpulan SATV. Misbach sebagai pemimpin dan diperkuat oleh Harsolumekso, Sontohartono, Parikrangkungan, Muchtar Buchori, Abu Toyib, Martodiharjo, Mangkutaruno, Wiryosanjoyo, Kusen, Darsosasmito, Ahmad Dasuki, dan Partowinoto. Terbentuknya perkumpulan SATV menambah semarak dan semakin memperkuat gerakan Islam progresif di Surakarta.

Yang dimaksud Islam progresif adalah suatu corak pemahaman dan gerakan Islam yang berhaluan progresif, berkemajuan dalam memperbaiki keadaan umat Islam yang terbelakang, baik melalui pendidikan, ekonomi, atau pun politik. Sebelum SATV berdiri, setidaknya telah ada dua poros Islam progresif, yaitu poros Islam Kauman digerakkan abdi dalem pangulon kraton Kasunanan (baca: santri priyayi) beserta pimpinan pesantren Jamsaren, dan poros Islam Laweyan yang dipelopori saudagar batik santri.

Kelahiran SATV melahirkan poros baru, karena pusat kegiatannya di Keprabon yaitu rumah Sontohartono dan Madrasah Ibtidaiyah Suniyah, maka bisa disebut poros Islam Keprabon, Dengan demikian gerakan Islam progresif di Surakarta pada awal abad ke-20 terdiri atas tiga poros, yaitu poros gerakan Islam Kauman, poros gerakan Islam Laweyan, dan poros gerakan Islam Keprabon.

Poros Islam Kauman dipelopori Kyai Bagus Arfah, Kyai Idris, Kyai M. Adnan, Kyai Abu Amar, Kyai Abdil Jalil, dan lain-lain yang pada tahun 1905 berhasil meyakinkan Paku Buwono X untuk mendirikan sekolah Islam tinggi yang dinamai madrasah Mamba'ul

Ulum, artinya sumber ilmu pengetahuan. Maksud didirikannya sekolah Islam tinggi ini untuk membentuk kader ulama berkemajuan yang saat itu sangat dibutuhkan untuk mengisi formasi pegawai keagamaan di seluruh wilayah Hindia-Belanda.

Ciri kemoderanan Mamba'ul Ulum terletak pada proses pembelajaran yang diselenggarakan secara klasikal dan dilakukan secara berjenjang. Terdiri atas 11 jenjang yang masing-masing jenjang ditempuh setahun, mulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Keunggulannya, lulusannya mampu membaca kitab kuning dalam bidang fikih, tafsir, hadits dan disiplin keislaman lainnya. Sebagaimana disebut di atas, staf pengajarnya adalah ulama-ulama yang mumpuni di bidangnya, dan masing-masing dari mereka memiliki perpustakaan pribadi yang lengkap.

Di sebalah lain, poros Islam Laweyan dipelopri Haji Samanhudi, M. Asmodimejo, M. Kertotaruno, M. Sumowerdoyo, dan M. Abdul Rajak yang pada tahun 1911 mendirikan Sarekat (Dagang) Islam (SDI) sebagai usaha memperkuat ekonomi dan politik kaum pribumi. Tujuan berdirinya SDI untuk memajukan kaum muslimin dan mencapai saling bantu membantu.

Ketiga poros gerakan Islam Surakarta ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Mamba'ul Ulum mampu melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh secara nasional, sebut saja Saifuddin Zuhri dan Munawir Sjadzali pernah menjadi Menteri Agama. Demikian pula gerakan SI yang mampu menyadarkan kaum pribumi untuk beremansipasi.

Sementara itu, pertumbuhan poros Islam Keprabon sedikit terganggu karena muncul pergolakan internal. Misbach mengi-

nginkan SATV menjadi gerakan politik untuk melawan kolonialis dan kapitalis melalui pemogokan maupun agitasi. Keinginan Misbach ditolak sebagian besar pimpinan, akhirnya dia mundur dari kursi ketua dan pada tahun 1919 diganti oleh seorang kyai muda yang progresif, Mukhtar Bukhari (1899-1926). Perlu ditambahkan, meski mundur dari ketua Misbach tetap menjadi anggota dan mubaligh SATV yang tangguh.

Pergolakan internal di atas bisa disebut godaan pertama untuk menarik pendulum SATV, sebagai perkumpulan pra-Muhammadiyah, ke haluan politik. Namun, percobaan itu berhasil diatasi. Di bawah nahkoda Kyai Mukhtar Bukhari, SATV tetap memilih jalan non-politik dan moderasi Islam. Setelah terkonsolidasi, pada 25 Januari 1922 Kyai Ahmad Dahlan meresmikan berdirinya Mu-

hammadiyah afdeling (cabang) Surakarta. Surat resmi penetapan berdirinya Muhammadiyah cabang Surakarta baru terbit tanggal 1 Juli 1928 yang ditanda tangani ketua Pengurus Besar Muhammadiyah saat itu, K.H. Ibrahim (1875-1934).

Demikian rekonstruksi sejarah tentang ikhwal gerakan Islam progresif di Surakarta. Meskipun Kyai Ahmad Dahlan telah berupaya keras menembus poros Islam Kauman melalui jalinan komunikasi dengan Kyai Bagus Arfah, pamannya, dan Kyai M. Adnan, namun tidak ada satu pun abdi dalem pangulon kraton Kasunanan yang tertarik untuk bergabung dengan Muhammadiyah.

Jejak-jejak kedekatan Muhammadiyah awal, justru terjalin erat dengan Pura Mangkunegaran. Jejak pertama, inspirasi kelahiran Hizbul Wathan (pandu Muhammadiyah) berawal dari pengamatan Kyai Ahmad Dahlan terhadap aktivitas kepanduan

di halaman Mangkunegaran, yang digambarkannya sebagai suatu pembelajaran di tanah lapang yang mengajarkan kedisiplinan dengan penuh kegembiraan. Hal ini senafas dengan tujuan Muhammadiyah.

Jejak kedua dapat dilihat dari dua sekolah Muhammadiyah yang sampai saat ini berdiri megah, yaitu SD Muhammadiyah 1 Ketelan dan SMA Muhammadiyah Surakarta, tanahnya merupakan hibah/wakaf dari Mangkunegaran. Sudah sejak tahun 1920 tanah itu ditempati sekolah Muhammadiyah, tapi tidak seluas sekarang. Perluasan tanah sebagaimana saat ini baru terjadi pada tahun 1941 yang diawali surat permohonan dari Muhammadiyah Surakarta pada Juli 1941 dan nota persetujuan dari Mangkunegaran tertanggal 26 Agustus 1941.

Data sejarah ini menunjukkan bahwa sejak awal Pura Mangkunegaran memberikan dukungan penuh atas aktivitas Muhammadiyah. Oleh karena itu, resepsi milad Muhammadiyah ke-106 di Pura Mangkunegaran sangat bersejarah dan harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali identitas persyarikatan Muhammadiyah sebagai benteng Islam progresif-berkemajuan (Sumber: *Solopos,* 17/11/2018).[]
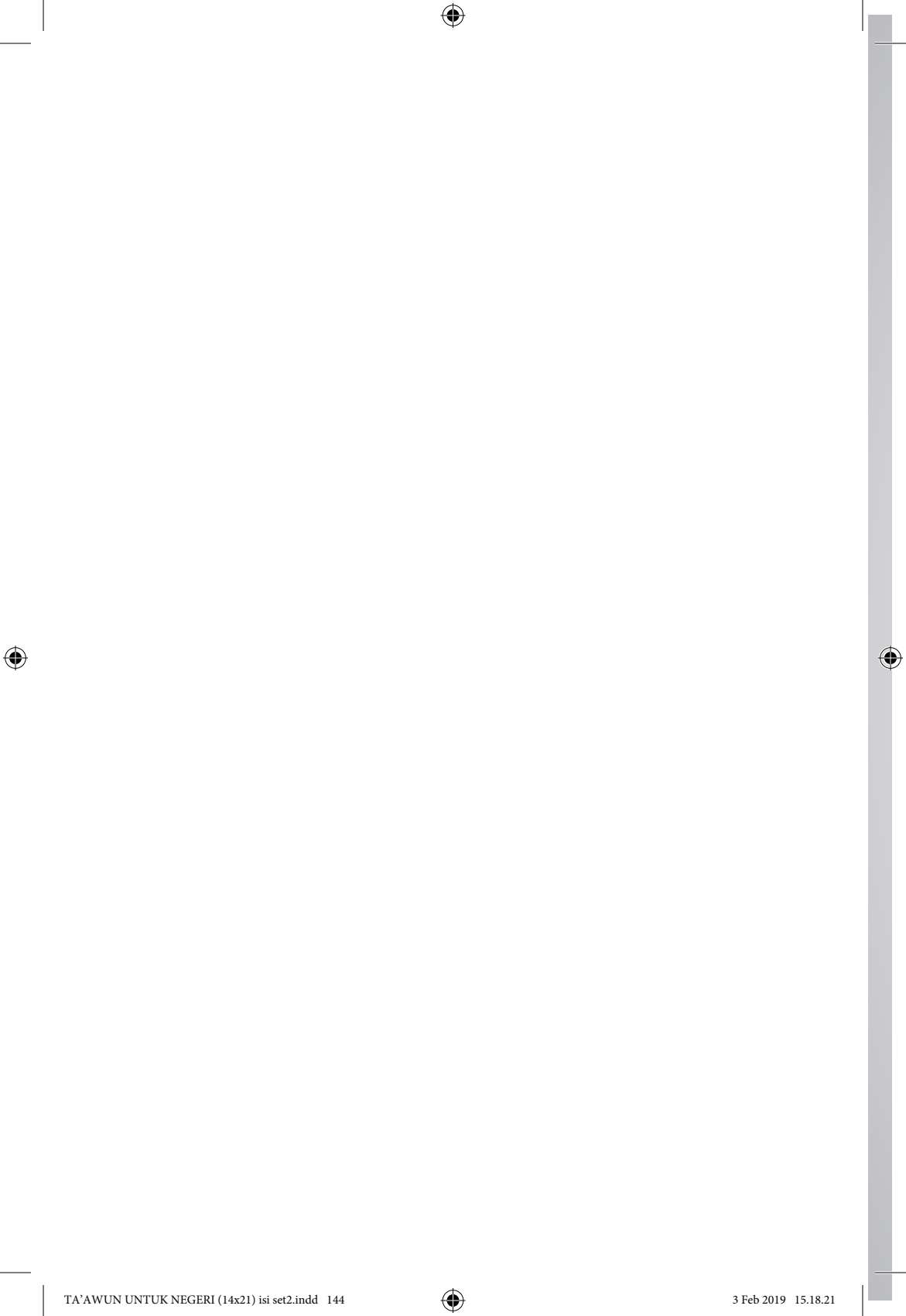
4

Ta'awun Kemanusiaan

MUHAMMADIYAH

Narasi Penolong Kesengsaraan Umum

—Bachtiar Dwi Kurniawan

MUHAMMADIYAH diawal berdirinya sangat kuat sebagai gerakan sosial. Hal itu bisa dilihat dari aksi kepeloporan sosial kemasyarakatan yang dilakukan Muhammadiyah kala itu dengan menyantuni fakir-miskin, gelandangan, yatim-piatu, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang gratis kepada semua lapisan masyarakat, menampung orang miskin dalam rumah miskin dengan memberikan latihan kerja, memberikan pertolongan kemanusiaan (humanitarian rescue) kepada korban letusan Gunung Kelud dan kebakaran di Yogayakarta dan lain sebagainya. Muhammadiyah lahir dengan setting kemiskinan masyarakat Indonesia (dulu Hindia-Belanda) lengkap dengan kompleksitas permasalahan turunannya.

Pada awal berdiri Muhammadiyah itulah, aksi-aksi pemberdayaan meminjam bahasa yang dipakai saat itu adalah Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) dilancarkan. Seiring dengan

berjalannya waktu, dengan semakin berkembangnya organisasi Muhammadiyah dan amal usahanya, praksis PKO mengalami penyempitan peran yang hanya dibatasi pada bidang layanan kesehatan yang kita kenal dengan Pembina Kesejahteraan Umum (PKU). Dalam perkembangannya, semakin ke sini proses pemberdayaan masyarakat berlangsung hanya di seputaran lingkup amal usaha dan sekitarnya, tidak lagi menjadi gerakan masif yang terstruktur dengan baik.

Sejak saat itulah, Muhammadiyah mulai terasing dan tercerabut dari identitas sosial autentiknya sebagai penolong kesengsaraan umum. Muhammadiyah disibukkan dengan rutinitas birokrasi organisasi dan berkembangnya amal usaha yang semakin membesar sehingga perhatian pada masalah kemiskinan dan penderitaan masyarakat sedikit banyak kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Krisis ekonomi 1998 yang berdampak pada meluaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat, seolah menjadi triger kesadaran Muhammadiyah untuk kembali kepada nalar autentiknya sebagai pembela kelompok miskin. Mulai muktamar Muhammadiyah ke 44 tahun 2000 di Jakarta, muncul kesadaran kolektif bahwa Muhammadiyah harus hadir kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan menjadi penolong dan pemecah persoalan masyarakat secara langsung.

Al-Ma'un dan Tauhid Sosial

Komitmen keberpihakan Muhammadiyah dalam konteks kekini-an bisa kita lacak dalam tradisi pemikiran Muhammadiyah mela-lui tokoh-tokoh Muhammadiyah. Diantara tokoh Muhammadiyah yang punya komitmen keberpihakan yang kuat tersebut dianta-ranya adalah Amien Rais yang terkenal dengan Tauhid Sosialnya. Melalui bukunya *Tauhid Sosial: formula menggempur kesenjangan* Amien sangat keras melakukan kritik sosial terhadap ketimpang-an yang terjadi di masyarakat. Kritik sosial yang dilakukan oleh pak Amien berangkat dari titik pusat kesadaran beragama yaitu tauhid.

Bagi Amien, tauhid menuntut ditegakkannya keadilan sosial, karena dilihat dari kacamata tauhid segala gejala eksploitasi ma-nusia atas manusia merupakan pengingkaran terhadap persama-an derajat di hadapan Allah. Jurang yang menganga lebar antara lapisan kaya dan lapisan miskin dan kehidupan yang eksploitatif merupakan fenomena yang anti tauhid.

Nurcholis Madjid (1992) dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban menjelaskan bahwa Kalimat tauhid sebenarnya meru-pakan pembebasan dan pemerdekaan bagi manusia, tauhid me-ngandung makna pembebasan sosial. Kesanggupan orang untuk melepaskan diri dari belenggu kekuatan tirani dari luar adalah sa-lah satu pangkal efek pembebasan sosial semangat tauhid. Tau-hid menuntut adanya praktis sosial yang dimanifestadikan dalam tindakan atau aksi-aksi kongkret dan terlibat aktif dalam kehidup-an keduniaan.

Di sinilah konsep tauhid menurut Amien tidak hanya sebatas pada hubungan vertikal dengan Tuhan, melainkan juga mencakup hubungan horizontal untuk mengusahakan tegaknya keadilan sosial. Tauhid sebagai titik sentralnya merupakan bagian integral dari komitmen untuk menegakkan kebenaran, keadilan, memberantas kerusakan di muka bumi, menegakkan orde sosial yang adil, etis dan egaliteran. Umat islam selain harus meneguhkan keyakinan bertauhid melalui pemahamam akidah yang benar juga harus mempertajam tauhid melalui aksi-aksi sosial yang kongkret kepada masyarakat. melalui tauhid sosial kita bisa melihat kuatnya komitmen dan keberpihakan Amien Rais pada ketimpangan dan ketidakadilan di masyarakat.

Senyampang dengan Amien Rais, tokoh Muhammadiyah yang sangat konsern terhadap problem sosial masyarakat adalah Moeslim Abdurahman. Kang Moeslim, begitu dia biasa disapa di kalangan Muhammadiyah dalam esai-esainya yang terangkum dalam buku Islam Traansformatif (1995) sedikit banyak menuangkan kegelisahannya pada persoalan yang dia sebut sebagai orang-orang yang tersisih. Islam Transformatif merupakan teologi praksis sosial yang menerjemahkan agama sebagai alat perjuangan dan keberpihakan kepada orang miskin.

Transformasi menurut Kang Moeslim harus menjadi gerakan kemanusiaan, yang menumbuhkan kepedulian pada nasib sesama dan yang menumbuhkan aksi solidaritas. Bagi Kang Moeslim transformasi merupakan jalan yang paling manusiawi untuk mengubah sejarah melalui proses pendampingan.

Sosok yanng terakhir yang sangat kuat komitmenya terhadap orang Miskin adalah Said Tuhuleley. Seperti halnya dengan Pak Amien dan Kang Moeslim, Said Tuhuleley (Ketua MPM PP Muhammadiyah periode 2005-2010, 2010-2015) melandaskan gerakan pemberdayaan pada semangat praksisme Al-Maun. Said Tuhueley melalui MPM, mencoba menarik benang merah antara gagasan Tauhid Sosial Amien Rais dan Islam Transformatif Moeslim Abdurahman menjadi lebih praksis.

Dalam pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa akhir Desember tahun 2014 di Universitas Muhammadiyah Malang yang lalu, Said Tuhuleley memaparkan pandangannya tentang problem kemiskinan dan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Muhammadiyah yang mencoba mengurai dan mengatasi masalah kemiskinan baik yang bersifat struktural, kultural dan individual. MPM menjadikan Al-Qur`an Surat Al-Ma'un (maupun berbagai surat lainnya dalam Al-Qur`an) sebagai basis nilai yang menginspirasi gerakan pemberdayaan masyarakat. surat Al-Ma'un memberi inspirasi bagi dikembangkannya berbagai aktivitas untuk memberdayakan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan, tetapi sekaligus dengan itu mendorong juga upaya serius dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang halal dan thayib. Kalau "tidak menganjurkan memberi makan orang miskin" menjadi salah satu indikator dari para pendusta agama, maka jaminan bagi ketercukupan pangan bagi orang miskin pun menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Gerakan pemberdayaan masyarakat Muhammadiyah menemukan bentuknya secara lebih kongkret dengan berbagai rintisan model pemberdayaan. Hal tersebut nampak dalam berbagai macam langkah praksis MPM yang berlandaskan pada Jihad Keberdayaan yang mencakup lima medan Jihad, yakni Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan, Jihad Memberdayakan Sektor Informal, Jihad Memberdayakan Kaum Buruh, Jihad Advokasi Kebijakan Publik dan Jihad Memberdayakan Kaum Difabel.

Telah banyak percontohan dan kisah sukses yang ditorehkan majelis ini di dalam mengamalkan spirit Al-Maun. Sampai saat ini sudah lebih dari delapan puluh (80) kabupaten yang sudah dimasuki MPM dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang ada di Jawa maupun yang di luar Jawa. Percontohan model pertanian terpadu ini bisa dilihat mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku sampai ke Papua. Bahkan melalui kegiatan pemberdayaan ini telah berdiri dua ranting Muhammadiyah, yakni ranting Muhammadiyah di Koto Tinggi, Pariaman, Sumatera Barat dan Ranting Warmon Kokoda di Sorong Papua Barat yang pengurus dan jamaahnya suku asli Papua.

Selain pemberdayaan di sektor pertanian, MPM merintis model pemberdayaan lainya, diantaranya adalah pemberdayaan kelompok miskin kota-kelompok marjinal seperti pengayuh becak, buruh rosok, pedagang asongan, yang semuanya bisa dilihat percontohannya yang cukup berhasil di kota Yogyakarta. MPM juga memberdayakan sektor industri mikro dan kecil yang berbasis usaha rumahan berupa produk olahan hasil pertanian, produk-

produk makanan olahan ini cukup berkembang bahkan sering pameran IKM di Jakarta, solo, Yogyakarta dan Malang.

Model pemberdayaan lainnya adalah pemberdayaan penyandang disabilitas, MPM mendampingi mulai dari upaya penguatan organisasi, kecakapan hidup sampai advokasi produk Perda bagi penyandang disabilitas. Kelompok dampingan MPM bagi penyandang disabilitas bisa dilihat di Purworejo, Lendah Kulonprogo dan Ngaglik, Sleman.

Itulah sekelumit tentang kiprah MPM dalam memberdayakan masyarakat, Keberpihakan Muhammadiyah pada masyatakat miskin dan kelompok marjinal akhir-akhir ini bisa dinilai telah mengubah wajah Muhammadiyah. Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan kota yang elitis, melalui MPM Muhammadiyah punya wajah baru yakni wajah Muhammadiyah yang lebih merakyat dan populis.

Model Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah ke Depan

Meskipun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Muhammadiyah melalui MPM, sudah nampak hasilnya tetapi apa yang dilakukan oleh MPM dalam pemberdayaan masyarakat ini baru sebatas membuat model seraya mengupayakan masifikasi penerapannya di berbagai tempat. Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan MPM sudah saatnya bergeser dari pendekatan *dragon fly approach,* yakni pendekatan yang mengupayakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tetapi baru bisa meninggalkan bekas yang sangat terbatas. Ke depan gerakan pemberdayaan

masyarakat harus menggunakan pendekatan *virus approach*, layaknya virus, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan akan meninggalkan bekas yang sangat luas dan masif. Dengan model *virus approach* maka kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Muhammadiyah akan mempunyai dampak yang besar bagi pengentasan kemiskinan serta problem sosial masyarakat lainnya.

Oleh karena itu dibutuhkan prasyarat untuk menjadikan kegiatan pemberdayaan masyarakat kuat dan masif tersebut, diantaranya, ***pertama;*** organisasi dan kelembagaan harus tertata dengan baik dan terbentuk sampai ke tingkat Cabang di seluruh Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan organisasi. Konsekuensi dari tertatanya organisasi dengan baik adalah penyediaan sumberdaya manusia. Muhammadiyah sudah seharusnya memikirkan ketersediaanya penggerak pemberdayaan, oleh karena itu pemetaan potensi dan distribusi peran SDM yang ada untuk menggeluti kegiatan pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan. Tidak seharusnya mayoritas kader tersedot hijrah ke politik kepartaian dan kenegaraan, harus ada yang tinggal mengurusi Muhammadiyah dan masyarakat. Ibaratnya, kegiatan pemberdayaan adalah jalan sunyi atau bisa jadi malah gang sempit, becek dan bau sehingga jarang orang untuk melaluinya berbeda dengan aktivitas politik kepartaian dan kenegaraan yang sedang jadi primadona yang ibaratnya adalah jalan raya yang ramai sehingga banyak lalu lalang orang melewatinya.

Kedua, kerja pemberdayaan adalah kerja yang membutuhkan nafas panjang, ketekunan, keuletan dan kesabaran sangat

dibutuhkan dalam mendampingi masyarakat. Muhammadiyah tidak bisa menggunakan cara-cara parsial, *hit-and run,* sekali pukul lalu pergi tanpa kembali. Pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya datang memberi pelatihan-pembekalan setelah itu tidak pernah ditindaklanjuti karena berharap masyarakat berinisiatif melanjutkannya sendiri. Dalam pemberdayaan, masyarakat harus "ditongkrongi" sampai kita bisa memastikan bahwa masyarakat sudah benar-benar bisa berdaya dan mandiri.

Ketiga, dibutuhkan sinergi dan kemitraan, kerja pemberdayaan adalah kerja berjejaring, bergandengan tangan dalam mengatasi persoalan hidup masyarakat yang tidak ringan membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Kita tidak boleh "jumowo" bisa melakukan pekerjaan keumatan itu sendirian. kita harus menyadari betapa pun kuat kita, tetapi kita juga punya keterbatasan.

Muhammadiyah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui MPM tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Pihak yang selama ini punya komitmen kuat mendukung kerja-kerja pemberdayaan di internal Muhammadiyah adalah dari amal usaha dan lembaga zakat yang dikelola Muhammadiyah yakni LAZSIMU. Adapun amal usaha yang selama ini mempunyai kontribusi besar mengiringi kerja-kerja MPM dalam pemberdayaan masyarakat adalah perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya perlu menyebut khusus perguruan tinggi Muhammadiyah tersebut yakni, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Keempat perguruan tinggi Muhammadiyah inilah yang

selama ini sangat "entengan" membantu MPM dan menjadi tulang punggung dalam kerja-kerja pemberdayaan semenjak MPM berdiri. Di luar Jawa ada Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan (STKIP) Muhammadiyah Sorong. Selama lima tahun belakangan ini bahkan dukungan yang sangat kuat juga diberikan oleh LAZISMU, tidak sedikit dana infak dan sedekah yang terkumpul disalurkan kepada MPM untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi petani dan kelompok marjinal.[]

SPIRIT PKO
Ta'awun untuk Negeri

—Arif Jamali Muis

TEMA milad Muhammadiyah ke 106 tahun 2018 mengambil tema Ta'awun untuk negeri, tema ini menandaskan pada dua hal, pertama secara teologis membantu atau tolong menolong (ta'awun) adalah perintah agama dan jalan menuju ketakwaan sebagai puncak tertinggi derajat manusia di hadapan sang Pencipta (QS Al Maidah : 02). Ta'awun adalah kegiatan saling membantu dan bersinergi yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai cara membumikan ajaran Agama dalam kehidupan keseharian. Kedua secara sosiologis tema ini ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan Muhammadiyah selama ini didedikasikan untuk bangsa dan negara Indonesia, dengan tindakan nyata.

Menarik mencermati apa yang disampaikan Kyai Suja' pada kongres Muhammadiyah pada hari kamis tanggal 17 Juni 1920 saat ide mendirikan rumah sakit, rumah miskin, rumah yatim ditertawakan oleh peserta kongres, Kyai Suja' setengah kecewa

menyampaikan isi pikirannya, "*Banyak orang di luar Islam (bukan orang Islam) yang sudah berbuat menyelenggarakan rumah panti asuhan untuk memelihara mereka si fakir, dan kanak-kanak yatim yang terlantar dengan cara sebaik-baiknya hanya terdorong dari rasa kemanusiaan saja tidak merasa bertanggung jawab dalam masyarakat dan tanggung jawab di sisi Allah kelak di kemudian hari. Kalau mereka dapat berbuat karena berdasarkan kemanusia-an saja, maka saya heran sekali kalau umat Islam tidak dapat ber-buat, padahal agama Islam adalah agama untuk manusia, bukan khalayak yang lain. Apakah kita bukan manusia?*. Begitulah se-penggal pidato kyai Suja' ketua bidang PKO (Penolong Keseng-saraan Oemoem) tahun 1920 yang menggambarkan keinginan besar menerapkan ajaran-ajaran agama dalam menyejahterakan masyarakat.

Model Ta'awun Muhammadiyah

Jika kita cermati bagaimana Muhammadiyah sejak lahirnya 18 November 1912 berbuat untuk masyarakat, maka kita akan me-nemukan minimal tiga ciri ta'awun, pertama bersifat inklusif, me-nolong siapa saja yang membutuhkan. Sifat inklusif ini sejak lama tertanam dalam kepribadian warga Muhammadiyah, hal ini bisa kita lacak dari penggalan pidato KHA Dahlan "bahwa hajat PKO itu menolong dengan berbasis Islam tanpa membedakan suku, bangsa dan agama".

Penggalan pidato KH Ahmad Dahlan menunjukkan sema-ngat dan spirit untuk melakukan kebaikan kepada Siapa pun, yang perlu dicatat gagasan tersebut dicetuskan jauh sebelum Re-

publik ini lahir, belum ada jargon kebhinekaan, NKRI harga mati, dan lain sebagainnya, Muhammadiyah telah sejak generasi awal menjalankan spirit bekerja dengan asas Islam dan kebermanfaatan untuk sesama. Pilihan diksi Umum pada Penolong Kesengsaran Oemoem (PKO) pada saat itu tentu bukan tanpa maksud, pertanyaan menarik kenapa tidak umat, atau umat Islam, atau warga Muhammadiyah? tentu ini berdasarkan visi jauh kedepan Muhammadiyah yang ingin bekerja dengan landasan Islam untuk kemaslahatan masyarakat secara luas, mengutip apa yang disampaiakan Ketua umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir momentum Milad ke 106 ini untuk menegaskan kembali peran Muhammadiyah untuk semua (*Muhammadiyah for All)* sebagai implementasi Islam Rahmatan lil Alamin.

Spirit PKO ini lah hingga saat ini mendarah daging dalam setiap aktivitas gerak persyarikatan dari pusat hingga ranting di seluruh Indonesia, misalkan di bidang pendidikan Muhammadiyah mendirikan sekolah dan perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku, yang mahasiswa dan siswanya sebagian besar bukan beragama Islam, di bidang bantuan bencana alam dan kemanusiaan melalui lembaga penanggulangan bencana dan Lazis Muhammadiyah membantu siapa pun yang membutuhkan.

Kedua Ta'awun Muhammadiyah bercirikan pemberdayaan. Bantuan yang diberikan Muhammadiyah tidak hanya sebatas model "bakti sosial", datang, selfie lalu pergi (*hit, take a picture and run)*. Dalam memberikan bantuan masyarakat Muhammadiyah selalu melakukan pemberdayaan agar masyarakat menjadi mandiri dan berdaya. Apa yang dilakukan MPM (Majelis Pemberdaya-

an Masyarakat) yang melakukan pelatihan dan pendampingan kepada petani, nelayan dan buruh di berbagai daerah di Indonesia, Beasiswa yang diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah salah satu contoh kecil model pemberdayaan yang dilakukan muhammadiyah. Ketiga ciri ta'awun Muhammadiyah adalah berpihak kepada kelompok-kelompok rentan. Ide Kyai Syuja' mendirikan rumah sakit, rumah miskin, dan rumah yatim menunjukkan keberpihakan kepada kelompok-kelompok rentan, kaum yang terpinggirkan. Perpaduan ketiga ciri di atas, inklusif, pemberdayaan, dan berpihak pada kelompok rentan adalah cara Muhammadiyah untuk membantu sesama, melakukan ta'awun untuk negeri Indonesia tercinta. Selamat Milad ke 106. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 18/11/2018).[]

MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Spirit Pencerahan dan Keberpihakan

—Bachtiar Dwi Kurniawan

Aksi-aksi pemberdayaan Masyarakat atau Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), seiring dengan berjalannya waktu, dengan semakin berkembangnya organisasi Muhammadiyah dan amal usahanya, praksis PKO mengalami penyempitan peran yang hanya dibatasi pada bidang layanan kesehatan yang kita kenal dengan Pembina Kesejahteraan Umat (PKU). Dalam perkembangannya, semakin ke sini proses pemberdayaan masyarakat berlangsung hanya di seputaran lingkup amal usaha dan sekitarnya, tidak lagi menjadi gerakan masif yang terstruktur dengan baik.

Majelis Pemberdayaan Masyarakat, adalah nomenklatur baru dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Dari sisi gerakan dan bidang garap, sebenarnya majelis ini tidak baru sama sekali, bisa di bilang majelis ini adalah spirit lama tapi dengan baju yang baru. Embrio keberadaan majelis ini diawali dengan adanya Lembaga

Buruh Tani dan Nelayan (LBTN) hasil dari Muktamar Muhammadiyah ke 44 di Jakarta tahun 2000.

Muhammadiyah memilih struktur Majelis dalam pembentukan Majelis Pemberdayaan Masyarakat supaya lebih kuat secara organisasi dan bisa fungsional mengakar di masyarakat. PP Muhammadiyah tentu berharap kebedaan MPM menjadikan majelis baru ini bisa berjalan dengan baik. Sasaran yang menjadi bidang garap MPM adalah apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab LBTN yakni kelompok Buruh, Tani dan Nelayan dengan perluasan terhadap kelompok marjinal lainnya (dhuafa-mustadh'afin) seperti kelompok miskin kota dan penyandang disabilitas.

Basis Nilai Gerakan

MPM menjadikan Al-Qur`an Surat Al-Ma'un (maupun berbagai surat lainnya dalam Al-Qur`an) sebagai basis nilai yang menginspirasi gerakan pemberdayaan masyarakat. surat Al-Ma'un memberi inspirasi bagi dikembangkannya berbagai aktivitas untuk memberdayakan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan, tetapi sekaligus dengan itu mendorong juga upaya serius dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang halal dan thayib. Kalau "tidak menganjurkan memberi makan orang miskin" menjadi salah satu indikator dari para pendusta agama, maka jaminan bagi ketercukupan pangan bagi orang miskin pun menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan seara sungguh-sungguh.

Ruang Lingkup Pemberdayaan

Dalam Rakernas pertama tahun 2006 telah disepakati bersama bahwa dalam menjelaskan cara kerja dan aktivitas pemberdayaan dipilah dalam berbagai konteks. Majelis Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada pendekatan ekologi perkembangan manusia (*ecology of human development*) dan lingkungannya yang menyatakan bahwa intervensi sosial harus dapat menyentuh seluruh level relasi antar individu dan lingkungannya.

Berdasarkan relasi antarlevel tersebut, bidang garap yang akan diberdayakan oleh Majelis adalah:

1. Penyadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara
2. Pengembangan kebutuhan dasar dan pendapatan masyarakat (yang miskin dan termarjinalisasi)
3. Advokasi kebijakan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik yang tidak akomodatif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat luas maupun komunitas-komunitas yang termarjinalisasi
4. Pengembangan pusat krisis (*crisis center*) yang ditekankan pada *recovery center* di tingkat regional dan wilayah yang berfungsi sebagai respons cepat dan antisipasi terhadap problem sosial di masyarakat

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, filosofi pemberdayaan yang akan dikembangkan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat adalah: *"mengembangkan cebong yang hanya mampu*

hidup di dalam kolam kecil menjadi katak yang dapat meloncat ke mana-mana" .

Kiprah MPM Selama Satu Dekade

Mengawali kiprahnya di awal MPM berdiri, Majelis ini punya visi "Penataan kapasitas organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang mampu meletakkan landasan yang kokoh bagi perintisan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan serta mendorong proses transformasi sosial dalam masyarakat"

Dari uraian visi tersebut, muara dari segala aktivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, adalah proses transformasi sosial menuju masyarakat mandiri. Pengertian transformasi adalah perubahan bentuk, dalam konteks masyarakat adalah proses pemberdayaan yang mengupayakan perubahan bentuk-kondisi masyarakat yang dilakukan melalui penguatan potensi dan daya hadap terhadap perubahan kondisi. Dengan kata lain, individu dan kelompok masyarakat yang mampu mengembangkan potensi dan kemampuan adaptif dapat disebut sebagai individu dan kelompok berpeluang besar mengalami proses transformasi ke arah yang lebih baik.

Pada periode lima tahun awal tahun 2005-2010 MPM lebih banyak merumuskan konsep dan gagasan pemberdayaan, pengembangan jaringan dan penataan infrastruktur organisasi sambil mencoba menginisiasi model percontohan pemberdayaan masyarakat. Saat itu, tercetuslah pemberdayaan petani dan sektor pertanian yang menjadi andalan. Kenapa sektor ini menjadi pilihan, karena kurang lebih sebanyak 60% masyarakat Indo-

nesia bergerak dan bermata pencaharian di sektor pertanian ini, bahkan mayoritas kemiskinan disumbangkan oleh masyarakat yang bergelut di bidang ini.

Setelah satu periode kepengurusan MPM PP Muhammadiyah yakni sejak tahun 2005-2010, terasa bahwa banyak hal yang belum dikerjakan dengan baik. Tetapi bersamaan dengan itu, terasa pula bahwa ada banyak hal yang ditemukan dalam perjalanan selama satu (1) periode kepengurusan itu, yang menyebabkan improvisasi kegiatan pun dilakukan, terutama untuk memecahkan masalah rakyat miskin yang sebelumnya luput dari perhatian ketika perumusan program periode awal.

Berdasarkan pengalaman periode kepengurusan 2005-2010, mulai ditemukan simpul tentang langkah-langkah apa yang perlu dikembangkan MPM PP Muhammadiyah pada Periode 2010-2015. Terdapat lima hal penting yang perlu dikembangkan oleh MPM PP Muhammadiyah. Kelima hal penting ini memperoleh topangan yang sangat kuat dan strategis dari rumusan Visi Pengembangan MPM 2010-2015 yang diputuskan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, yaitu:

> ”Meningkatnya kapasitas, daya saing, posisi tawar, dan intensitas pemberdayaan masyarakat berbasis misi Penolong Kesengsaraan ’oemoem’ (PKO) dan gerakan Al-Ma’un, menuju kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadaban”.

Visi Pengembangan MPM 2010-2015 ini mengandung juga empat hal kunci gerak yang sangat penting, yaitu ”kapasitas ma-

syarakat", "daya saing masyarakat", "posisi tawar masyarakat", dan "intensitas pemberdayaan masyarakat".

Keempat kata kunci inilah yang mendorong MPM PP Muhammadiyah memantapkan "Medan Jihad" di tengah-tengah masyarakat, sebagai implementasi spirit al-Ma'uun. Lima "Medan Jihad" MPM meliputi Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan, Jihad Memberdayakan Sektor Informal, Jihad Memberdayakan Kaum Buruh, Jihad Advokasi Kebijakan Publik dan Jihad Memberdayakan Kaum Difabel.

Gerakan pemberdayaan masyarakat Muhammadiyah menemukan bentuknya secara lebih kongkret dengan berbagai rintisan model pemberdayaan. Hal tersebut nampak dalam berbagai macam langkah praksis MPM yang berlandaskan konsep lima Jihad di atas dalam program pendampingan pada petani, peternak, buruh, nelayan, kelompok miskin kota, kelompok marginal dan kelompok penyandang disabilitas.

Problematika Pemberdayaan

Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat MPM PP Muhammadiyah berhadapan dengan beberapa problematika yang dapat diidentifikasi sebagai berikut, ***Pertama,*** Walaupun sudah dua periode majelis ini berdiri, namun Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) masih belum tersosialisasi dengan baik, sehingga pembentukan majelis ini belum sepenuhnya sampai pada tingkat Cabang. Masih banyak Pimpinan wilayah yang belum membentuk MPM dalam struktur kepengurusannya, kalaupun ada dibentuk MPM tetapi bergabung atau "merjer' dengan

majelis lain. Digabungkannya dengan majelis yang lain akan menyulitkan koordinasi dan sinkronisasi arah program.

Kedua, Kurang proaktifnya ketua bidang dalam struktur di pimpinan persyarikatan membuat seolah-olah majelis ini berjalan sendiri. Padahal aktivitas pemberdayaan masyarakat sesungguhnya aktivitas yang memiliki tingkat koordinatif dan integratif yang tinggi dengan majelis atau lembaga lain di lingkungan persyarikatan.

Ketiga, Aktivitas pemberdayaan masyarakat memerlukan mobilitas yang tinggi dari para pengelola, sehingga banyaknya pengurus yang tidak bisa mengimbangi ritme aktivitas di majelis karena kesibukan domestik, terutama di bidang akademik. Oleh karena itu dalam operasionalnya majelis ini lebih banyak mengandalkan tenaga muda (fasilitator).

Keempat, Keterbatasan sumberdaya yang ahli dalam bidang garap tertentu dan mau turun ke lapangan terkadang menjadi kendala untuk memenuhi permintaan berbagai masyarakat yang ingin didampingi.

Kelima, Tidak berjalannya MPM di tingkatan wilayah dan daerah membuat berbagai kelompok petani dan lapisan masyarakat harus meminta didampingi langsung oleh MPM di tingkatan pusat.

Keenam, Aktivitas pemberdayaan masyarakat memerlukan dana yang cukup besar. Keterbatasan sumber dana juga menjadi problema tersendiri bagi pengembangan aktivitas pemberdayaan masyarakat.

Ketujuh, Meskipun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Muhammadiyah melalui MPM, sudah nampak hasilnya, akan tetapi hal yang menjadi tantangan adalah, perlu kita sadari bahwa yang dilakukan oleh MPM dalam pemberdayaan masyarakat ini baru sebatas membuat model seraya mengupayakan masifikasi penerapannya di berbagai tempat. Hal ini bisa diandaikan bahwa pendekatan pemberdayaan yang dilakukan MPM masih sebatas menggunakan pendekatan yang dikenal dengan *dragonfly approach*. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah kegiatan pemberdayaan Muhammadiyah di Masyarakat hanya meninggalkan bekas yang sangat terbatas

Salah satu persoalan yang masih menghantui kehidupan umat dan bangsa saat ini adalah soal kemiskinan. Meskipun selalu diberitakan dalam angka bahwa kemiskinan menurun, tetapi faktanya kemiskinan masih tetap bercokol dan belum bisa dienyahkan. Jumlah orang miskin menyebar dari perkotaan dan pedesaaan.

Jumlah orang miskin yang besar yakni didorong oleh beberapa faktor. Ada dua faktor yang turut serta menciptakan kemiskinan di Indonesia, *pertama* adalah faktor eksternal, sistem dan struktur ekonomi global yang timpang lantaran lebih berpihak pada negara kaya dan kelompok kapitalis. Hal ini ditambah dengan gejolak kelesuan ekonomi global, sehingga memengaruhi transaksi berjalan pelaku ekonomi tanah air.

Kedua adalah Faktor internal yang didorong oleh kebijakan pemerintah yang cenderung tidak sensitif dengan persoalan orang miskin. Kebijakan menaikkan harga BBM, Tarif Dasar Listrik

dan Gas yang cenderung menyerahkan pada mekanisme pasar semakin memperdalam jurang kemiskinan di Indonesia. Hidup masyarakat yang miskin dan lemah semakin susah dan kurang beruntung. Hanya orang kaya yang diuntungkan dan menikmati paket kebijakan pemerintah dan ekonomi global. Rakyat kelas bawah semakin menjerit dan terjepit.

Muhammadiyah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari republik ini sudah barang tentu tidak selayaknya tenang dan santai. Muhammadiyah harus meningkatkan peran dan kontribusinya sebagai kekuatan dan gerakan pembebas bagi persoalan umat dan bangsa khususnya kemiskinan dan penderitaan rakyat.

Gerakan Pencerahan

Muktamar Muhammadiyah ke 47 tahun 2015 di Makassar adalah momentum yang tepat bagi Muhammadiyah dalam meluruskan "shoff" gerakannya. Muktamar yang mengambil tema "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan" sangat cocok dengan *setting* persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara serta Muhammadiyah sendiri.

Gerakan Pencerahan sendiri bagi Muhammadiyah diartikan sebagai gerakan yang mempunyai tiga dimensi yakni gerakan yang berusaha untuk melakukan pembebasan. Pembebasan bagi Muhammadiyah berarti membebaskan manusia dari berbagai macam belenggu, baik belenggu yang mengotori dan membengkokkan keyakinan akidah beragama, belenggu sosial, ekonomi, budaya dan bahkan belenggu politik. Muhammadiyah

berkiprah dan bergerak sejak awal mencoba melakukan terobosan dan upaya untuk melakukan pembebasan manusia pada wilayah ini. Hal ini tercermin dari model dakwah Tajdid yang mencoba mengupayakan pemurnian tauhid dan melakukan pembaruan kehidupan sosial keagamaan di Tanah Air.

Gerakan Pencerahan juga bermakna sebagai gerakan pemberdayaan, setelah melakukan pembebasan, Muhammadiyah harus melakukan tindak lanjut berupa penguatan pada masyarakat. Langkah penguatan masyarakat telah dilakukan oleh Muhammadiyah. Upaya penguatan itu bisa kita lihat bagaimana Muhammadiyah melakukan pemberdayaan masyarakat sejak berdirinya sampai saat ini. Komitmen pemberdayaan kepada masyarakat akhir-akhir ini mengalami penguatan dan institusionalisasi ketika Muhammadiyah mendirikan majelis baru yang diberi nama Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM).

Majelis Pemberdayaan Masyarakat adalah jawaban Muhammadiyah yang diberikan dalam rangka merespons dan mengatasi persoalan hidup masyarakat khususnya kemiskinan. Muhammadiyah melalui Majelis ini hadir langsung dan terjun ke tengah-tengah masyarakat degan melakukan intervensi langsung mengatasi persoalan hidup masyarakat khususnya di akar rumput, miskin dan marjinal.

Langkah kongkret pemberdayaan masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pendampingan pada kelompok-kelompok petani, nelayan, buruh, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, pelaku usaha mikro dan kelompok marjinal lainnya. Kelompok-kelompok ini menjadi segmen baru dakwah Muham-

madiyah, yakni dakwah *bil hal*. Problem kemiskinan tidak lagi menjadi diskursus hangat di ruang-ruang diskusi-seminar akan tetapi sudah mewujud nyata dalam praksis gerakan pemberdayaan.

Langkah pencerahan Muhammadiyah tidak hanya berhenti pada gerakan pemberdayaan akan tetapi masuk pada wilayah pemajuan masyarakat. Muhammadiyah ingin dengan gerakan pencerahan ini bisa memajukan kehidupan masyarakat menjadi masyarakat dan bangsa yang berkemajuan. Gerakan pemajuan ini dilakukan dengan semakin menghebatkan langkah-langkah Muhammadiyah mengupayakan pencerdasan bagi segenap elemen masyarakat dan bangsa.

Spirit Keberpihakan

Melihat kemiskinan yang masih menjadi masalah besar bangsa, maka Muhammadiyah yang saat ini melangsungkan Muktamar ke 47 di Makassar, yang salah satu agendanya adalah melakukan pemilihan pemimpin baru Muhammadiyah. Muktamar harus melahirkan pemimpin yang mempunyai komitmen yang kuat untuk mengatasi salah satu masalah terberat bangsa tersebut.

Keberpihakan kepada kelompok miskin dan marjinal sudah menjadi nalar Otentik Muhammadiyah. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah telah memberikan contoh bagaimana organisasi ini bekerja. Contoh itu bisa kita baca dalam lembaran sejarah Muhammadiyah betapa kyai Dahlan begitu berpihak kepada orang miskin. Al-Maun dijadikan landasan normatif operasi penyatunan kepada orang-orang miskin dalam *setting* kehidupan masyarakat

kala itu yang masih terbelenggu dengan kemiskinan, kebodohan dan penjajahan.

Spirit keberpihakan itu telah menjadi ruh sekaligus nafas gerakan Muhammadiyah. Praksisme Al-Maun begitu melegenda dan terpatri dalam setiap relung hati aktivis Muhammadiyah dari dulu hingga saat ini, Program-program Muhammadiyah sedikit banyak telah diarahkan pada upaya-upaya pembebasan dan pemberdayaan kepada masyarakat miskin dan marjinal.

Saat ini, kondisi masyarakat yang dihadapi Muhammadiyah setelah lebih dari 1 abad berdirinya jauh lebih kompleks dan kemiskinan masih menjadi masalah pelik dan akut yang harus mendapat perhatian serius secara organisasi sehingga upaya-upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan menjadi sebuah gerakan bukan hanya aktivitas yang sporadis. Sudah selayaknya energi Muhammadiyah ke depan sedikit banyak diarahkan pada persoalan ini. Upaya pengentasan kemiskinan yang sebelumnya sudah ada harus dilanjutkan bahkan diperkuat kembali melalui sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak yang ada di persyarikatan. SDM yang melimpah, sumber daya finansial yang tersedia serta sarana dan prasarana yang ada termasuk jaringan persyarikatan harus dioptimalkan semaksimal mungkin untuk gerakan pembebasan, pemberdayaan dan kemajuan masyarakat.[]

MEMAHAMI FIKIH KEBENCANAAN

—Arif Jamali Muis

TERJADINYA Bencana beruntun baru-baru ini di Lombok-Sumbawa Nusa Tenggara Barat dan kemudian disusul gempa dan tsunami Palu, Donggala dan sigi Sulawesi Tengah menggugah rasa kemanusiaan kita, donasi dari masyarakat dari berbagai penjuru nusantara berdatangan sebagai wujud saling membantu, begitu juga relawan dari berbagai organisasi hadir untuk meringankan beban saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang sedang mengalami musibah.

Dibalik rasa kemanusiaan yang diwujudkan saling membantu antara sesama yang patut kita banggakan muncul di berbagai group WA dan media sosial lainnya pendapat yang menyertai penyebab terjadinya bencana, selain analisis ilmiah keilmuan muncul pendapat, yaitu bencana terjadinya karena ditempat tersebut banyak terjadi kemaksiyatan yang dilakukan, lihatlah isu yang menyertai gempa Lombok, bencana terjadi karena terdapat pulau yang digunakan secara bebas untuk bermaksyiat sehingga Al-

lah "murka" dan "marah" maka diturunkanlah Azab dari-Nya, atau gempa dan tsunami di palu Sulawesi tengah dikarenakan akan ada pertemuan forum LGBT secara besar-besaran di Palu, dan berbagai isu lainnya, intinya kesemua bencana yang terjadi karena "kemurkaan" Allah akibat kemaksiatan manusia.

Ada cerita menarik pada saat penulis mendampingi ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkunjung ke NTB, ada warga yang bercerita kepada relawan Muhammadiyah kalau mereka merasa tidak nyaman dengan wacana gempa terjadi karena azab dari Tuhan, kata mereka sudah kena musibah dianggap ingkar dan bermaksiat kepada Allah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Lalu bagaimana kita baiknya memahami kebencanaan yang terjadi?

Fikih kebencanaan

Pada munas majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2015 telah menerbitkan fikih kebencanaan, sebagai upaya untuk memahami, menjelaskan, mengantisipasi, dan menyikapi peristiwa-peristiwa kebencanaan berdasarkan *value, ethics,* dan *ethos* dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalam fikih kebencanaan memandang terjadinya bencana dapat kita bedakan dalam dua hal, yaitu memandang bencana dari sisi teologis dan sosiologis. pertama Dalam konteks teologis Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah SWT bersifat Rahman dan Rahim, Allah maha kasih dan sayang (QS 6:54), maka konsekuensi dari keyakinan itu adalah apa pun yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia selalu dalam kerangka kebaikan dan penuh dengan kasih sayang.

Cara pandang ini pun harus kita pakai dalam memandang bencana yang terjadi, bahwa bencana sebagai kehendak Allah SWT merupakan sebuah kebaikan (QS 16:30) yang menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan manusia. Bencana yang terjadi bukan merupakan bentuk Amarah dan ketidakadilan Allah kepada manusia, melainkan merupakan bentuk kebaikan dan kasih sayang (*Rahman)* Allah kepada manusia, yaitu sebagai media untuk introspeksi seluruh perbuatan manusia yang mendatangkan peristiwa yang merugikan manusia itu sendiri. Kedua secara sosiologis kita dapat memahami bencana dari perspektif peran manusia sebagai khalifah (pengelola) alam.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini mempunyai tugas penting menjaga kelestarian alam, tidak melakukan kerusakan, menjaga harmoni alam, dan menjadikan alam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam konteks kebencanaan, manusia sebagai khalifah ada tiga peran penting, pertama melakukan upaya preventif yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana (QS Yusuf : 47-49), melakukan upaya-upaya jika terjadi bencana dapat menimalisir kerugian dan korban jiwa. Kesadaran mitigasi dan kesiapsiagaan ini sangat penting apalagi Indonesia termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana baik gempa, gunung api, banjir dan lain-lain, sayangnya usaha mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ini belum mendapat porsi yang utama baik oleh pemerintah maupun masyarakat luas.

Kedua jika terjadi bencana bagi masyarakat yang terdampak harus bersikap sabar dan bersyukur, mengembangkan *positive Thingking and action* akan kebaikan dan hikmah dibalik peristiwa

kebencanaan, di sisi lain bagi masyarakat yang tidak terdampak harus melakukan upaya tanggap darurat dengan menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, mengurangi penderitaan korban, dan meminimalkan kerugian materi (QS Al-maidah : 32).

Bagi organisasi kemanusiaan, menolong korban bencana harus memegang tiga prinsi pertama inklusif, membantu tidak hanya untuk kelompok tertentu saja, membantu untuk semua kelompok yang terkena dampak bencana entah apa pun suku, ras, agama dan golongannya, bukankah *mustad'afin* dalam Bahasa agama tertuju tidak memandang agama, suku, etnis dan kelompok-kelompok tertentu, prinsip inklusif ini penting karena di lapangan kadang ada kecenderungan untuk membantu sesuai dengan kelompoknya saja. kedua *Non-Charity,* artinya bantuan kemanusiaan tidak hanya model "bakti sosial" sekadar membantu apa saja tanpa analisis kebutuhan setelah itu selesai dan merasa puas.

Prinsip bantuan kemanusiaan adalah berbasis pada hak masyarakat terdampak dan memperhatikan keberlanjutan program, bantuan kemanusiaan tidak lagi model "hero" yang datang memberi bantuan lalu pergi, *hit, take a picture and run*. Ketiga prinsip bantuan kemanusiaan harus lebih memperhatikan kelompok retan seperti perempuan, anak-anak dan orang tua lanjut usia, karena kelompok inilah yang paling gampang jika terjadi bencana mengalami penderitaan.

Ketiga pasca bencana, sebagai khalifah, manusia wajib melakukan upaya-upaya rehabiltasi yaitu perbaikan semua aspek yang rusak akibat terjadinya bencana, maupun melakukan Rekonstruk-

si membangun kembali semua sarana dan prasarana yang hancur akibat bencana.

Ada baiknya kita masyarakat untuk memulai menghentikan wacana mengaitkan terjadinya bencana akibat “kemarahan” dan “murka” Tuhan atas tindakan manusia, selain tidak membantu apa pun terhadap korban bencana juga membuat korban menjadi tidak nyaman, jalan terbaik setelah membantu korban adalah kita belajar dari kejadian bencana tersebut untuk melakukan upaya-upaya antisipasi agar jika terjadi ditempat kita tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar. *Walahu'alam Bishowab* (Sumber: 7/11/2018).[]

TA'AWUN UNTUK NEGERI

Spirit Pelayanan Sosial

—Bayujati Prakoso

TEPATNYA, 18 November 2018, Muhammadiyah berumur 106 tahun. Muhammadiyah memperingati miladnya dengan mengangkat tema "Ta'awun untuk Negeri". Di setiap pengabdiannya untuk negeri, memunculkan berbagai inovasi, kreativitas, dan kemajuan terhadap masyarakat Indonesia.

Belum lama, kita melihat Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) pada 6 November lalu, menerima penghargaan Ormas Tahun 2018 Bidang Penanggulangan Bencana Kementerian Dalam Negeri RI atas pengabdiaannya terhadap bencana sosial yang hadir di negeri ini. Upaya tersebut bukan serta simbolitas semata, namun ikhtiar kemanusiaan secara tulus dengan spirit ta'awun digelorakan sebagai kader ummat, kader bangsa.

Ta'awun didefinisikan sebagai upaya kerja sama, tolong menolong antar sesama manusia dalam prinsip kebaikan. Selaras

dengan prinsip dalam Al Qur'an, Q.S.Al Imran: 104, yang artinya "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung*". Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi inspirasi dan gerakan Muhammadiyah dalam ranah; kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Sebagaimana dilansir dalam Suara Muhammadiyah.id, (12/11) dengan judul *Spirit Majukan Bangsa Melalui Ta'awun untuk Negeri*, Haedar memaparkan bahwa tema Milad Muhammadiyah ke 106 Tahun "Taawun untuk Negeri" dipilih untuk mentransformasikan hadirnya tujuan Muhammadiyah yang telah banyak berbuat untuk memajukan kehidupan bangsa di berbagai bidang. Seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan usaha-usaha dakwah pembaharuan.

Ta'awun untuk Negeri menjadi spirit gerakan sosial Muhammadiyah, yang kemudian diharapkan menjadi gerakan sosial yang masif dan menyebar menebar kebaikan dipenjuru Nusantara. Sehingga kebermanfaatannya secara luas dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Spirit ta'awun menjadi keharusan, dan hal ini menjadikan misi kita sebagai umat Islam, untuk kemudian mengaplikasikan Islam yang *rahmatan lil' alamin* di tengah arus zaman yang kian pragmatis, materialis, bahkan hedonis. Terlebih di tahun politik 2019 ke depan, Muhammadiyah tetap konsisten dalam jalan dakwahnya, membela kemanusiaan, ta'awun untuk negeri, dalam rangka menjadikan negara yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negeri yang aman, tenteram, makmur, dan berkeadaban).

Maka, tidak heran Muhammadiyah terus membangun dan konsisten pada upaya pembangunan dalam segi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan sosial di masyarakat dari segala sektor; masyarakat tertinggal, menengah, peningkatan kompetensi religiusitas dengan adanya pengajian rutin seputar fiqh, maupun merespons wacana-wacana kemajuan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi kontemporer, serta menumbuhkan semangat anak-anak muda untuk berinovasi dalam segi teknologi, kemandirian ekonomi, dan sebagainya.

Bagaimana Praktik Ta'awun untuk Negeri?

Untuk meraih cita-cita tersebut, perlunya kerja sama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi masyarakat, LSM, bahkan warga negara itu sendiri. Termasuk di dalamnya generasi muda.

Pertama, dengan peneguhan dan implementasi dari spirit Teologi Al Maun. Tauhid Sosial Surat Al Maun yang terdapat di dalam Al Qur'an yang ditafsirkan oleh K.H. Ahmad Dahlan menyangkut tanggung jawab sosial yang mana ini berujung pada gerakan sosial kemasyarakatan yang memiliki peranan penting dalam sejarah bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, Muhammadiyah hadir menawarkan sebuah konsep Islam yang dinamis dalam merespons setiap permasalahan yang terjadi pada masa ini. Haedar Nashir dalam bukunya *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan* (2010), menggambarkan bahwa Muhammadiyah telah berhasil mengantarkan kaum Muslim Indonesia menjalankan perubahan yang dahsyat, dari masyarakat yang tradisional menjadi yang lebih modern, agraris menjadi

industrial, pedesaan menjadi perkotaan, feodalistik menjadi lebih egaliter. (Azrul Tanjung, dkk, 2015: 128) Ini penulis pikir menjadi sebuah suatu keharusan semangat tauhid sosial surat Al Maun ini perlu di terapkan dalam kehidupan.

Kedua, menggiatkan kesadaran dan ghirah *altruisme* individu-kolektif. yang artinya sikap perhatian kepedulian terhadap sesama manusia di lingkungan sekitar kita, tidak acuh tak acuh. Sehingga, menjadikan manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sikap ikhlas untuk ummat dan menenggelamkan sikap egoistik.

Aspek yang bersifat pengorbanan ini sangatlah cocok dan bagus jika diterapkan dalam individu hingga kolektif. Selain itu, tetap terus menggelorakan gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* (Q.S. Alu Imran: 104), yaitu gerakan yang menyeru kepada kebaikan, dan mencegah hal-hal yang mungkar. Seperti pada gerakan *Filantropi* (sikap kedermawanan kepada sesama), selain itu, dengan membangun kelompok diskusi-diskusi interaktif menjadi sebuah pijakan dalam berproses menuju perkembangan tradisi masyarakat ilmu dalam menciptakan peradaban yang diharapkan.

Ketiga, kita sebagai masyarakat harus memiliki sifat yang santun, toleran, bijaksana, dan mengedepankan akhlak mulia. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap Muslim, karena ini akan membawa pada keanggunan moral, ibarat mutiara yang terlihat terang, dan bercahaya di sepanjang di mana ia ditempatkan. Artinya, manusia pada dasarnya anggun, unggul jika selalu mengedepankan

perilaku santun, toleran, bijaksana, dan mengedepankan akhlak mulia dalam menjalankan kehidupan.

Keempat, memakmurkan masjid sebagai basis gerakan dakwah, dan sebagai sumber inovasi, serta melakukan jihad akademik. Jadi masjid tidak hanya sebatas kegiatan ibadah, melainkan dapat menumbuhkan kegiatan yang produktif seperti diskusi, menggiatkan literasi, dan sebagainya. Hal ini sebagai wujud membangun kecintaan terhadap masjid.

Sedangkan, upaya menggiatkan jihad akademik merupakan adanya pengorbanan dalam mencari ilmu, di samping hadirnya romansa atau dinamika kampus sebagai tempat menimba ilmu. Adanya usaha, kerja keras, yang penulis sebut sebagai ijtihad intelektual, yakni dengan giat menjalankan akademik dengan belajar mengejar prestasi, ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat dengan sebaik-baiknya.

Kita harus memiliki kesadaran jihad akademik ini agar setiap generasi muda dapat terus membawa misi "Ta'awun untuk Negeri" ini sebagai wujud kesadaran kolektif dalam membangun peradaban yang maju (negeri berkemajuan) melalui gerakan pendidikan, serta tidak terjebak dalam dinamika arus global yang kian kompleks dan derasnya di sekitar kita.

Sehingga di situ dapat lahir gerakan-gerakan sosial yang masif dan membumi untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada di negeri ini, seperti kemiskinan, ketertindasan, penanganan keterbelakangan pendidikan, ketimpangan sosial, minimnya lapangan pekerjaan, dan sebagainya.

Dengan begitu, hadirnya generasi dengan ijtihad intelektual-nya mampu merespons dan mengaplikasikan "Ta'awun untuk Negeri".[]

RESTORASI SPIRIT FILANTROPI DI SEKOLAH MUHAMMADIYAH

—Achmad Santoso

TAHUN lalu, tepatnya pada 10 Desember 2018, diadakan Lokakarya Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Launching Buku Kemuhammadiyahan di kampus UHAMKA Jakarta. Kegiatan tersebut masih dalam rangka Milad Ke-106 Muhammadiyah. Tema yang diangkat pada diskusi itu sungguh majelis: "Ahmad Dahlan Reborn; Teologi Al-Maun untuk Generasi Milenial".

Setidaknya ada dua alasan kenapa tema yang diperbincangkan menarik. Pertama, memang diperlukan transformasi nilai untuk generasi milenial Muhammadiyah supaya etos Ahmad Dahlan lewat teologi Al-Maun diamalkan betul di tengah arus modernisasi yang kian mendegradasi nilai-nilai humanitas. Kedua, digelarnya diskusi tersebut harus disadari sekaligus menjadi momentum otokritik untuk Muhammadiyah: sudahkah mengimplementasikan teologi Al-Maun secara paripurna?

Untuk alasan pertama, tentu para pemantik berdarah cendekia seperti Dr Haedar Nashir, Prof Lincolin Arsyad, hingga Prof Abdul Munir Mulkhan sudah mengupas tuntas bagaimana teologi Al-Maun mengkristal dalam diri generasi langgas. Pun, sudah terhampar wacana agar generasi ini terselamatkan dari budaya konsumerisme, hedonisme, dan individualisme.

Anasir kedua yang seyogianya tak kalah penting disorot. Berangkat dari situ, apakah teologi Al-Maun juga sudah dijelmakan secara kafah di internal persyarikatan. Di kalangan warga Muhammadiyah, teologi Al-Maun itu masyhur termanifestasikan dalam spirit filantropi. Spirit teologi Al-Maun Kiai Dahlan menyatakan bahwa Islam bukan melulu perihal ibadah, melainkan juga aksi nyata membangun masyarakat terpinggirkan. Beliau mendidik anak-anak kampung di madrasah yang dibangunnya secara gratis. Kata kuncinya, pendidikan gratis.

Muhammadiyah menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang. Namun, ada yang "luput" dari perhatian organisasi ini. Sektor pendidikan selama ini menjadi motor vital organisasi karena mendatangkan cukup banyak pemasukan. Akan tetapi, justru di situlah letak persoalan muncul. Di satu sisi, Muhammadiyah dituntut menghadirkan madrasah berkualitas yang mestinya mampu dijangkau seluruh golongan, atau bahasa lainnya "ramah biaya". Di sisi lain, amal usaha itu harus dirawat secara profesional agar manajemennya puguh. Sebuah usaha yang membutuhkan ongkos tidak sedikit.

Desas-desus Sekolah Tak Ramah Biaya

Selama ini jamak beredar desas-desus bahwa biaya beberapa sekolah dan universitas Muhammadiyah, khususnya yang sudah maju, dinilai mahal. Jawa Timur termasuk gudangnya sekolah dan universitas favorit. Ada, misalnya, Universitas Muhammadiyah Malang, SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, serta SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya.

Muhammadiyah boleh besar, tapi semangat filantropi, yaitu cinta kasih kedermawanan terhadap sesama, haram untuk luntur. Fakta bahwa sekolah favorit Muhammadiyah yang terkadang tidak terjangkau, bahkan secara ironis oleh warga Muhammadiyah sendiri, pun mesti dievaluasi dan direformulasi.

Ketika menulis ini, saya langsung teringat buku karya Toto Rahardjo, *Sekolah Biasa Saja*. Di dalam buku itu, sang penulis mengisahkan Sekolah Sanggar Anak Alam (SALAM) dengan tujuan, salah satunya, mengkritik lembaga pendidikan yang mengultuskan *profit oriented*. Sekolah SALAM merupakan sekolah alternatif yang diperuntukkan bagi murid-murid dari golongan mana pun tanpa pandang identitas.

"Harga uang pangkal untuk masuknya saja senilai biaya semesteran di perguruan tinggi. Kalau pendidikan membuat kastanisasi kehidupan, pemenuhan otak, namun pengeringan hati, patut dipertanyakan bahwa pendidikan telah kehilangan roh," tulisnya.

Toto Rahardjo mengatakan bahwa tujuannya mendirikan sekolah yang berlokasi di Yogyakarta itu adalah mengembalikan

fungsi sekolah sebagaimana mestinya, salah satunya sekolah bukan perusahaan.

"Maka, sejak awal saya ingatkan bahwa mendirikan serta mengelola sekolah bukan merupakan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Kalau Anda mendirikan sekolah untuk mencari keuntungan dan kemasyhuran, berarti Anda salah alamat atau tersesat, karena mendirikan sekolah lebih dekat dengan mengabdi pada kemanusiaan yang posisinya terletak di pelosok kesunyian."

Ide dan gerakan di Sekolah SALAM memang tidak bisa sertamerta ditelan mentah-mentah. Muhammadiyah bisa meniru yang selaras dan memodifikasinya sesuai kebutuhan. Sebuah ironi ketika dulu sang *founding father* secara sukarela membuka sekolah dengan gratis, dengan biaya dari penjualan batik, tetapi kini beberapa sekolah Muhammadiyah justru berlomba-lomba membangun fisik megah dengan melambungkan biaya pendidikan. Jika sudah begitu, apakah mungkin lembaga pendidikan persyarikatan ini mau menampung siswa dari kalangan kurang mampu?

Muhammadiyah begitu erat dengan jiwa wirausaha, karena itulah bisa berkembang pesat hingga saat ini. Tapi, semestinya bukan wilayah pendidikan, wilayah yang di dalamnya terdapat proses tukar pikiran dan kerja-kerja intelektual, yang "dikomersialkan". Bukan murni biaya pendidikan yang digunakan untuk menafkahi pegawai, melainkan sektor ekonomi lain. Katakanlah dari amal usaha toko, pabrik, konfeksi, pertanian, perikanan, dan peternakan. Itu pula, konon, yang diimpikan salah satu sekolah berbasis pondok Muhammadiyah di Yogyakarta.

Spirit Filantropi di Sekolah Muhammadiyah

Konsep teologi Al-Maun, yang salah satu isinya mewujud dalam filantropi (*walaa yahuddu alaa ta'aamil miskin…wayamna'uunal maa'uun*), adalah "barang kuno" yang amat perlu dihadirkan kembali di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Terutama yang masih bertarif mahal. Lembaga pendidikan Muhammadiyah harus diselaraskan dengan spirit Ahmad Dahlan itu. Sang kiai mendirikan sekolah gratis yang operasionalnya dipungut dari berjualan batik. *Giving more than receiving*. Dengan demikian, biaya pendidikan tidak dibebankan sepenuhnya kepada murid. Sumbernya bisa melalui itu tadi: sektor ekonomi dengan segala wirausahanya.

Lembaga pendidikan Muhammadiyah harus memaksimalkan amal usaha yang lain demi menyubsidi biaya pendidikan agar tidak terlampau memberatkan murid. UMM, misalnya, kini telah menjelmakan diri sebagai kampus dengan berjibun usaha. Nah, rabat dari usaha itulah semestinya yang difaedahkan untuk menyubsidi biaya pendidikan bagi mahasiswa. Atau, SD Mudipat Surabaya harus dapat menerima siswa dari golongan mana pun. Sebagai solusi, dimaksimalkanlah amal usaha lain supaya biaya pendidikan menjadi lebih bersahabat.

Memang, "tuduhan" tersebut tidak bisa di*gebyah-uyah*. Tak sedikit pula sekolah/universitas Muhammadiyah yang masih (sangat) terjangkau bagi kalangan mana pun. Misalnya, yang menuju tahap berkembang. Yang kita harapkan adalah sekolah Muhammadiyah yang sudah maju, tetapi ramah biaya. Sekolahnya boleh unggul, ternama, tapi murid-muridnya heterogen. Sebab, mengulang wejangan Toto Rahardjo tadi, "mendirikan sekolah

lebih dekat dengan mengabdi pada kemanusiaan". Jika hal itu mampu diterapkan, Muhammadiyah sekaligus akan menyentil lembaga pendidikan lain yang mahal dan feodal. Sekolah-sekolah eksklusif yang hanya bisa dijangkau segelintir golongan.

Menerapkan sikap kedermawanan di segala lini amal usaha tentu pilihan yang sangat arif. Sebab, tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Meski berlambang matahari yang direferensikan dengan (me)langit, Muhammadiyah harus tetap membumi.[]

Epilog

TA'AWUN MUHAMMADIYAH

Rekonstrusi Strategi Gerakan di Era Disrupsi

—Hilman Latief

Ketua LazisMu Pimpinan Pusat Muhammadiyah

MEMANG kedengarannya seperti latah, mengaitkan Muhammadiyah dengan era disrupsi yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Orang mungkin bertanya-tanya pula: apa hubungan gerakan Islam modernis yang usianya lebih dari satu abad ini dengan era teknologi digital? Bukankah Muhammadiyah tambah lama tambah besar, amal usaha nya semakin baik dan banyak, dan aset yang dimilikinya semakin sulit hitung? Lagi pula, bukankah kader-kader Muhammadiyah masih banyak dan semakin terdidik yang tentunya akan siap menghadapi situasi bangsa ini di masa depan?

Saya kira, ada banyak klaim tentang keberhasilan dan karya Muhammadiyah yang bisa kita susun dalam daftar yang sangat panjang. Tapi, tak bisa dipungkuri pula, ada daftar panjang masalah yang dihadapi oleh Muhammadiyah sebagai gerakan sipil Islam yang mengelola ribuan amal usaha. Yang perlu kita lebih hati-hati dan berfikir lebih cermat adalah sudah siapkah Muhammadiyah dan amal-amal usahanya masih eksis untuk 50-100 tahun ke depan? Apa yang ingin dicapai? Apakah yang terjadi hari ini di sekitar kita pernah menjadi diskursus Muhammadiyah sebelumnya, seperti fenomena lahirnya *platform* bisnis, sosial maupun sosial-bisnis seperti Gojek, BukaLapak, Traveloka, KitaBisa dan berbagai bentuk teknologi finansial yang sekarang mendarah daging di sebagian besar masyarakat Indonesia, tak terkecuali kaum Muslim secara umum, dan warga Muhammadiyah secara khusus?

Banyak cerita di luar sana bahwa belakangan ini perusahaan-perusahaan raksasa sempat goyah, hampir bangkrut, dan bahkan sudah menghilang dari arena persaingan karena tidak sanggup berhadapan dengan situasi yang berubah secara tiba-tiba dan tidak diantisipasi dengan baik. Kita dengar sebuah perusahaan transportasi di Jakarta *oleng* ketika platform transportasi *on line* menjadi magnet yang kuat bagi banyak penumpang. Banyak cerita warung yang tidak bisa bertahan atau penjual makanan yang hampir tutup dan mau tidak mau memberikan layanan *on line* bagi langganan mereka yang sudah banyak malas keluar rumah. Tak sedikit pula pegawai dengan keterampilan rendah yang diberhentikan atau pensiun dini di banyak perusahaan atau kantor karena tempat mereka bekerja sudah mengadopsi teknologi

baru. Sebaliknya, kita dengar nama dan bendera bisnis baru yang berkibar di Indonesia, yang ternyata bukan sebuah pabrik atau produsen barang tertentu, melainkan sebuah *plaform* bisnis berbasis digital.

Bila perusahaan-perusahaan besar dengan manajemen modern dan SDM terlatih harus goyah di era disrupsi saat ini, apakah fenomena yang sama akan dialami oleh organisasi masyarakat sipil, termasuk Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan dengan kerja-kerja sosial dengan cakupan yang luas, seberapa lama dan konsisten Muhammadiyah sebagai organisasi mampu membiayai dan memperkuat jaringan kerjanya di era saat ini? Secara lebih khusus lagi, bagaimana Muhammadiyah mampu menjaga konsistensi dan melestarikan kekuatan *ta'awun* (tolong menolong) dan kepedulian kolektif yang saat ini menjadi nilai utama dalam masyarakat yang terus berubah?

Semangat Bergerak Minus Teknologi

Dari dulu, Persyarikatan Muhammadiyah bisa eksis karena modal dasar yang dimilikinya, seperti: a) komitmen keagamaan yang kuat yang melandasi etos pergerakan kadernya; b) sumber daya manusia terdidik yang senantiasa terus menerus mau mengikuti perubahan dan merespons perubahan zaman; c) jiwa kerelawanan dan kesadaran kolektif yang kuat dari aktivisnya dengan menproyeksikan enerji dan cita-cita sosial mereka melalui persyarikatan. Kita bisa melihat, kekuatan komitmen kader-kader yang berada di tiap tingkatan yang bersedia menjadi relawan untuk

mengurusi organisasi, mulai dari Ranting dan Cabang hingga Daerah (Kota/Kabupaten), Wilayah (Provinsi) dan Pusat. Semangat ta'awun (saling menopang dan saling membantu) yang dipelopori tokoh-tokoh *genuine* dan anggota masyarakat yang menjadi kader Muhammadiyah di berbagai daerah telah berperan penting untuk memperkuat dan merevitasliasi keberadaan persyarikatan dari waktu ke waktu.

Tapi, waktu terus berubah. Upaya untuk meningkatkan kapasitas persyarikatan dan peran-peran anggota dan simpatisan terus dilakukan, termasuk di dunia kewirausahaan (*entrepreneurship*). Meski sebagian besar aktivis Muhammadiyah bekerja sebagai pegawai (termasuk menjadi PNS), upaya untuk mendorong wirausaha dalam progran-program persyarikatan begitu kuat di "akar rumput". Upaya untuk memperkuat amal usaha dilakukan oleh persyarikatan, dan langkah untuk meningkatkan kewirausahaan tak pernah berhenti untuk digelorakan. Seiring dengan itu, dalam beberapa diskusi yang dilakukan dengan pegiat Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah di tingkat daerah atau cabang, sering muncul pertanyaan kemungkinan dibangunnya usaha. Banyak sekali usaha mikro atau produk-produk industri rumahan yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok usaha Aisyiyah dan Muhammadiyah. Namun, masalah yang sering dihadapi adalah bagaimana lahan untuk membuka tokonya, ke mana produksi industri rumahan kelompok usaha Aisyiyah dan Muhammadiyah akan dipasarkan, dan siapa yang akan menjadi mitra dalam menjalankan usaha, dan lain-lain. Dapatkah produk industri rumahan Aisyiyah dan Muhammadiyah mengintervensi pasar yang lebih

luas, ataukah pasarnya masih di wilayah internal persyrikatan. Usaha-usaha mikro yang didampingi oleh majelis atau lembaga yang melakukan pendampingan ekonomi untuk pedagang, petani, nelayan, dan sebagainya kerap berhadapan dengan masalah proses "hilirisasi" produk-produk industri rumahan.

Di balik banyak kesulitan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat sipil dalam membuka akses pasar, ternyata telah terjadi "revolusi lapak dagangan" yang dipelopori kaum muda dan kelompok masyarakat sadar teknologi. Penetrasi dan ekspansi bisnis mereka dalam bentuk *platform* digital telah menjadi gaya hidup baru sesuai dengan karakteristik masyarakat milenial dengan budaya digital mereka. Kini pasar yang dibuka adalah pasar digital, dan lapak yang dibangun adalah lapak *virtual*, di mana orang tidak lagi harus membuka toko *off line* melainkan juga membuka transaksi-transaksi *on line*. Gagasan utama dalam platform digital di era disrupsi ini tentang memperkuat dan merekonstruksi konsep "*sharing economy*" dan pada saat yang bersamaan membangun tradisi "*sharing opportunity*". Prinsipnya adalah maju bersama-sama dan untung bersama-sama. Kualitas produk yang ditawarkan seiring sejalan dengan kualitas layanan yang diberikan: singkat, mudah, cepat, dan pasti.

Gerakan Ta'awun Kolektif

Fenomena di atas adalah contoh perkembangan dan revolusi budaya yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini yang barangkali dapat kita refleksikan ke dalam gerakan *ta'awun* yang menjadi tema utama gerakan persyarikatan Muhammadiyah era saat ini

yang dikenal dengan era Revolusi Industri 4.0. Saat ini, diskursus yang berkembang bukan saja bagaimana memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam atau meningkatkan sumberdaya manusia, melainkan juga bagaimana mengelola data. Peran strategis sebuah gerakan sosial, termasuk gerakan keagamaan akan ditumpukan pada kemampuan mengelola dan memanfaatkan data yag dimilikinya efektif mungkin, termasuk untuk tujuan ekonomi. Pengelolaan data yang kuat menjadi modal bagi sebuah organisasi bisnis untuk memengaruhi pasar dan bahkan untuk menciptakan pasar. Begitu pula bagi sebuah organisasi sosial, pengelolaan data yang baik akan mendorong lahirnya sebuah kebijakan yang memiliki capaian lebih terukur dan tepat sasaran.

Muhammadiyah dan jutaan anggota dan simpatisannya adalah sebuah pasar potensial. Ribuan amal usaha yang dimilikinya juga merupakan pasar empuk yang sebisa mungkin harus "diintervensi" oleh para pebisnis. Tak heran, banyak kalangan pebisnis yang ingin bermitra dengan Muhammadiyah, karena jaringan yang dimilikinya. Dengan kata lain, anggota dan para simpatisan Muhammadiyah akan menjadi pasar khusus bagi sebuah produk bisnis. Tentu tidak semua pebisnis hanya ingin memanfaatkan Muhammadiyah sebagai pasar. Tidak sedikit yang secara ideologis tertarik dengan sepak terjang Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil yang telah lama bergelut di bidang sosial, budaya, keagamaan, pendidikan dan tentu saja ekonomi.

Gerakan *ta'awun* tentunya bersifat kolektif. *Ta'awun* menyarakatkan kerja sama, keterbukaan, dan perubahan untuk maju bersama. Gerakan ta'awun juga bermakna bahwa tidak ada peru-

bahan yang lebih efektif untuk dilakukan selain bekerja-bersama, baik antara kelompok masyarakat yang sama-sama kuat untuk meraih sebuah cita-cita besar atau pun menyelesaikan masalah--masalah besar, antara kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah agar yang satu bisa menguatkan yang lain, atau antara sesama yang lemah untuk saling menguatkan dan bangkit bersama-sama. Isu-isu besar tentang krisis lingkungan hidup, kartel bisnis, korupsi, kerawanan ketahanan pangan dan sebagainya tentu tidak bisa perjuangkan sendirian oleh Muhammadiyah. Harus terjadi kerja sama yang kuat yang dibangun oleh Muhammadiyah dengan kelompok masyarakat sipil lainnya. Begitu juga dengan masalah krisis kemanusiaan atau pun penanggulangan kejadian bencana yang frekuensinya cukup tinggi di Indonesia, mensyaratkan aktivis persyarikatan Muhammadiyah untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai organisasi kemanusiaan lainnya. Bergabungnya Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Muhammadiyah sebagai salah satu bagian dari (Humanitarian Forum Indonesia) adalah sebuah langkah yang sangat tepat.

Agenda pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi rujukan masyarakat dunia, termasuk pemerintah Indonesia dan peryarikatan Muhammadiyah secara khusus, dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan potensi lingkungan, juga membutuhkan kerja-kerja kolektif yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil dan sektor swasta (perusahaan-perusahaan). Apalagi ketika Indonesia masih memiliki kesenjangan wilayah yang cukup besar dalam berbagai bidang, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan,

sarana air bersih, dan pekerjaan yang layak dan lain-lain. Tentu, konsep *ta'awun* yang perlu penerjemahan yang lebih luas dan strategis. Bahkan *ta'awun* secara kolektif bukan hanya membutuhkan kemauan yang kuat tapi juga kemampuan membaca data dan menalar startegi. Sebagai organisasi masyarakat sipil, tentu peran Muhammadiyah sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan mencapai tujuan tersebut mustahil dilakukan tanpa bekerja sama dengan banyak pihak. Kontribusi dari kerja-kerja Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan khususnya dalam pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan pendidikan, kesehatan dan penyediaan pekerjaan yang layak, jumlahnya sudah sangat luar biasa besar. Namun, jumlah besar itu perlu pengukuran sehingga dapat terumuskan kontribusi kualitatif dan kuantitatifnya agar dalam tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan mutu kerjanya dan diprioritaskan agenda strategisnya.

Gerakan *ta'awun* secara kolektif dalam persyarikatan Muhammadiyah nampaknya tidak bisa dilepaskan dari tradisi filantropi yang sudah bertahan dan terus terpelihara selama lebih dari seratus tahun. Kekuatan kolektif berbasis komunitas menjadi andalan warga Muhammadiyah untuk berlomba-lomba-lomba dalam berbuat baik. Konsistensi berzakat dan berinfak warga Muhammadiyah perlu ditransformasikan dalam bentuk sebuah gelombang besar gerakan filantropi dengan tata kelola yang rapih, dan tentunya metode yang canggih. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, gerakan filantropi Muhammadiyah mau tidak mau

harus memasuki dunia baru, yaitu adopsi yang menyeluruh terhadap teknologi pengelolaan keuangan yang memungkinkan persyarikatan untuk mengukur dan memproyeksikan kemampuan finansialnya. Tentu, banyak pembanding dari para "pemain baru" filantropi Islam saat ini yang sudah lebih maju dan jauh lebih canggih dann inovatif dari Muhammadiyah dalam mendorong masyarakat umum mengkontribusikan dana zakat dan infak. Artinya, bila persyarikatan Muhammadiyah masih secara konsisten berjalan, tidak sedikit lembaga baru yang sudah melakukan lompatan besar dalam waktu yang singkat yang dapat membuat warga Muhammadiyah terkaget-kaget. Seperti kagetnya sebuah perusahaan besar yang sduah berusia lama dengan kemunculan pemain-pemain baru dalam sebuah sektor bisnis.

Bila dahulu keberadaan amal usaha Persyarikatan dapat menjadi pengikat warga untuk dapat ber-*ta'awun* secara kolektif, saat ini gerakan kolektif *ta'awun* masih perlu direkatkan dengan kemampuan menggunakan sistem teknologi digital yang terbuka dan memberikan ruang bagi lebih banyak warga untuk berbagi kesempatan, berbagi potensi, berbagi kapasitas, berbagi keahlian. Dengan kata lain, di era disrupsi saat ini Persyarikatan Muhammadiyah harus bertransformasi menjadi sebuah *platform* gerakan besar yang mengakomodasi lebih banyak keterlibatan anak bangsa yang cinta perubahan.[]

SENARAI PENULIS

Abdul Mu'ti. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2020

Achmad Santoso. Penyelaras bahasa Jawa Pos, aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, alumnus Youth Leadership Peace Camp 2018

Arif Jamali Muis. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta; Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah.

Azaki Khoirudin. Direktur Program Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta; Anggota Majelis Pendidikan Kader PP. Muhammadiyah.

Bachtiar Dwi Kurniawan. Sekretaris Majelis Permberdayaan Masyarakat PP. Muhammadiyah; Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarya.

Bayujati Prakoso. Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relations Tahun Akademik 2015 di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Benni Setiawan. Anggota Majelis Pendidikan Kader PP. Muhammadiyah; Dosen Universitas Negeri Yogyakarta.

David Efendi. Ketua Serikat Taman Pustaka; Anggota Majelis Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah; Pegiat Rumah Baca Komunitas (RBK).

Fauzan Anwar Sandiah. Kurator Rumah Baca Komunitas (RBK); Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fitrah. Mahasiswa di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Hobi Membaca dan Menulis. "Catatan Anak Bangsa".

Hasnan Bachtiar. Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Australia; Pegiat Pusat Studi Islam dan Filsafat Universitas Muhammadiyah Malang.

Mohamad Ali. Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta; Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta.

Muhbib Abdul Wahab. Sekretaris Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah; Ketua Program Magister Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyyah dan Ilmu Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Pengajar Program Magister Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Muh. Asratillah. Anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan; Presidium Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

Sahrul Hidayat. Kakak Cerdas asal Bandung, Mengabdi di Cianjur.

INDEKS

B

C

D

E

F

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

Y

Z